***Behind The Remitan*: Analisis Pola Pemanfaatan Remitan Oleh Migran Kembali**

(Studi Kasus Pada Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.)

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan uang untuk melangsungkan hidup. Lebih dari sekadar alat tukar, uang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial, ekonomi, bahkan relasi antar individu. Sistem yang berkembang dari sistem barter menjadi uang sebagai alat tukar yang sah membuat uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai penanda nilai sosial dan simbol status dalam masyarakat. Perubahan ini turut membentuk cara pandang manusia terhadap uang—bukan sekadar kebutuhan praktis, tetapi juga alat untuk membuktikan keberhasilan, membangun identitas, hingga meraih pengakuan sosial.

Bekerja merupakan salah satu cara utama bagi manusia untuk memperoleh penghasilan dan mempertahankan keberlangsungan hidup. Terdapat banyak opsi pekerjaan yang ditawarkan di dunia kerja, mulai dari sektor formal hingga informal, serta di berbagai jenis perusahaan. Dari banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, menjadi pekerja migran menjadi opsi utama beberapa masyarakat pada suatu negara. Menurut Mulyadi dalam Qomariya, dkk (2021: 81) mengatakan bahwa migrasi penduduk desa ke kota adalah salah satu cara yang dilakukan masyarakat yang kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang dianggap tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara layak dimana pertumbuhan ekonomi di perkotaan yang lebih baik dari perdesaan dan terpusatnya diberbagai kegiatan ekonomi di perkotaan mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengirim pekerja migran terbesar se-Asia Tenggara. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelum bekerja dan akan bekerja diluar negeri menurut Undang-

Undang Perlindungan Tenaga Kerja Migran (Elviandri, Shaleh. 2022). Sedangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Warga Negara Indonesia yang telah bekerja di luar negeri.

Migrasi tenaga kerja terjadi karena adanya perbedaan antar negara, terutama dalam memperoleh kesempatan di bidang ekonomi. Migrasi internasional Indonesia dicirikan dengan tingkat pendidikan yang rendah, berumur antara 15-40 tahun. Banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai etos kerja yang rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari Thailand, Filipina, dan Korea Selatan. Rendahnya kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) berarti rendahnya pengetahuan mereka tentang hak-haknya. Perjalanan panjang kerjasama pengiriman tenaga kerja tercatat sebagai proses perkembangan perdagangan ekonomi dunia yang semakin berkembang dari tahun ke tahun (Nasution, 1999: 8).

Program pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mengatasi masalah pengangguran. Saat ini, mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdiri dari perempuan yang bekerja sebagai buruh atau pembantu rumah tangga. Mereka memilih bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan gaji yang lebih besar untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Rasa senang dan antusias seringkali muncul ketika mereka membayangkan hidup di negara lain dengan penghasilan yang lebih tinggi. Tekanan ekonomi yang dihadapi di dalam negeri seringkali mendorong mereka untuk memantapkan tekad bekerja di luar negeri sebagai solusi finansial.

Migrasi terjadi karena percepatan pertumbuhan penduduk, namun karena kurangnya kesempatan kerja, migrasi internasional merupakan peluang emas untuk mendapatkan pekerjaan, yang berujung pada penghidupan dan peningkatan perekonomian keluarga. Dimulai pada abad ke 20, migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang berlaku secara besar-besaran dalam konteks ekonomi kolonial yang memerlukan tenaga kerja yang ramai di Malaysia. Sebagian orang Jawa datang untuk menjadi kuli kontrak pemodal oleh Inggris. Pada masa yang sama ada juga orang-orang Melayu dari Malaysia yang merantau ke Indonesia dan kemudian terus menetap di Indonesia (Nasution, 1997: 1). Pada masa kolonial, fenomena buruh Indonesia di Malaysia dalam berbagai sektor menjadi tradisi dan sebagai ‘adat’ merantau dalam kehidupan mereka dan

menjadi suatu gaya hidup yang positif dan dinamik. Pada masa kolonial baik di Indonesia maupun Malaysia pihak pemerintah telah merencanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Pembangunan tentunya khusus untuk kepentingan membina keutuhan ekonomi dan politik kolonial.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai mengalami peningkatan pada masa kepemimpinan Soeharto (1966-1998). Pada tahun 1983, pemerintah berupaya mengatasi dampak dari penurunan harga minyak dengan menerapkan kebijakan deregulasi ekonomi yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sumber-sumber lain. Akibatnya, pemerintah mengembangkan basis ekonomi yang berfokus pada tenaga kerja murah di dalam negeri guna menarik investasi asing, serta mendorong program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Tirtosudarmo, 2002: 4).

Sejak tahun 1970, pemerintah menetapkan kebijakan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pihak swasta untuk mengelola proses pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Dengan adanya peraturan ini, pengelolaan tenaga kerja tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak swasta (Irewati, 2003: 34).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, migrasi internasional saat ini “berwajah perempuan”, dengan perempuan dan anak perempuan mencakup sekitar 50% dari lebih dari 214 juta migran di seluruh dunia (United Nations dalam Martiany, 2013: 292). Di Asia, tren serupa terlihat jelas seiring meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik dan tingginya permintaan tenaga kerja domestik di negara tujuan (ILO, 2017). Di Asia Tenggara, beberapa negara pengirim utama seperti Filipina dan Sri Lanka menunjukkan dominasi migran perempuan yang sangat tinggi—di Sri Lanka misalnya mencapai 84% (ILO, 2017). Di Indonesia, fenomena ini tercermin dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mencatat bahwa dari total 6,5 juta pekerja migran Indonesia di 143 negara, 78% adalah perempuan, mayoritas bekerja di sektor informal sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Martiany, 2013: 291).

Fenomena feminisasi pekerja migran ini dipicu oleh keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan calon pekerja, serta tingginya permintaan PRT migran di negara tujuan. Permintaan ini tumbuh seiring semakin banyaknya perempuan kelas menengah di negara tujuan yang masuk ke pasar kerja publik, sehingga pekerjaan domestik—yang secara stereotip dilekatkan pada perempuan—dialihkan kepada pekerja migran perempuan (Martiany, 2013: 292–293). Bukti konkret feminisasi migrasi hingga kini dapat dilihat dari konsentrasi besar pekerja migran perempuan Indonesia di sektor rumah tangga di negara seperti Arab Saudi, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab, di mana sektor ini berada di ranah informal, kerap tidak dilindungi undang-undang ketenagakerjaan formal, dan rawan eksploitasi (Martiany, 2013: 293).

Prastiwi (2023: 56) menjelaskan bahwa feminisasi pekerja migran terjadi karena gabungan faktor struktural, kultural, dan jaringan sosial. Salah satu pendorong terbesarnya adalah tingginya permintaan tenaga kerja rumah tangga di negara tujuan. Pekerjaan domestik ini sejak lama dilekatkan secara kultural pada peran perempuan *(nurture)* sebagai pengasuh, pengurus rumah, dan perawat, sehingga peluang kerja di sektor ini hampir selalu ditujukan untuk perempuan. Pada sisi lain, terbatasnya lapangan kerja formal di dalam negeri, terutama bagi perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, mendorong mereka untuk mencari kesempatan di luar negeri meskipun sering kali hanya tersedia di sektor informal. Faktor lain yang tak kalah penting adalah keberadaan jaringan sosial migrasi—baik keluarga, kerabat, maupun tetangga—yang mempermudah proses keberangkatan. Jaringan ini menyediakan informasi, dukungan, dan akses ke jalur perekrutan yang dianggap lebih aman. Keseluruhan faktor ini saling menguatkan dan membentuk pola migrasi yang semakin didominasi perempuan, khususnya di sektor rumah tangga, sehingga mempertegas tren feminisasi pekerja migran.

Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat kabupaten Indramayu adalah kemiskinan, kemiskinan di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja (Bharata, 2024). Terbatasnya lapangan kerja di Indonesia merupakan suatu dorongan bagi masyarakat Indramayu untuk mulai merangkak mencari pekerjaan di luar negeri. Selain kurs mata uang yang lebih tinggi, menjadi pekerja migran merupakan suatu

opsi lain bagi masyarakat Indonesia jika sudah dirasa sulit untuk mencari lapangan kerja yang sesuai dengan background yang dimiliki.

Fenomena pekerja migran ini seringkali dijumpai di daerah-daerah Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Domisili dari Pekerja Migran Indonesia menurut data dari Pikiran Rakyat, pada tahun 2024 pekerja migran terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur, disusul provinsi Jawa Barat dan provinsi Jawa Tengah. Negara tujuan dari pekerja migran terbanyak ialah Hongkong dan Taiwan. Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten dengan pekerja migran terbanyak se-provinsi Jawa Barat.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu biasanya berangkat ke negara-negara Asia seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Arab dan Malaysia. Banyak dari masyarakat Indramayu yang memutusksan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah karena adanya faktor penarik dan pendorong yang menjadikan suatu kondisi dari berbagai aspek yang tidak memadai menjadi faktor pendorong untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu memilih untuk berangkat ke luar negeri menjadi pekerja migran. Lee (1975) menjelaskan push and pull theory menjelaskan faktor-faktor yang mendorong (push) dan menarik (pull) seseorang untuk melakukan migrasi, termasuk migrasi tenaga kerja. Menurut penjelasan teori ini ada 4 faktor yang mendorong orang mengambil keputusan untuk bermobilitas yaitu: (a) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal (dorong), (b) Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan (tarik), (c) Faktor penghalang, dan (d) Faktor pribadi (Susilo, 2015: 2).

Menurut Suyanto (2018: 31) faktor utama yang mendorong migrasi adalah masalah ekonomi, seperti minimnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan di negara asal (Indonesia), serta adanya peluang kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi di negara tujuan. Menurut Adioetomo dan Samosir (2013: 137) dalam Alvino dan Dewi (2020: 2243) daerah tujuan juga memiliki sejumlah faktor penarik yang mendorong mobilitas, seperti harapan untuk memperbaiki taraf hidup, peluang mendapatkan pekerjaan yang sesuai, serta kesempatan mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Pilihan menjadi pekerja migran bagi masyarakat dengan kondisi daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sosial budaya, ekologis, dan ekonomi memiliki peranan penting bagi alasan seseorang melakukan migrasi.

Remitan dalam Suyanto (2018: 32) dalam jurnal Endogami yang berjudul "Pemanfaatan Remitan Ekonomi dan Ketergantungan Migran Kembali Bekerja di Luar Negeri" merupakan penghasilan yang diperoleh di daerah tujuan yang dibawa pulang dikirim dikirimkan ke daerah asal. Uang remitan ini adalah uang yang disisihkan oleh para pekerja migran untuk menafkahi keluarga di negara asal. Penggunaan dari uang remitan menurut Suyanto (2018: 33) sangat beragam. Namun, penggunaan uang remitan ini seringkali digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti membeli motor, mobil, rumah, dsb. Ditambah adanya perubahan gaya hidup yang dibawa oleh PMI dari negara dimana ia bekerja menjadi pendorong dimana budaya konsumtif ini sangat berkembang pada keluarga PMI.

Fenomena penggunaan remitansi yang lebih banyak diarahkan untuk konsumsi barang-barang sekunder, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, hingga membangun rumah yang megah, tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi dan budaya di daerah asal pekerja migran. Dalam banyak kasus, perempuan tenaga migran menjadi pilar keluarga dan menanggung ekspektasi sosial untuk menunjukkan keberhasilan finansial secara nyata. Pada daerah seperti Indramayu, keberhasilan seorang perempuan sebagai pekerja migran tidak hanya dinilai dari lamanya bekerja di luar negeri, tetapi juga dari aset-aset material yang ia bawa pulang. Situasi ini mendorong munculnya budaya glamor (Mas'udah, 2020), yaitu kecenderungan menampilkan keberhasilan migrasi melalui simbol-simbol konsumsi. Bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan, remitan juga menjadi sarana untuk mendapatkan pengakuan sosial dan harga diri di lingkungan sekitar.

Pekerja migran seringkali mengambil inisiatif dalam mengirimkan remitan ke keluarga mereka. Mereka memutuskan bagaimana mengelola penghasilan mereka, meskipun keputusan tersebut sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dalam banyak kasus, pekerja migran perempuan berada dalam posisi ambigu: di satu sisi mereka menjadi penghasil utama dalam rumah tangga, namun di sisi lain kontrol atas remitansi tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Remitan yang dikirim ke kampung halaman acap kali langsung dikelola oleh orang tua, pasangan, atau kerabat dekat, yang belum tentu menggunakan dana tersebut sesuai dengan harapan si pengirim. Ketimpangan dalam kontrol ini menunjukkan bahwa migrasi tidak serta merta menggeser

struktur kuasa yang sudah mengakar dalam keluarga dan masyarakat. Remitan bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga sarat dengan nilai-nilai moral, relasi afektif, dan struktur kekuasaan yang kompleks (Wilkis, 2017).

Pengiriman uang remitan yang ditujukan pada keluarga pekerja migran menunjukkan pola ketergantungan pada uang remitan. Bagi keluarga dari pekerja migran, uang remitan merupakan sumber kehidupan karena uang remitan berperan penting. Ditambah lagi dengan kebiasaan konsumtif pada masyarakat Indramayu, justru uang remitan juga memiliki peran krusial dalam status sosial. Remitan merupakan indikator penting dalam perekonomian keluarga migran, karena di samping bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, pengiriman remitan juga dapat membawa perubahan perilaku dan gaya hidup (Mustapita & Rizal, 2017). Banyak pekerja migran yang menghadapi ekspektasi besar dari keluarga untuk terus mengirim uang, yang bisa menjadi beban emosional dan finansial. Maka dari itu, tidak sedikit pekerja migran yang ingin memperpanjang kontrak dan kembali menjadi pekerja migran di negara yang berbeda. Salah satu isu penting adalah apakah remitan yang dikirimkan oleh pekerja migran memungkinkan mereka untuk membangun kemandirian ekonomi atau malah memperkuat ketergantungan pada keluarga dan struktur patriarki. Maka dari itu, kontrol atas uang remitan juga menjadi suatu permasalahan.

Usia rata-rata pekerja migran adalah 21 tahun, dengan batas usia maksimal 40 tahun. Rata-rata durasi kerja mereka di luar negeri adalah maksimal 3 tahun. Selain itu, sebagian besar calon pekerja migran yang bekerja melalui agen di Indonesia sudah menikah, dan hanya sebagian kecil yang masih lajang. Umumnya, mereka yang belum menikah memiliki alasan untuk mengejar karir atau membayar hutang orang tua terlebih dahulu, dan baru memutuskan untuk bekerja di luar negeri setelah merasa siap secara mental dan finansial (Bharata, 2024).

Akan tetapi, bagi banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI), masa kerja di luar negeri bukanlah titik akhir dari perjalanan hidup mereka. Justru, kepulangan ke tanah air kerap menjadi awal dari fase kehidupan baru yang tak kalah kompleks. Mereka tidak hanya membawa pulang remitan dalam bentuk uang, tetapi juga pengalaman, nilai-nilai baru, dan cara pandang yang baru. Bagi PMI yang sudah menikah, kepulangan berarti kembali mengemban peran domestik dan tanggung jawab keluarga, sementara bagi yang

belum menikah, masa purna menjadi momen refleksi untuk menyusun kembali rencana hidup, termasuk apakah akan kembali bekerja ke luar negeri atau mencoba bertahan dan membangun kehidupan di kampung halaman. Dalam banyak kasus, pengalaman migrasi ini membentuk siklus yang tidak sederhana—antara keinginan untuk menetap dan dorongan untuk kembali merantau karena kebutuhan ekonomi yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran ialah; kontrak dan usia. Mereka seringkali memperpanjang kontrak kerja, namun agensi pekerja migran seringkali memberi batasan usia pada pekerja migran sehingga jika usia pekerja migran sudah melebihi batas yang ditentukan, maka mereka tidak diperkenankan untuk diberangkatkan kembali untuk bekerja sebagai pekerja migran. Ketika usia mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk diberangkatkan, banyak di antara mereka yang terpaksa kembali ke kampung halaman tanpa perencanaan ekonomi yang matang. Situasi ini semakin kompleks ketika tabungan dari remitansi sebelumnya telah habis untuk kebutuhan konsumtif, biaya pendidikan anak, atau pembangunan rumah. Akibatnya, beberapa mantan pekerja migran merasa kesulitan beradaptasi dengan realitas ekonomi lokal yang terbatas dan tidak mampu menyediakan alternatif pekerjaan dengan pendapatan setara.

Dalam banyak kasus, para perempuan ini tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan identitas sosial yang selama ini mereka bangun sebagai tulang punggung keluarga. Fenomena ini mencerminkan bagaimana sistem migrasi internasional seringkali menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak berkelanjutan, terutama ketika kebijakan usia dan kontrak tidak dibarengi dengan sistem reintegrasi sosial dan ekonomi yang memadai.

Namun, tidak semua mantan pekerja migran dapat melanjutkan hidup dengan pilihan yang leluasa setelah kembali ke tanah air. Bagi sebagian pekerja migran yang telah melewati usia maksimal untuk diberangkatkan kembali sebagai pekerja migran biasanya di atas 45 tahun—pintu untuk kembali bekerja ke luar negeri telah tertutup. Padahal, semangat untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga masih menyala. Dalam kondisi seperti ini, banyak dari mereka yang kemudian mengandalkan sisa tabungan dan aset yang berhasil dikumpulkan selama bekerja di luar negeri. Tabungan

tersebut tidak hanya menjadi penopang ekonomi keluarga sehari-hari, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk mempertahankan martabat hidup mereka di kampung halaman.

Kontrol atas uang remitan juga menjadi suatu permasalahan dimana remitan bisa saja menjadi suatu alat untuk para pekerja migran dapat melepaskan diri dari belenggu-belenggu patriarki yang dirasakan. Salah satu isu penting adalah apakah remitan yang dikirimkan oleh pekerja migran memungkinkan mereka untuk membangun kemandirian ekonomi atau malah memperkuat ketergantungan pada keluarga dan struktur patriarki. Namun, dalam praktiknya, remitan juga berpotensi memperkuat ketergantungan pada keluarga atau orang terdekat dan struktur patriarkal yang telah mengakar. Selama masa bekerja di luar negeri, tidak sedikit pekerja migran perempuan yang mengalami ketimpangan akibat ideologi patriarki yang berkembang di masyarakat asal mereka.

Melalui penelitian ini, saya ingin menelusuri bagaimana pengelolaan remitan dilakukan oleh purna pekerja migran yang telah kembali ke tanah air, serta bagaimana pengalaman dan strategi hidup mereka pasca migrasi, khususnya ketika usia dan kebijakan kerja tidak lagi memungkinkan mereka untuk kembali bekerja di luar negeri. Penelusuran ini penting tidak hanya untuk memahami aspek ekonomi semata, tetapi juga untuk menggali dimensi sosial, budaya, dan moral yang melekat dalam praktik pengelolaan remitan di kalangan purna pekerja migran perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan strategi pengelolaan remitansi oleh purna pekerja migran setelah kembali ke daerah asal?
2. Apa tantangan yang dihadapi purna pekerja migran dalam mengelola remitansi pasca kepulangan, dan bagaimana mereka mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran mengenai analisis pola pemanfaatan remitan sehingga dapat mengetahui bagaimana purna pekerja migran dapat mengelola remitannya setelah pulang ke negara asal.

2. Memahami bagaimana mantan pekerja migran perempuan di Desa Lohbener mengelola remitan yang mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri, serta bagaimana posisi mereka dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana tersebut dipengaruhi oleh faktor usia, status keluarga, dan relasi gender pasca migrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi pola migrasi pekerja migran, serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat di daerah asal. Penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan kepada pembaca guna memahami permasalahan yang dialami oleh purna pekerja migran di desa Lohbener, Kabupaten Indramayu berdasarkan fenomena pengelolaan remitan oleh purna pekerja migran. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika pengelolaan remitan dari purna pekerja migran mencerminkan permasalahan ekonomi yang dialami oleh purna pekerja migran, suatu hubungan kekuasaan dalam keluarga, serta bagaimana pola pemanfaatan remitan dapat menjadi cerminan peran gender dalam masyarakat. Hal ini tentunya dapat memiliki kebermanfaatan dalam pembangunan kajian Antropologi Konsumsi, Ekonomi, dan Gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi kajian-kajian yang berfokus pada isu migrasi tenaga kerja, remitan, dan gender. Pembaca dapat menggunakan temuan ini untuk memperkaya diskusi teoritis di bidang antropologi ekonomi, antropologi gender, dan studi migrasi, serta sebagai bahan pembelajaran dalam perkuliahan atau penelitian lanjutan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pijakan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu-isu seputar purna pekerja migran terkhusus perempuan, pengelolaan remitan dan permasalahan ekonomi, maupun relasi gender dalam keluarga. Selain itu, temuan dari penelitian ini berpotensi membuka peluang untuk merumuskan isu-isu lanjutan yang relevan terkait penelitian ini sebagai topik penelitian di masa mendatang.

c. Bagi Pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya terkait pengelolaan remitan, perluasan lapangan kerja dalam negeri dan upah layak bagi para pekerja.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Setelah saya melakukan observasi terhadap penelitian dengan topik berikut, terdapat beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saya lakukan.

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap, baik secara permanen maupun sementara. Suyanto & Efriani (2023) menjelaskan bahwa migrasi dapat dibedakan menjadi migrasi internal (perpindahan dalam wilayah satu negara) dan migrasi internasional (perpindahan lintas batas negara). Migrasi internasional, seperti yang terjadi pada pekerja migran Indonesia ke Malaysia, melibatkan perpindahan legal maupun ilegal dan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, sosial, serta kebijakan antarnegara. Bentuk migrasi juga dapat dilihat dari jangka waktunya, seperti migrasi permanen, di mana individu menetap lebih dari enam bulan di daerah tujuan, dan migrasi sirkuler atau non-permanen, yang berlangsung kurang dari enam bulan. Dalam konteks pekerja migran, banyak yang termasuk kategori migrasi permanen sesuai kontrak kerja, namun sebagian juga bersifat sirkuler ketika bekerja musiman atau pulang-pergi dalam periode singkat. Faktor pendorong migrasi menurut Suyanto & Efriani (2023) meliputi faktor ekonomi seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya upah di daerah asal, faktor sosial budaya seperti dorongan keluarga, tradisi migrasi, dan keinginan meningkatkan

status sosial, serta faktor struktural berupa kebijakan penempatan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di negara tujuan. Pemilihan buku ini sebagai tinjauan pustaka didasarkan pada relevansinya yang tinggi dengan penelitian ini. Buku karya Suyanto & Efriani (2023) memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep migrasi, tipologi, serta faktor-faktor pendorongnya dengan studi kasus pekerja migran Indonesia–Malaysia yang memiliki kesamaan karakteristik dengan pekerja migran dari Indramayu. Kedalaman analisis dan penyajian data empiris di buku ini menjadikannya sumber rujukan yang otoritatif untuk memahami fenomena migrasi dalam konteks penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh saya adalah tulisan berupa jurnal oleh Novitasari, dkk (2020) Para calon pekerja migran tersebut memilih menjadi pekerja migran dengan sukarela dengan alasan untuk mencari pengalaman baru, membantu perekonomian keluarga, serta karena gaji yang lebih besar akan diperoleh apabila menjadi pekerja migran di luar negeri. Menjadi pekerja migran khususnya di sektor domestik tidak akan jauh berbeda dengan tugasnya sebagai IRT yaitu mengurus urusan rumah tangga, mulai dari masak, bersih-bersih, hingga belanja keperluan sehari-hari. Untuk menjadi pekerja migran syarat pendidikan formal tidak ada ketentuan khusus sehingga IRT yang merupakan lulusan SD, SMP, SMA, atau jenjang pendidikan lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pekerja migran. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena penelitian hanya akan berfokus pada satu unit yaitu fenomena yang ada di Desa Banaran dan tidak memiliki kesamaan yang saya anggap identik dan berbeda dari daerah lain.

Penelitian lain yang ditemukan oleh saya dari Ana, dkk (2021) menyatakan bahwa alasan pertama seseorang memutuskan menjadi pekerja migran adalah keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Terdapat perubahan peran pencari nafkah keluarga yang disebabkan oleh besarnya penghasilan dari pekerja migran membuat peran pencari nafkah yang awalnya dijalankan oleh suami digantikan oleh istri.

Jurnal dari Suyanto (2018) dengan judul "Pemanfaatan Remitan Ekonomi dan Ketergantungan Migran Kembali Bekerja di Luar Negeri" memberikan saya suatu gambaran atas alokasi penggunaan uang remitan yang diberikan oleh pekerja migran

terhadap keluarga pekerja migran sehingga saya dapat menemukan pola konsumsi oleh keluarga pekerja migran atas uang remitan dan mengetahui alasan mengapa para pekerja migran banyak yang ingin memperpanjang kontrak untuk kembali bekerja di luar negeri.

Remitansi merupakan pendapatan yang dikirimkan oleh anggota keluarga yang bekerja di luar daerah atau luar negeri kepada keluarganya di daerah asal. Remitansi memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian rumah tangga, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumsi maupun sebagai modal untuk kegiatan produktif (Mas'udah, 2019). Namun, manfaat remitansi sangat bergantung pada strategi pengelolaan yang dilakukan oleh keluarga penerima. Menurut Mas'udah (2019), pola pengelolaan remitansi di tingkat rumah tangga mencakup alokasi untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, serta investasi seperti pembelian aset produktif atau modal usaha. Faktor yang memengaruhi pengelolaan ini antara lain tingkat pendapatan remitansi, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan keterampilan pengelolaan keuangan. Kurangnya perencanaan keuangan sering menyebabkan remitansi habis untuk konsumsi, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Pengelolaan remitansi yang efektif memerlukan pemahaman mengenai prioritas kebutuhan, pemisahan dana untuk konsumsi dan investasi, serta akses terhadap instrumen keuangan yang aman. Dalam konteks desa penelitian Mas'udah (2019), keberhasilan pengelolaan remitansi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dari komunitas dan ketersediaan peluang usaha di tingkat lokal.

Penelitian mengenai remitan dan pengaruhnya terhadap keluarga telah menjadi salah satu topik penting dalam kajian migrasi internasional. Remitan, sebagai hasil dari migrasi tenaga kerja, memiliki peran signifikan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga di daerah asal. Menurut Alvino dan Dewi (2020) dalam jurnal "Pemanfaatan Remitan oleh Keluarga Tenaga Kerja Indonesia untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Daerah Asal", pengiriman remitan oleh pekerja migran secara signifikan memengaruhi kesejahteraan keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi rumah tangga, pendidikan, dan kesehatan.

Arif Rofiuddin (2018) dalam skripsinya yang berjudul "Rasionalitas Masyarakat Indramayu Dalam Memutuskan Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) : Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu"

menekankan bahwa migrasi tenaga kerja sering kali didorong oleh keterbatasan ekonomi dan minimnya peluang kerja di dalam negeri. Dalam konteks Indramayu, faktor pendorong lainnya adalah cerita sukses dari generasi sebelumnya yang berhasil meningkatkan taraf hidup mereka melalui pekerjaan di luar negeri. Hal ini menjadi stimulus bagi keluarga lain untuk mengadopsi strategi serupa dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa remitan yang dihasilkan oleh pekerja migran berfungsi tidak hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi tetapi juga sebagai sarana mobilitas sosial. Namun, pemanfaatan remitan sering kali dipengaruhi oleh dinamika gender dalam keluarga, di mana keputusan terkait alokasi remitan kerap dikendalikan oleh anggota keluarga laki-laki. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana remitan dimanfaatkan oleh keluarga pekerja migran untuk mendukung kebutuhan mereka, serta bagaimana hal tersebut mencerminkan relasi sosial dan gender di masyarakat asal.

Buku yang berjudul "Teori-teori Tentang Wilayah Dan Migrasi" oleh Rahmadana (2020) menjelaskan alasan utama perempuan Indramayu menjadi pekerja migran. Faktor pendorong seperti kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan di Indramayu memaksa mereka mencari peluang di luar negeri. Sementara itu, faktor penarik seperti harapan mendapatkan penghasilan lebih besar dan stabilitas ekonomi mendorong mereka untuk bermigrasi. Fenomena pekerja migran yang bekerja sementara di luar negeri dan mengirimkan remitan kepada keluarga menurut buku ini telah mencerminkan sebuah konsep migrasi sirkuler. Mereka bekerja di negara tujuan, tetapi hubungan mereka dengan keluarga dan tempat tinggal asal tetap terjaga melalui pengiriman remitan. Buku ini membantu saya untuk menjelaskan alasan di balik migrasi perempuan Indramayu menjadi pekerja migran. Faktor pendorong seperti kemiskinan dan minimnya lapangan kerja di Indramayu selaras dengan konsep push factors, sementara harapan penghasilan tinggi di negara tujuan dapat dikaitkan dengan pull factors.

Ariel Wilkis dalam karyanya yang berujudul "The Moral Power of Money : Morality and Economy in The Life of The Poor" membahas peran uang dalam kehidupan sosial, tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai entitas dengan dimensi moral yang dapat mencerminkan dan membentuk hierarki sosial dalam masyarakat. Wilkis mengemukakan bahwa uang dapat digunakan untuk menunjukkan

status sosial dan identitas seseorang, yang tidak hanya terkait dengan kemampuan finansial, tetapi juga dengan bagaimana uang tersebut dipergunakan dalam kehidupan sosial. Konsep utama dalam teorinya adalah *modal moral* (moral capital), yang menjelaskan bahwa kebajikan dan nilai-nilai moral seseorang dapat diidentifikasi melalui penggunaan uang. Dalam konteks ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai indikator status dan posisi sosial seseorang di dalam masyarakat. Saya menggunakan buku ini sebagai landasan teori untuk mengimplementasikan teori kepada studi kasus pada penelitian ini.

Pemanfaatan remitan oleh keluarga tenaga kerja internasional telah menjadi topik penting dalam penelitian antropologi ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Suyanto dan Fajrul Falah (2022) pada jurnal berjudul "Remitan dan Kendala Pemanfaatannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Migran di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah" menunjukkan bahwa remitan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga migran. Sebagian besar remitan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli tanah, membangun rumah, membeli perabotan modern, kendaraan bermotor, serta membiayai pesta pernikahan dan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk usaha produktif. Dengan demikian, remitan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan relasi sosial dan gender dalam keluarga. Oleh karena itu, pemanfaatan remitan yang efektif membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika keluarga dan struktur sosial di daerah asal migran.

1.5.2 Landasan Teori

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Kekuatan Moral Uang (The Moral Power of Money) yang dikembangkan oleh Ariel Wilkis. Teori ini menyoroti bagaimana uang, yang sering dianggap sebagai alat ekonomi netral, sebenarnya memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Dalam pandangan ini, uang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi alat untuk membangun, mempertahankan, atau bahkan menantang hierarki sosial dan kekuasaan. Wilkis, dalam Suyanto & Falah (2022: 120) menjelaskan bahwa terminologi dari modal moral (moral capital) yang dikembangkan oleh Ariel Wilkis memanfaatkan konsep dari

sosiologi kekuasaan Pierre Bourdieu dan sosiologi uang Viviana Zelizer untuk menganalisis hubungan antara uang, kekuasaan, dan moralitas.

Uang dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu uang pinjaman, uang penghasilan, uang donasi, uang politik, uang pengorbanan, dan uang yang dilindungi (lent money, earned money, donated money, political money, sacrificed money, and safeguarded money). Setiap jenis uang ini merepresentasikan ide-ide dan keyakinan moral tertentu yang ada dalam masyarakat. Potongan-potongan uang tersebut berfungsi untuk menilai, membandingkan, dan mengukur hierarki moral individu dalam masyarakat, berdasarkan cara uang tersebut diperoleh dan digunakan.

Uang-uang yang telah dikelompokkan menjadi beberapa jenis memiliki definisi sebagai berikut :

1. Lent Money : Uang yang diberikan kepada orang lain dengan harapan akan dikembalikan, biasanya dengan bunga, hal ini mencerminkan hubungan keuangan yang didasarkan pada kepercayaan dan kewajiban.
2. Earned Money : uang yang didapat melalui kerja atau usaha, sering kali dianggap sebagai hasil dari kemampuan, keterampilan, atau waktu seseorang. Uang ini biasanya dikaitkan dengan pencapaian pribadi dan nilai sosial.
3. Donated Money : Uang yang diberikan sebagai hadiah atau untuk tujuan amal, atau untuk mendukung suatu kegiatan, dalam arti lain diberikan secara sukarela.
4. Political Money : Uang yang digunakan dalam konteks politik, seperti pembiayaan kampanye, lobi, atau bentuk pengaruh politik lainnya. Uang politik dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dan sering kali terkait dengan strategi politik.
5. Sacrificed Money : Uang yang diserahkan atau digunakan untuk tujuan yang lebih besar, sering kali dengan mengorbankan keuntungan pribadi.
6. Safeguarded Money : Uang yang disimpan atau dilindungi, sering melalui tabungan, investasi, atau langkah-langkah lain untuk menjaga keamanan finansial di masa depan.

Teori ini mengkaji keterkaitan antara uang, moralitas, dan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Uang tidak hanya dilihat sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai entitas dengan dimensi moral yang dapat mencerminkan sekaligus membangun hierarki sosial. Konsep utama dalam teori ini, yaitu modal moral, menyoroti bagaimana kebajikan serta nilai-nilai moral seseorang dapat diidentifikasi, diukur, dan diakui melalui cara penggunaan uang. Uang sering dipandang sebagai alat ekonomi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki makna sosial dalam masyarakat.

Selain berfungsi sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, uang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial, politik, budaya, dan psikologis. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin tinggi status sosial yang dimiliki, yang pada gilirannya dapat memengaruhi posisi dalam bidang lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini sejalan dengan konsep *cultural capital* yang dikembangkan oleh Bourdieu, yang menyatakan bahwa hubungan politik dan ekonomi dalam masyarakat dipengaruhi oleh status sosial yang dimiliki (Ainiah, 2020: 4). Uang menjadi penting bukan hanya karena fungsinya, tetapi juga karena dianggap sebagai ukuran yang digunakan dalam masyarakat untuk menentukan status sosial seseorang (Ainiah, 2020: 4).

Dalam penelitian ini, teori Wilkis digunakan untuk menjelaskan pemanfaatan remitan yang dikirim oleh tenaga kerja wanita (TKW) dari Indramayu, yang dalam hal ini dianggap sebagai *earned money* (uang yang diperoleh). Pendapatan atau remitan yang diterima digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi keluarga, namun juga dapat dilihat sebagai sarana untuk mengubah status sosial ekonomi mereka. Uang yang dikirim oleh TKW sering kali meningkatkan posisi sosial keluarga mereka, yang sebelumnya berada di lapisan bawah, menjadi lebih stabil secara ekonomi. Dengan demikian, remitan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berperan dalam meredefinisi posisi perempuan dalam struktur sosial yang cenderung patriarkal, dimana peran perempuan sebagai pencari nafkah utama seringkali dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.

Teori ini sangat relevan dalam memahami dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Indramayu, terutama terkait dengan remitan yang dikirim oleh tenaga kerja wanita (TKW). Uang yang dikirim oleh TKW ke keluarga mereka tidak hanya

berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dapat memengaruhi posisi sosial mereka dalam struktur sosial masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam hubungan kekuasaan dan patriarki yang ada.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Metode etnografi dipilih untuk memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah utama dan pengalaman tenaga kerja wanita di Desa Lohbener, Kabupaten Indramayu secara holistik dan mendalam. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode etnografi sebagai pendekatan utama karena metode ini memungkinkan saya untuk memahami dinamika masyarakat dengan cara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penelitian tentang pola kontrol uang remitan, mengingat bahwa isu terkait pengelolaan remitan dapat menjadi topik sensitif yang hanya dapat dibahas secara mendalam dengan orang-orang yang dipercaya oleh informan.

Sebagai bagian dari metode ini, saya turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat di Desa Lohbener, seperti menghadiri acara sosial seperti pernikahan, pengajian, dan menjalin interaksi secara langsung dengan purna pekerja migran. Melalui keterlibatan ini, saya dapat memahami bagaimana masyarakat Desa Lohbener memandang uang remitan, khususnya bagaimana pekerja migran mengontrol dan mengelola remitan, serta bagaimana purna pekerja migran menjawab tantangan ekonomi setelah kepulangan mereka dari negara dimana mereka bekerja.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Awal mula yang membuat saya tertarik mendalami kajian tentang pengelolaan remitan pasca kepulangan oleh purna pekerja migran di Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, ini bermula dari kunjungan saya pada Mei 2024. Pada saat itu, saya berbincang dengan tetangga saya, seorang purna pekerja migran perempuan di Arab Saudi, yang berbagi banyak cerita menarik tentang pengalaman kerja dan pengiriman uang remitan. Beliau mengaku bahwa terdapat suatu kehidupan yang amat sangat berbeda ketika beliau masih bekerja di Arab Saudi dan ketika beliau

sudah pulang ke Indonesia sebagai purna pekerja migran. Diskusi ini membuka mata saya tentang dinamika yang dialami pekerja migran dan purna pekerja migran khususnya mengenai tantangan hidup jauh dari keluarga, hingga risiko yang mengancam keselamatan mereka di negara tempat bekerja terlebih mayoritas dari mereka adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan sangat rentan terkena kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Tak hanya itu, beliau juga menceritakan lika-liku permasalahan ekonomi yang dialaminya ketika beliau pulang ke rumah.

Ketertarikan saya semakin mendalam setelah saya mewawancarai beberapa tetangga di Desa Lohbener. Salah satunya adalah seorang pekerja migran yang baru saja kembali dari Hong Kong dan seorang pelaku pengiriman remitan yang berperan penting dalam menyampaikan uang kepada keluarga penerima. Dari wawancara ini, saya menemukan bahwa meskipun pekerja migran bekerja keras di luar negeri, kendali atas uang remitan sering kali berada di tangan keluarga penerima, yang memiliki prioritas berbeda dengan sang pengirim. Fenomena ini mengangkat pertanyaan menarik tentang kontrol dalam pengelolaan remitan serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Jika remitan tidak dikelola dengan baik maka akan timbul suatu permasalahan ekonomi.

Penelitian lapangan ini berlangsung selama dua bulan dari Mei-Juli 2025, ketika saya berupaya mengintegrasikan diri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Lohbener. Saya menghadiri acara-acara sosial, seperti pengajian dan arisan, serta berbincang santai dengan purna pekerja migran, tetangga, serta salah satu anggota keluarga pekerja migran. Kegiatan ini saya lakukan untuk menggali lebih dalam tentang sudut pandang masyarakat terhadap remitan, termasuk bagaimana uang tersebut digunakan, siapa yang memiliki kendali atasnya, karena tujuan penelitian saya adalah untuk mengungkap bagaimana purna pekerja migran mengelola remitan pasca kepulangan dari negara mereka bekerja, maka saya juga menggali informasi tentang bagaimana mereka menjawab tantangan ekonomi setelah kepulangan mereka ke Indonesia. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat memahami lebih jauh tentang upaya purna pekerja migran untuk menjawab tantangan permasalahan ekonomi setelah mereka pulang.

1.6.3 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan kombinasi purposive sampling dan snowball sampling. Snowball sampling merupakan metode pemilihan informan dengan menggunakan bantuan dari informan awal untuk menunjuk atau merekomendasikan informan berikutnya yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dilakukan secara berantai, sehingga jaringan informan berkembang dari satu individu ke individu lain, khususnya mereka yang memiliki pengalaman atau keterlibatan langsung dengan isu yang diteliti. Teknik snowball sampling merupakan metode yang digunakan untuk menemukan, memilih, dan mengambil sampel berdasarkan jaringan atau rantai hubungan yang saling berkelanjutan (Neumann dalam Nurdiani, 1113: 2003). Dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling, peneliti tidak hanya berhenti pada informan awal. Selanjutnya, peneliti memperoleh rekomendasi nama-nama informan lain dari partisipan sebelumnya, sehingga jaringan responden terus meluas dan berkembang seiring berjalannya penelitian. Penggunaan teknik snowball sampling dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjangkau informan yang sulit diidentifikasi secara langsung, terutama ketika subjek penelitian berada dalam komunitas tertentu, memiliki keterlibatan terbatas, atau topik yang dikaji bersifat sensitif. Dengan bantuan rekomendasi dari informan sebelumnya, peneliti dapat membangun kepercayaan dan kedekatan dengan calon informan baru, sehingga proses wawancara atau pengumpulan data menjadi lebih terbuka dan mendalam. Selain itu, teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap jaringan sosial dan pola hubungan antar informan dalam konteks isu yang diteliti. Dengan demikian, snowball sampling tidak hanya membantu memperluas jangkauan data, tetapi juga memperkaya kedalaman informasi kualitatif yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, informan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu informan utama dan informan tambahan. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh tidak hanya relevan tetapi juga komprehensif. Penjelasan mengenai kedua kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Informan Utama

Informan utama dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam mengelola remitansi yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Kelima informan ini berasal dari latar belakang negara tujuan yang berbeda—mulai dari Arab Saudi, Hong Kong, hingga Taiwan—sehingga memberikan keragaman perspektif terkait pola kerja, besaran penghasilan, dan strategi keuangan yang mereka terapkan. Pemilihan mereka didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami bagaimana purna pekerja migran mampu bertahan (survive) secara ekonomi setelah kembali ke daerah asal, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan sisa tabungan, membangun usaha, atau menyesuaikan diri dengan realitas pekerjaan lokal. Dengan menggali pengalaman mereka, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan remitansi pasca migrasi, serta strategi adaptasi yang dijalankan dalam konteks sosial dan ekonomi setempat.

b. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu yang tidak terlibat langsung tetapi memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat memperkaya data. Dalam penelitian ini, informan tambahan mencakup tetangga lain di Desa Lohbener, yang menyaksikan atau memiliki wawasan tentang dinamika keluarga penerima remitan. Mereka memberikan pandangan tentang bagaimana remitan memengaruhi kehidupan sosial dan relasi kekuasaan dalam keluarga penerima.

Penggunaan metode purposive sampling ini memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian, yakni menganalisis pola kontrol uang remitan di Desa Lohbener. Kombinasi antara informan utama dan tambahan memberikan gambaran yang holistik tentang fenomena yang dikaji.

1.6.4 Pengumpulan Data

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, diperlukan data primer yang dikumpulkan dengan dua metode sebagai berikut:

a. Observasi

Adler & Adler (1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi.

b. Indepth Interview

Patton (2002: 341) menjelaskan wawancara mendalam menyajikan informasi yang terperinci mengenai pemikiran, perilaku, dan pengalaman individu, yang penting untuk memahami fenomena yang kompleks. Saya menerapkan metode wawancara mendalam (indepth interview) dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah secara lebih terperinci dan jelas. Saya menggunakan aplikasi voice recorder dari gadget untuk membantu saya saat melakukan wawancara dengan informan. Selain itu, saya juga mencatat hal-hal penting yang diucapkan oleh informan pada saat melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Sudaryono (2018:219) dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film dokumenter, data penelitian yang relevan. Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta observasi lapangan. Melalui foto-foto rumah, benda-benda hasil dari remitan, maupun dokumen pribadi seperti buku tabungan, bukti kiriman uang, dan catatan pengeluaran keluarga, peneliti dapat menangkap dimensi konkret dari praktik ekonomi para purna pekerja migran. Dokumentasi tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana uang hasil kerja di luar negeri dikelola, tetapi juga memvisualisasikan nilai simbolik yang melekat pada remitan—seperti rumah yang dibangun sebagai bukti keberhasilan, perabot baru yang menandai peningkatan status, atau catatan kiriman uang yang menggambarkan hubungan tanggung jawab antara pekerja migran dan keluarganya. Dengan demikian, dokumentasi menjadi bagian penting dalam memahami makna material dan moral dari remitan di kehidupan pasca migrasi, sekaligus memperkuat pembacaan etnografis terhadap dinamika ekonomi rumah tangga purna pekerja migran di Indramayu.

1.6.5 Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan dirasa cukup dan mencapai titik kejenuhan, saya melakukan proses reduksi data. Reduksi data adalah upaya untuk memilah dan memfokuskan data agar apa yang dituangkan dalam penelitian ini relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini dimulai dengan memilah data dari catatan lapangan (field notes) yang saya kumpulkan selama penelitian di Desa Lohbener. Penelitian kualitatif diperlukan pencatatan yang cermat tentang apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, termasuk melalui catatan lapangan, transkrip wawancara, dan bukti-bukti lainnya. Selama proses reduksi, saya mengidentifikasi informasi penting yang berkaitan dengan kontrol keluarga atas uang remitan yang dikirim oleh TKW, baik dari perspektif pengirim (TKW) maupun penerima (keluarga).

Saya secara teratur menguraikan dan mengelompokkan informasi ini, dengan menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Contohnya, dari wawancara dengan salah satu informan sebagai mantan TKW dan tetangga yang merupakan TKW aktif, saya memusatkan perhatian pada pola pengelolaan uang remitan, relasi kekuasaan dalam keluarga, dan tantangan yang dihadapi TKW dalam proses pengiriman remitan. Data lain, seperti cerita umum mengenai kehidupan sehari-hari di desa yang tidak relevan dengan penelitian, dikeluarkan dari fokus analisis. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas struktur data dan mempermudah proses analisis pada tahap selanjutnya, sehingga hasil penelitian dapat lebih fokus, terarah, dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Selain itu, saya juga menerapkan proses display data yang bertujuan untuk merujuk pada proses menampilkan atau mempresentasikan informasi atau data dalam bentuk yang mudah dipahami atau dianalisis, hal ini sering kali dilakukan dalam berbagai format visual untuk memudahkan pemahaman, seperti grafik, tabel, atau diagram. Data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam diolah untuk menunjukkan bagaimana purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengelola remitan setelah kepulangan, serta kaitannya dengan perubahan strategi bertahan hidup dan posisi sosial mereka di desa. Penelitian ini juga mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa responden yang terdiri dari purna pekerja migran. Analisis terhadap wawancara ini mengidentifikasi beberapa tema utama terkait permasalahan ekonomi yang dihadapi purna pekerja migran, yaitu kesulitan

mempertahankan hasil remitan, keterbatasan dalam menciptakan sumber pendapatan baru, serta ketidakpastian ekonomi setelah tidak lagi bekerja di luar negeri.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, saya membaginya menjadi beberapa BAB di bawah ini:

BAB I akan berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika sayaan.

BAB II kemudian akan memuat gambaran umum penduduk dan kondisi geografi Kabupaten Indramayu dan desa yang saya teliti yaitu Desa Lohbener. Selain itu dalam bab ini akan dikemukakan bagaimana awal mula perkembangan migrasi dari masa ke masa yang kemudian membahas mengenai faktor-faktor pendukung migrasi.

BAB III memuat bagaimana latar belakang keberangkatan informan ke negara tujuan menjadi seorang pekerja migran, bagaimana perbedaan kehidupan ketika masih bekerja sebagai pekerja migran dan ketika pulang ke rumah sebagai purna pekerja migran, bagaimana permasalahan yang mereka hadapi setelah menjadi purna pekerja migran dan cara mereka untuk mengelola remitan setelah mereka menjadi purna pekerja migran.

BAB IV akan memuat bagaimana pengelolaan remitan dapat berpengaruh terhadap permasalahan ekonomi purna pekerja migran dan bagaimana remitan dapat memerankan peran sosial bagi purna pekerja migran.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi saya berdasarkan isi dan hasil dari penelitian.

BAB II

Gambaran Umum Kabupaten Indramayu

2.1 Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa, dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107052'-108036' Bujur Timur dan 6015'-6040' Lintang Selatan. Indramayu berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon di selatan, Kabupaten Subang di barat, serta Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa di timur. Secara topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Indramayu merupakan dataran rendah atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2 %. Keadaan ini tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan air. Bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air.

Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa, yang melalui 11 kecamatan dengan 36 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai sepanjang 147 Km. Indramayu memiliki luas wilayah mencapai 2.078,03 km^2 yang terdiri dari 31 kecamatan dan 317 desa/kelurahan, menjadikannya salah satu kabupaten dengan cakupan wilayah yang cukup luas di Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat Indramayu mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani. rata-rata lama pendidikan Kabupaten Indramayu hanya mencapai 6,94 tahun yang berarti jenjang pendidikan hanya mencapai tingkat Sekolah. Menurut data BPS Jawa Barat tahun 2023, Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten termiskin nomor satu di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 1,9 juta jiwa—serta rata-rata lama sekolah hanya 6,94 tahun menunjukkan adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan peluang ekonomi yang layak.

Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya rata-rata lama sekolah menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan formal. Kondisi ini memperkuat dorongan struktural bagi masyarakat Indramayu untuk bermigrasi ke luar negeri, karena peluang kerja lokal tidak mampu menjawab kebutuhan ekonomi rumah tangga. Artinya, migrasi bukan sekadar pilihan individu, tetapi strategi bertahan hidup yang lahir dari kemiskinan struktural. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada terbatasnya keterampilan kerja, sehingga sebagian besar penduduk hanya dapat mengakses pekerjaan di sektor informal dengan pendapatan rendah. Dalam konteks Indramayu, migrasi bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi juga menjadi mekanisme adaptif terhadap kemiskinan struktural yang dialami sebagian besar rumah tangga.

Kondisi geografis dan sosial-ekonomi tersebut berimplikasi langsung terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indramayu. Keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan, serta tingginya angka kemiskinan mendorong sebagian masyarakat usia produktif mencari peluang ekonomi di luar daerah, termasuk menjadi pekerja migran internasional. Pola ini semakin mengakar di wilayah-wilayah pesisir yang memiliki tradisi merantau dan jaringan sosial migran yang kuat, sehingga migrasi menjadi strategi rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Dalam konteks inilah, remitansi yang dihasilkan purna pekerja migran memegang peranan penting, baik sebagai sumber penghidupan maupun modal ekonomi di tingkat lokal.

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Lohbener

Peta Kecamatan Lohbener

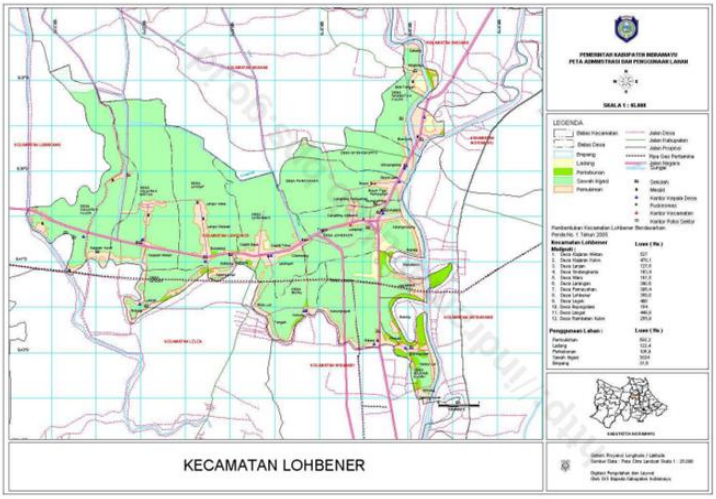

(Sumber : Badan Pusat Statistik Indramayu)

Desa Lohbener terletak di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 36,67 km² yang terdiri dari lima dukuh dan berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Indramayu. Penduduk Desa Lohbener menurut data yang diambil dari hasil wawancara dengan Kuwu Desa Lohbener berjumlah 7.041 jiwa per tahun 2023 dengan penduduk laki-laki berjumlah 3.528 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 3.513 jiwa. Jumlah KK di Desa Lohbener berjumlah sebanyak 2.041 KK. Masyarakat Desa Lohbener sebanyak 40% berprofesi sebagai petani, 40% berprofesi sebagai peternak, dan 20% berprofesi di bidang jasa (termasuk PMI).

Dominasi sektor pertanian dan peternakan yang sifatnya subsisten membuat pendapatan masyarakat Desa Lohbener cenderung rendah dan tidak stabil. Situasi ini mendorong sebagian warga untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai PMI, karena sektor jasa lokal tidak cukup menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, struktur mata pencaharian desa berperan langsung dalam menciptakan pola migrasi internasional yang masif.

Menurut data dari website Databoks menyatakan bahwa kabupaten Indramayu merupakan kabupaten/kota dengan penghasil pekerja migran paling besar nomor satu sebanyak 19.178 jiwa. Di Kabupaten Indramayu, banyak masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kemiskinan dan tingginya angka pengangguran. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan

pendapatan yang memadai di daerah asal mereka. Ketika sumber daya di Indramayu terbatas dan tidak cukup untuk menjamin kehidupan yang layak, banyak orang yang merasa terpaksa mencari peluang di tempat lain, termasuk ke luar negeri (Bharata, 2024).

Desa Lohbener Kabupaten Indramayu dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini menunjukkan pola migrasi luar negeri yang nyata dalam kehidupan sehari-hari warganya. Meskipun belum terdapat data statistik mengenai jumlah pasti pekerja migran asal desa ini, hasil observasi lapangan dan wawancara awal dengan warga serta perangkat desa mengindikasikan bahwa terdapat pola migrasi dimana masyarakat Desa Lohbener bekerja ke luar negeri—khususnya sebagai pekerja di sektor domestik (rumah tangga) di berbagai negara seperti Asia Timur dan Timur Tengah.

Berdasarkan keterangan para informan, tren migrasi internasional dari Desa Lohbener mulai marak pada dekade 1990-an dengan negara tujuan utama Arab Saudi. Pada masa itu, penempatan tenaga kerja didominasi sektor domestik, terutama pekerjaan rumah tangga, dengan kontrak kerja rata-rata 1–2 tahun. Sebagian pekerja memilih memperpanjang kontrak di negara yang sama, sementara lainnya memutuskan berpindah negara tujuan, umumnya ke Hong Kong atau Taiwan, seiring meningkatnya permintaan tenaga kerja domestik di kedua negara tersebut.

Pola migrasi yang terjadi bersifat permanen dalam jangka kontrak, namun memiliki sifat sirkuler secara umum, karena sebagian besar pekerja akan kembali ke daerah asal setelah kontrak berakhir, lalu memutuskan untuk berangkat kembali ke luar negeri. Siklus keberangkatan ini tidak hanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh terbentuknya jaringan sosial migran yang mempermudah akses informasi dan peluang kerja di negara tujuan.

Keberangkatan Calon Pekerja Migran (CPMI) telah menjadi praktik sosial yang umum dan bahkan diwariskan antargenerasi. Migrasi tidak hanya dipahami sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan ekonomi, tetapi juga migrasi telah membentuk gaya hidup baru dan cara pekerja migran memaknai pencapaian, identitas, dan status sosial. Dalam konteks ini, penelitian berupaya memahami bagaimana remitansi yang diperoleh dari pengalaman migrasi dikelola oleh purna pekerja migran setelah kembali ke daerah asal. Fokusnya adalah pada praktik, strategi, dan pertimbangan yang memengaruhi

pengelolaan remitansi, baik untuk kebutuhan konsumsi, investasi, maupun tabungan. Studi ini secara khusus menelusuri pengalaman purna pekerja migran di Desa Lohbener, yang memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam migrasi internasional, guna melihat bagaimana keputusan-keputusan finansial pasca migrasi terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta budaya setempat.

2.2 Profil Informan

1.1 Tabel Data Profil Informan

No	Nama Informan	Usia	Status	Lama Bekerja	Negara Tujuan
1.	Bu Linda	51 Tahun	Purna PMI	± 12 Tahun	Arab, Taiwan & Hongkong
2.	Bu Laeliyah	50 Tahun	Purna PMI	8 Tahun	Taiwan
3.	Bu Uus	61 Tahun	Purna PMI	18 Bulan	Arab
4.	Bu Neni	64 Tahun	Purna PMI	1 Tahun	Arab
5.	Bu Diah	63 Tahun	Purna PMI	2 Tahun	Arab
6.	Bu Betty	56 Tahun	Purna PMI	3 Tahun	Arab

(Sumber : Data wawancara lapangan, 2025. Diolah peneliti)

Informan penelitian ini terdiri dari enam orang purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan dengan rentang usia antara 50 hingga 64 tahun. Mereka berasal dari Desa Lohbener, Kabupaten Indramayu, dan pernah bekerja di negara tujuan yang berbeda-beda, mulai dari Arab Saudi, Taiwan, hingga Hongkong. Lama bekerja mereka pun bervariasi, dari yang paling singkat satu tahun hingga yang paling lama mencapai dua belas tahun. Variasi usia, negara tujuan, dan durasi kerja ini memperlihatkan adanya keragaman pengalaman migrasi yang menjadi bekal penting dalam memahami praktik pengelolaan remitan pasca kepulangan.

Bu Linda (51 tahun) tercatat sebagai informan dengan pengalaman migrasi paling panjang, yakni sekitar dua belas tahun di tiga negara berbeda: Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong. Sementara itu, Bu Laeliyah (50 tahun) bekerja selama delapan tahun di

Taiwan, sedangkan Bu Uus (61 tahun) hanya bekerja selama delapan belas bulan di Arab Saudi. Perbedaan lama bekerja ini penting dicatat karena turut memengaruhi besaran remitan yang mereka bawa pulang serta strategi mereka dalam mengelola uang tersebut setelah kembali ke desa.

Selain itu, terdapat informan dengan pengalaman migrasi yang relatif singkat, seperti Bu Neni (64 tahun) yang hanya bekerja selama satu tahun di Arab Saudi, dan Bu Diah (63 tahun) yang dua tahun bekerja di negara tujuan yang sama. Sementara itu, Bu Betty (56 tahun) menghabiskan tiga tahun masa kerjanya di Arab Saudi. Meskipun tidak selama Bu Linda atau Bu Laeliyah, pengalaman mereka tetap memberikan gambaran mengenai bagaimana purna PMI dengan durasi kerja yang berbeda merasakan tantangan ekonomi dan sosial setelah kembali ke kampung halaman.

Secara umum, variasi dalam lama kerja dan negara tujuan menciptakan spektrum pengalaman yang kaya: ada yang pulang dengan membawa aset, ada yang pulang dengan keterbatasan finansial, dan ada pula yang menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hasil jerih payah mereka. Penyajian profil informan dalam penelitian ini penting untuk memberikan gambaran siapa saja subjek yang menjadi sumber utama data. Seperti telah dijelaskan dalam Bab I, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana purna pekerja migran di Desa Lohbener, Kabupaten Indramayu mengelola remitan setelah kepulangan, serta strategi apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup di desa asal. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti perlu menghadirkan konteks mengenai latar belakang informan mulai dari usia, status, lama bekerja, hingga negara tujuan karena faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pengalaman migrasi dan pola pengelolaan remitan yang mereka jalani.

Profil informan juga berfungsi sebagai dasar untuk membaca variasi data pada Bab III. Dengan mengetahui keragaman pengalaman dan karakteristik masing-masing informan, pembaca dapat memahami perbedaan praktik ekonomi pasca migrasi, serta bagaimana strategi yang ditempuh tiap purna pekerja migran dipengaruhi oleh kondisi personal dan keluarga mereka. Dengan demikian, tabel profil informan tidak hanya menyajikan data dasar, tetapi juga menjadi jembatan penting yang menghubungkan tujuan penelitian dengan temuan lapangan.

2.3 Perkembangan Sektor Pekerja Migran Internasional

Sejarah migrasi internasional dapat ditelusuri dari masa pra-sejarah, di mana manusia berpindah tempat untuk bertahan hidup, hingga pada masa modern yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan globalisasi. Pada masa pra-industri, migrasi umumnya dipengaruhi oleh faktor alam dan keterbatasan sumber daya. Memasuki masa kolonialisme, migrasi banyak terjadi karena penjelajahan dan perdagangan antar benua, termasuk perdagangan budak. Revolusi industri membawa perubahan signifikan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan kemudahan mobilitas, diikuti migrasi besar-besaran akibat perang dunia dan proses dekolonisasi. Pada era globalisasi, migrasi menjadi semakin kompleks dengan beragam motif dan arah perpindahan (Sukamdi, 2020: 2).

Sejarah migrasi internasional dapat dilihat melalui perkembangan yang berlangsung dari masa prasejarah hingga era globalisasi modern. Pada periode awal, migrasi lintas batas negara belum terbentuk dalam arti formal karena konsep negara-bangsa sendiri belum ada. Perpindahan manusia lebih dipicu oleh faktor kebutuhan hidup seperti mencari sumber makanan, berburu, bertani, serta menghindari bencana alam atau konflik antarkelompok. Memasuki era perdagangan kuno dan penjelajahan maritim, migrasi mulai mengambil bentuk arus yang terorganisasi, di mana pedagang, pelaut, dan penjelajah membawa serta komunitas mereka ke wilayah baru, memicu pertukaran budaya, bahasa, dan teknologi.

Secara geografis, mobilitas penduduk dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas sirkuler (circular atau non-permanen). Mobilitas permanen terjadi ketika seseorang berpindah ke wilayah tujuan dengan menetap minimal enam bulan. Sementara itu, mobilitas sirkuler berlangsung dalam jangka waktu kurang dari enam bulan, dan terbagi lagi menjadi dua tipe, yakni commuting dan menginap. *Commuting* merujuk pada perpindahan penduduk ke wilayah tujuan dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama, dengan durasi berada di lokasi tujuan minimal enam jam. Adapun menginap—dalam istilah Jawa disebut mondhok—menggambarkan perpindahan ke wilayah tujuan selama lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan (Mantra, 1999 dalam Suyanto & Efriani, 2023: 6).

Salah satu tantangan utama dalam studi migrasi kembali adalah ketiadaan definisi yang disepakati secara internasional. Migran dapat pulang secara permanen, pulang sementara, pulang setelah pensiun, atau kembali ke negara asal sebelum proyek migrasinya selesai. Variasi pola ini menciptakan kesulitan dalam mengukur jumlah returnees dan mengidentifikasi kebutuhan reintegrasi mereka. Selain itu, teori migrasi klasik cenderung mengabaikan kepulangan atau menafsirkannya sebagai "kegagalan" atau "keberhasilan" migrasi, padahal keputusan kembali sangat dipengaruhi faktor personal seperti kondisi keluarga, adaptasi anak, atau tekanan emosional. Di sisi lain, faktor struktural seperti kondisi ekonomi negara asal dan negara tujuan tetap memainkan peran dalam memengaruhi pilihan migran.

Menurut *Return Migration: A Conceptual and Policy Framework* (hal. 4), terdapat empat tipe kepulangan migran, yaitu *return of achievement*, *return of completion*, *return of setback*, dan *return of crisis*, yang masing-masing menunjukkan kondisi, motivasi, dan kebutuhan reintegrasi yang berbeda. Artikel ini menekankan bahwa kepulangan migran terbagi ke dalam beberapa tipe yang memiliki kebutuhan intervensi berbeda: *return of achievement* (pulang setelah mencapai tujuan), *return of completion* (pulang setelah kontrak selesai meski ingin lanjut tinggal), *return of setback* (pulang sebelum proyek migrasi selesai karena alasan negatif), dan *return of crisis* (pulang secara terpaksa karena konflik, deportasi, atau bencana). Kategori ini menunjukkan bahwa return migration bukan proses homogen, sehingga kebijakan yang menyamaratakan kebutuhan migran seringkali gagal. Migran dengan "return of achievement" cenderung membutuhkan dukungan pengembangan usaha, sementara mereka yang mengalami "setback" atau "crisis" memerlukan bantuan darurat, perlindungan hukum, dan dukungan psikologis.

Reintegrasi pasca-kepulangan menjadi fase krusial yang menentukan apakah migran dapat menetap atau kembali terjebak dalam siklus *re-migration*. Banyak returnees bermimpi beralih ke sektor ekonomi yang berbeda dari masa sebelum migrasi, namun kemampuan ini sangat dipengaruhi kondisi struktural di negara asal. Ekonomi yang stagnan, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya kemampuan memanfaatkan keterampilan yang diperoleh di luar negeri, serta kesenjangan ekspektasi sosial, di mana komunitas asal tidak sesuai dengan nostalgia migran seringkali mempersulit reintegrasi.

Kondisi ini dapat memicu tekanan finansial, ketidaknyamanan sosial, dan akhirnya mendorong migran kembali pergi.

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai fenomena *return migration* menunjukkan bahwa kepulangan migran bukanlah proses sederhana ataupun seragam. Migran kembali membawa latar pengalaman, modal, dan motif yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan oleh ragam tipe kepulangan mulai dari *return of achievement* hingga *return of crisis* (hal. 4).

Kompleksitas ini menegaskan bahwa return migration tidak dapat dipahami sebagai fase akhir dari mobilitas, melainkan sebagai rangkaian proses yang terus terhubung dengan kondisi struktural negara asal dan tujuan. Keberhasilan maupun kegagalan reintegrasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, kapasitas sosial ekonomi lokal, dan sejauh mana kebijakan mampu mengakomodasi keragaman pengalaman migran.

Perkembangan migran kembali dalam konteks global menunjukkan perubahan yang semakin kompleks dan berlapis. OECD melihat bahwa kepulangan migran tidak lagi dapat dipahami sebagai fase akhir dari siklus migrasi, tetapi sebagai proses yang sangat dipengaruhi faktor usia, peluang ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja di negara asal maupun tujuan, serta kebijakan migrasi yang makin ketat. Dalam beberapa dekade terakhir, pola kepulangan semakin beragam—ada yang kembali secara sukarela karena perubahan kondisi keluarga atau usia yang menua, ada pula yang pulang akibat tekanan struktural seperti pengetatan izin kerja, meningkatnya biaya hidup, hingga kebijakan deportasi. OECD menekankan bahwa return migrants kini menjadi kelompok penting dalam dinamika pembangunan karena mereka membawa modal finansial, keterampilan, serta pengalaman kerja lintas negara yang berpotensi mendorong mobilitas sosial di negara asal. Namun, keberhasilan reintegrasi mereka sangat bervariasi: sebagian mampu menggunakan tabungan dan keterampilan untuk membuka usaha, sementara sebagian lainnya menghadapi kesulitan akibat minimnya dukungan kebijakan, mismatch keterampilan, dan lemahnya pasar kerja lokal.

OECD mencatat bahwa return migrants kini membawa berbagai bentuk modal—finansial, keterampilan teknis, pengalaman kerja lintas negara, hingga jaringan

profesional. Aset-aset ini menjadikan mereka aktor potensial dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun, keterbatasan infrastruktur, akses modal, dan kecocokan keterampilan dengan pasar kerja negara asal sering menghambat pemanfaatan aset tersebut. Karena itu, keberhasilan pemanfaatan modal migran sangat bergantung pada dukungan institusional dan kebijakan lokal.

2.4 Fase Pasca Kepulangan dan Transformasi Purna Migran

Dalam studi migrasi, kepulangan pekerja migran dipahami sebagai fase penting yang menandai berakhirnya periode bekerja di luar negeri dan dimulainya proses penyesuaian ulang di tempat asal. Migran kembali (return migrants) tidak hanya mengalami perpindahan lokasi, tetapi juga menghadapi perubahan peran, kondisi ekonomi, serta struktur sosial keluarga. Kepulangan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, kondisi kesehatan, selesainya kontrak kerja, kebutuhan keluarga di rumah, maupun tujuan ekonomi yang telah dianggap tercapai.

Namun, kepulangan tidak selalu berlangsung mulus. Banyak penelitian menunjukkan bahwa fase pasca migrasi merupakan periode yang penuh ketidakpastian bagi para purna migran. Perubahan pendapatan dari yang semula tetap menjadi tidak menentu membuat sebagian dari mereka harus menyesuaikan ulang pola konsumsi, kebiasaan finansial, dan strategi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, hubungan keluarga yang telah lama berjarak akibat pemisahan fisik sering kali membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua, pasangan yang telah terbiasa hidup mandiri, serta anggota keluarga lain yang menggantikan peran selama migran berada di luar negeri, semuanya membentuk dinamika baru yang harus dinegosiasikan ulang ketika kepulangan terjadi.

Dalam konteks sosial, migran kembali juga menghadapi ekspektasi tertentu dari lingkungan sekitar. Di beberapa komunitas pengirim tenaga kerja, keberhasilan migrasi sering diukur dari sejauh mana migran dapat membawa perubahan material seperti renovasi rumah, tabungan, atau aset lainnya. Ekspektasi ini dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi purna migran, terutama bila hasil yang mereka bawa pulang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pada saat yang sama, mereka harus menyesuaikan diri

kembali dengan ritme desa yang berbeda dengan kehidupan terstruktur selama bekerja di luar negeri.

Dalam konteks migrasi Indonesia, kepulangan pekerja migran merupakan fase penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman migrasi itu sendiri. Yuniarto (2017) menjelaskan bahwa migrasi bukan hanya proses keluar, tetapi juga proses kembali yang melibatkan penyesuaian ulang terhadap lingkungan sosial dan ekonomi di daerah asal. Kepulangan sering kali disertai perubahan status, peran, serta kondisi hidup, sehingga migran kembali harus menegosiasikan ulang posisi mereka dalam keluarga maupun komunitas.

Menurut Yuniarto, keputusan untuk pulang biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti selesainya kontrak kerja, kebutuhan keluarga di rumah, penurunan kondisi fisik, serta perasaan bahwa tujuan ekonomi yang direncanakan sejak awal telah tercapai. Namun, proses kembali ke desa tidak selalu mudah. Migran sering menghadapi tantangan berupa pendapatan yang tidak lagi stabil, perubahan dinamika keluarga setelah bertahun-tahun berpisah, serta penyesuaian terhadap rutinitas harian yang sangat berbeda dengan kehidupan kerja di luar negeri.

Dalam studi migrasi, kepulangan pekerja migran dipahami sebagai fase penting yang menandai berakhirnya periode bekerja di luar negeri dan dimulainya proses penyesuaian ulang di tempat asal. Migran kembali (return migrants) tidak hanya mengalami perpindahan lokasi, tetapi juga menghadapi perubahan peran, kondisi ekonomi, serta struktur sosial keluarga. Kepulangan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, penurunan kondisi kesehatan, selesainya kontrak, kebutuhan keluarga di rumah, atau karena tujuan ekonomi yang mereka tetapkan sejak awal telah dianggap tercapai.

Yuniarto, 2017: 95 menekankan bahwa kepulangan selalu membawa perubahan yang tidak bisa dihindari. Ia menjelaskan bahwa “migran yang kembali harus memasuki ulang ruang sosial yang sudah bergerak tanpa dirinya”, sehingga relasi-relasi dalam keluarga tidak otomatis kembali seperti sebelum mereka pergi. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga sudah membangun rutinitas baru selama bertahun-tahun tanpa

kehadiran migran, sehingga ketika migran pulang, ia perlu menyesuaikan diri dengan tatanan domestik yang telah berubah.

Selain itu, Yuniarto mencatat bahwa perubahan paling terasa terjadi pada aspek ekonomi. Ketika bekerja di luar negeri, pendapatan migran cenderung stabil—mengandalkan gaji bulanan yang pasti. Namun, setelah kembali ke desa, mereka memasuki situasi ekonomi yang berbeda. Ia menulis bahwa "kepulangan menempatkan migran pada ketidakpastian pendapatan yang memaksa mereka menata ulang strategi hidup sehari-hari." Perubahan ini membuat banyak purna migran harus belajar mengelola uang dengan cara yang lebih ketat dibanding ketika berada di luar negeri.

Perubahan lain terjadi pada pola kerja dan ritme hidup. Yuniarto menggambarkan bahwa setelah bertahun-tahun bekerja dalam lingkungan yang terstruktur dan memiliki jadwal jelas, purna migran sering merasa "kosong" atau kehilangan pegangan ketika kembali ke rumah. Rutinitas domestik yang tidak teratur, tidak adanya jam kerja tetap, serta ketiadaan pendapatan bulanan membuat mereka harus membangun pola baru dalam menjalani hari. Situasi ini memperlihatkan bahwa kepulangan bukan akhir dari perjalanan migrasi, tetapi babak baru yang membutuhkan adaptasi sosial maupun emosional.

Yuniarto juga menemukan bahwa kepulangan sering membawa beban psikologis tertentu. Migran yang kembali tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan keluarga, tetapi juga dengan pandangan masyarakat. Di beberapa komunitas, keberhasilan migrasi diukur melalui aset material. Karena itu, purna migran yang tidak membawa perubahan signifikan kadang merasa canggung atau enggan tampil di ruang publik desa. Ia menulis bahwa "kepulangan menciptakan ruang evaluasi sosial terhadap hasil migrasi," yang dapat menimbulkan tekanan tersendiri.

Temuan Rahardjo (2013) juga menunjukkan bahwa perubahan pasca kepulangan adalah pengalaman umum di kalangan pekerja migran Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kehidupan selama bekerja di luar negeri membentuk pola pikir, kebiasaan, dan orientasi baru yang tidak selalu selaras dengan kondisi di tempat asal. Dalam laporannya, Rahardjo menyatakan bahwa "pengalaman mereka di luar negeri sedikit banyak telah merubah kepribadian, selera individu, hubungan personal, berbagai dukungan keluarga, dan perubahan di dalam masyarakat yang terjadi ketika mereka berada di luar negeri".

Perubahan ini tampak dalam berbagai hal, mulai dari cara mereka mengatur rumah tangga, standar kebersihan, pola konsumsi, hingga cara berinteraksi dengan anggota keluarga.

Selain aspek personal, purna migran juga mengalami perubahan dalam hubungan sosial di lingkungan sekitar. Rahardjo mencatat bahwa sebagian purna migran dianggap berbeda atau "asing" ketika kembali, karena membawa kebiasaan baru dari negara tempat mereka bekerja. Misalnya, ada informan yang mencoba menerapkan kebiasaan hidup bersih di rumah, tetapi justru dipersepsikan berbeda oleh tetangganya. Ia menulis bahwa "ia mencoba menerapkan pentingnya kebersihan di rumah dan lingkungan kepada anak-anak dan keluarganya" namun perubahan tersebut tidak selalu mudah diterima oleh lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa proses kepulangan tidak hanya menuntut adaptasi dari pihak migran, tetapi juga dari keluarga maupun komunitas yang ditinggalkan.

Rahardjo juga menemukan bahwa perubahan ekonomi menjadi dimensi penting dalam masa kepulangan. Banyak purna migran yang pulang dengan membawa aset seperti rumah, tanah, atau tabungan, namun tidak sedikit pula yang justru menghadapi tekanan ekonomi karena tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Pergeseran dari pendapatan bulanan yang stabil menuju situasi ekonomi yang tidak pasti membuat mereka harus menyusun ulang strategi bertahan hidup. Karena itu, kepulangan menjadi periode di mana migran mencoba menyeimbangkan kembali harapan, kemampuan finansial, dan realitas sosial desa yang mereka masuki setelah bertahun-tahun ditinggalkan.

Dengan demikian, literatur Rahardjo memperkuat hipotesis bahwa masa pasca kepulangan selalu melibatkan perubahan yang kompleks—baik di tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. Hal ini sejalan dengan pengalaman para informan dalam penelitian ini yang juga menghadapi dinamika serupa ketika kembali ke Indramayu.

Secara keseluruhan, sintesis antara Yuniarto dan Rahardjo menunjukkan bahwa kepulangan pekerja migran merupakan fase transisi yang kompleks dan penuh perubahan, bukan sekadar momen kembalinya seseorang ke desa asal. Kedua penulis sama-sama menegaskan bahwa purna migran harus menata ulang kehidupan yang sudah bergerak

tanpa mereka, sekaligus membawa kembali pengalaman dan kebiasaan baru yang dibentuk selama bekerja di luar negeri. Perubahan ini muncul dalam banyak bentuk—mulai dari dinamika ekonomi yang tidak lagi stabil, penataan kembali peran dalam keluarga, hingga pergeseran identitas dan kebiasaan domestik yang kadang menimbulkan gesekan sosial. Dengan demikian, literatur tersebut memperjelas bahwa kepulangan tidak bersifat otomatis dan harmonis; ia adalah proses negosiasi berkelanjutan antara pengalaman masa migrasi dan realitas desa yang mereka masuki kembali. Kerangka teoretis ini memperkuat dasar penelitian bahwa purna migran mengalami transformasi yang nyata setelah kembali, serta memberikan pijakan penting bagi analisis empiris dalam skripsi ini tentang bagaimana perubahan tersebut termanifestasi dalam kehidupan informan di Indramayu.

2.5 Perkembangan Sektor Pekerja Migran Indonesia Dari Masa ke Masa

Saya lahir dan besar di sebuah kabupaten yang terkenal dengan sebutan "Kota Mangga". Kabupaten itu bernama Kabupaten Indramayu, yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Awal saya mendengar istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW), saya masih di usia anak-anak dan hanya sebatas mengetahui bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah perempuan-perempuan yang akan berangkat dan bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara Asia seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, dll. Dari tahun ke tahun, saya seringkali melihat fenomena keberangkatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Lohbener. Seiring berjalannya waktu, laki-laki juga mulai banyak yang berangkat ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Negara-negara yang dituju para pekerja migran baik laki-laki atau perempuan juga semakin beragam, dengan posisi pekerjaan yang semakin beragam pula.

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) baru diperkenalkan secara formal melalui UU No. 18 Tahun 2017. Setelah melakukan wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu pada tanggal 9 April 2025 dan membaca undang-undang tersebut, saya mulai merefleksikan bahwa istilah ini tampaknya memiliki efek generalisasi terhadap kelas pekerja migran, dan dalam pengamatan saya, terasa lebih menyatu secara identitas ketimbang istilah sebelumnya seperti 'TKW' atau 'TKI' yang lebih mengkotak-kotakkan secara gender maupun kategori kerja. Pemilihan diksi 'Pekerja Migran Indonesia' atau biasa disebut PMI lebih general secara penyebutan profesi, walaupun

dalam keberjalanannya tentu tugas yang dijalani berbeda-beda dari mulai menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) sampai menjadi buruh pabrik di luar daerah asal seperti di luar kota ataupun di luar negeri.

> "... Istilah Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu semenjak ada UU No. 18 Tahun 2017 itu sudah nggak berlaku, Mbak. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 1 ayat 1 dan 2 dijelaskan penyebutan profesi nya sudah berubah menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)." (Wawancara dengan Disnaker Indramayu pada 9 April 2025).

Sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pekerja asal nusantara telah dikirimkan ke berbagai wilayah kolonial seperti Suriname, Kaledonia Baru, dan Belanda. Mereka bekerja sebagai kuli kontrak dalam sistem migrasi paksa yang berlangsung antara tahun 1875 hingga 1940. Perpindahan tenaga kerja Indonesia antar pulau dan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari masa orde lama dan orde baru bahkan sejak masa penjajahan di tahun 1887. Pada tahun tersebut, tenaga kerja dikirim ke beberapa daerah jajahan seperti Suriname, Kaledonia, dan Belanda (Irewati, 2003: 34). Menurut sensus tahun 1930, jumlah pekerja asal Indonesia di Suriname mencapai 31.000 orang, sementara di New Caledonia sekitar 6.000 orang (Nasution, 1999: 39). Pola ini sedikit berubah di wilayah seperti Malaysia dan Singapura, di mana buruh Indonesia bekerja secara sukarela (voluntary migration), dan sering kali melakukannya sebagai bagian dari tradisi "merantau."

Dalam konteks kolonial, kebutuhan tenaga kerja murah membuat migrasi buruh menjadi bagian dari strategi ekonomi pemerintah kolonial—baik di Indonesia maupun di wilayah jajahan lain yang kekurangan tenaga kerja (Nasution, 1997: 1). Pasca kemerdekaan, migrasi tenaga kerja terus berlangsung, meski dalam skala kecil dan tanpa sistem yang tertata. Pemerintah baru Indonesia mulai membentuk Kementerian Perburuhan lewat PP No. 3 Tahun 1947, menandai pengakuan negara atas pentingnya pengelolaan tenaga kerja.

Perkembangan signifikan muncul di masa Orde Baru. Krisis harga minyak dunia pada awal 1980-an mendorong pemerintah untuk mencari sumber devisa baru, salah satunya melalui ekspor tenaga kerja. Pengiriman TKI mulai dikembangkan secara sistematis sebagai kebijakan negara. Tahun 1983, Indonesia mulai mengarahkan

pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai bagian dari strategi ekonomi, dengan basis tenaga kerja murah yang menarik investasi asing (Tirtosudarmo, 2002: 4). Negara-negara tujuan utama saat itu adalah Arab Saudi dan Malaysia, terutama untuk sektor domestik dan konstruksi. Dalam perjalanannya, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi seperti PP No. 4 Tahun 1970 tentang AKAD dan AKAN, serta Kepmenakertrans No. 408/MEN/1984 yang menjadi dasar penempatan tenaga kerja ke Malaysia. Pada tahun-tahun ini juga lahirlah Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) yang membuka jalur swasta dalam bisnis migrasi buruh.

Memasuki era Reformasi, persoalan TKI tak hanya soal devisa, tapi juga perlindungan. Masa pemerintahan Gus Dur menjadi titik balik ketika isu perlindungan buruh migran mulai masuk ke dalam kebijakan luar negeri, dengan dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Kemenlu lewat Keppres No. 109 Tahun 2001. Sementara itu, pemerintahan Megawati menandai momen penting dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, yang menjadi tonggak hukum penempatan dan perlindungan TKI secara nasional. Pemerintahan SBY menjadi periode dengan jumlah regulasi terbanyak terkait buruh migran. Namun, banyak kebijakan yang lebih fokus pada aspek administratif ketimbang perlindungan hak. Meski begitu, angka pengiriman TKI terus melonjak. Tahun 2009 saja, jumlahnya mencapai lebih dari 630 ribu orang (Azmy, 2012: 58).

Menurut data BP2MI, awalnya hanya 25 TKI yang dikirim ke Arab Saudi pada tahun 1975. Namun jumlah ini meningkat drastis pada era 1980-an dan terus berlanjut hingga sekarang, menjadikan Arab Saudi dan Malaysia sebagai negara tujuan utama selama beberapa dekade terakhir (Sumber: https://bp2mi.go.id/profil-sejarah).

Dikutip dari IOM, Migrasi tenaga kerja dari Indonesia bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga cerminan dari struktur ketenagakerjaan yang rapuh dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak di dalam negeri. Laporan IOM mencatat bahwa Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di Asia, terutama ke Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura. Mayoritas migran ini bekerja di sektor informal, khususnya sebagai pekerja rumah tangga dan buruh konstruksi. Migrasi ini didorong oleh kombinasi antara faktor pendorong (kemiskinan, pengangguran, dan minimnya kesempatan kerja di daerah asal) dan faktor penarik (tingginya permintaan akan tenaga kerja murah di negara tujuan). Seperti disebutkan

IOM, "permintaan akan tenaga kerja berketerampilan rendah dari Indonesia diperkirakan tetap tinggi di banyak negara Asia dan Timur Tengah" karena perbedaan demografi dan tingkat ekonomi antarnegara.

Migrasi pekerja internasional dari Indonesia, sebagaimana dicatat oleh IOM (2010), dipicu oleh "kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan kerja yang terbatas" di dalam negeri (hlm. 7). Ini sejalan dengan teori *push and pull* dalam migrasi, yang menjelaskan bahwa seseorang terdorong untuk bermigrasi karena tekanan di negara asal dan tertarik oleh peluang di negara tujuan. Kanayo et al. (2019) menambahkan bahwa faktor pendorong bisa meliputi "korupsi, upah rendah, dan minimnya peluang kerja," sementara faktor penarik mencakup "stabilitas ekonomi, keamanan, dan sistem sosial yang lebih baik" (hlm. 222–224). Kondisi ini tercermin dalam migrasi pekerja Indonesia, khususnya perempuan dari daerah agraris seperti Indramayu, yang kerap menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan mobilitas sosial. Ketika pekerjaan domestik di negara-negara seperti Hong Kong atau Arab Saudi menawarkan pendapatan yang lebih tinggi, banyak yang memandang migrasi sebagai satu-satunya jalan keluar dari jerat kemiskinan.

Menariknya, dalam studi terbaru oleh Shintawati & Suharman (2023), tekanan migrasi juga tetap kuat meskipun ada penolakan dan resistensi domestik di negara tujuan. Mereka menulis, "kondisi negatif negara asal seperti krisis ekonomi dan minimnya lapangan kerja menjadi faktor pendorong yang kuat" bagi migran dan pengungsi untuk tetap mencari kehidupan yang lebih aman dan stabil (hlm. 162). Bahkan ketika negara-negara di Eropa Timur menutup perbatasannya, daya tarik berupa keamanan, pekerjaan, dan kesejahteraan tetap menjadi magnet utama.

Namun, sistem perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar lembaga negara dalam mengurus migrasi. UU No. 39 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum utama migrasi tenaga kerja dinilai IOM "belum sepenuhnya mencakup perlindungan yang menyeluruh terhadap pekerja migran, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air. IOM juga mencatat bahwa biaya penempatan yang tinggi, lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan, dan kurangnya akses informasi membuat banyak calon migran memilih

jalur tidak resmi. Hal ini membuka celah bagi praktik perdagangan orang dan migrasi ilegal yang merugikan posisi tawar buruh migran di negara tujuan.

Selain itu, feminisasi migrasi menjadi ciri khas penting. Mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik, yang sering kali luput dari perlindungan hukum di negara tujuan. Kondisi ini membuat buruh migran perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, IOM menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional seperti Proses Colombo dan Dialog Abu Dhabi, serta peran aktif Indonesia dalam forum global seperti GFMD, sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola migrasi dan memperkuat perlindungan buruh migran.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena migran kembali di Indonesia berkembang seiring masifnya migrasi kontraktual ke kawasan Asia Timur, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Setiap hari hampir seribu pekerja migran pulang ke Indonesia, menunjukkan bahwa return migration adalah siklus struktural dari pola migrasi kontrak 2–3 tahun yang melekat pada sistem penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (BNP2TKI 2014b dalam SMERU 2017, hlm. 2). Pola kepulangan ini memperlihatkan sifat *circular migration*, di mana kepulangan bukan akhir dari mobilitas, melainkan bagian dari siklus berulang yang dipengaruhi kondisi ekonomi keluarga, jaringan migran, serta peluang kerja di negara tujuan maupun di daerah asal. Bahkan, bagi sebagian besar pekerja migran, terutama *low-skilled workers*, kepulangan hampir selalu bersifat sementara dan membuka kemungkinan remigrasi karena faktor ekonomi dan keterbatasan peluang kerja lokal.

Meski sebagian migran kembali membawa tabungan, keterampilan baru, dan modal sosial, banyak yang mengalami hambatan signifikan ketika reintegrasi ke desa asal. Studi menunjukkan bahwa return migrants kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai keahlian, menghadapi tekanan ekonomi keluarga, serta berupaya membangun jaringan kerja baru di desa yang infrastrukturnya kurang mendukung reintegrasi ekonomi, sehingga pendapatan mereka sering kali tidak setara dengan masa bekerja di luar negeri (Yuniarto, 2018: 1-2). Selain itu, banyak migran kembali mendapati perubahan sosial di rumah, sehingga mereka mengalami kesulitan beradaptasi dengan norma lokal, menghadapi ketegangan keluarga akibat perpisahan yang panjang, serta harus

memulihkan hubungan komunitas setelah absen bertahun-tahun (SMERU, 2017: 14). Migran yang mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pulang tanpa tabungan menghadapi beban yang lebih berat, termasuk risiko tekanan psikologis dan ketidakstabilan ekonomi, yang membuat sebagian dari mereka mempertimbangkan remigrasi sebagai strategi bertahan hidup.

2.5.1 Gelombang Keberangkatan Pekerja Migran Indramayu

1.2 Tabel Data PMI/CPMI Asal Kabupaten Indramayu 2022-2024

REKAPITULASI DATA PMI/CPMI BERDASARKAN JENIS DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022-2024.				
Tahun	Dinamika Migrasi	Laki-laki	Perempuan	Total
2022	Pendaftaran CPMI	4.577	12.427	17.004
	Penempatan PMI	-	-	12.794
	Permasalahan PMI	41	147	188
2023	Pendaftaran CPMI	1.449	8.463	9.912
	Penempatan PMI	3.882	15.307	19.189
	Permasalahan PMI	71	98	169
2024	Pendaftaran CPMI	2.376	9.514	11.890
	Penempatan PMI	3.759	17.915	21.674
	Permasalahan PMI	23	93	116

(Sumber : Data Disnaker Indramayu)

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Indramayu menunjukkan dinamika migrasi tenaga kerja yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 12.794 PMI diberangkatkan, kemudian melonjak menjadi 19.189 orang pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 21.674 orang pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa migrasi luar negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat Indramayu dalam mencari penghidupan,

terutama di tengah kondisi ekonomi lokal yang belum stabil. Menariknya, peningkatan ini tidak selalu sejalan dengan angka pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Pada 2022, terdapat 17.004 pendaftar, namun justru menurun tajam menjadi 9.912 di tahun 2023, dan sedikit meningkat menjadi 11.890 di tahun 2024. Disparitas ini dapat mengindikasikan bahwa proses pendaftaran tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi keberangkatan—kemungkinan karena seleksi administratif, kendala dokumen, atau perubahan kebijakan negara tujuan.

Komposisi jenis kelamin juga mencerminkan feminisasi migrasi: perempuan secara konsisten mendominasi jumlah pendaftar dan pekerja yang diberangkatkan. Hal ini memperkuat temuan IOM (2010) bahwa migrasi dari Indonesia, terutama di sektor informal seperti pekerjaan domestik, didominasi oleh perempuan yang rentan terhadap eksploitasi tetapi tetap termotivasi oleh kebutuhan ekonomi. Sementara itu, kasus permasalahan PMI cenderung menurun: dari 188 kasus pada 2022 menjadi 169 di 2023, dan hanya 116 kasus di 2024. Penurunan ini bisa menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perlindungan atau migrasi yang lebih terkelola, namun juga bisa berarti bahwa banyak kasus yang belum terdokumentasi secara resmi.

Berdasarkan klasifikasi mobilitas penduduk, pekerja migran asal Indramayu termasuk dalam kategori mobilitas permanen karena menetap di wilayah tujuan kerja (luar negeri) selama lebih dari enam bulan, umumnya antara satu hingga tiga tahun atau lebih (Basu et al., 2022; Mantra, 1999 dalam Suyanto & Efriani, 2023: 6). Meskipun demikian, sifat migrasi ini bersifat sementara dalam siklus kehidupan, sebab setelah kontrak kerja berakhir mereka kembali ke daerah asal. Karakter mobilitas semacam ini membentuk dinamika sosial-ekonomi tersendiri, termasuk dalam hal bagaimana remitansi yang dihasilkan selama bekerja di luar negeri dikelola oleh purna pekerja migran untuk kebutuhan konsumsi, investasi, maupun keberlanjutan ekonomi keluarga.

Secara umum, gelombang migrasi ini tidak hanya menggambarkan kebutuhan ekonomi warga, tetapi juga kompleksitas sistem migrasi; dari pendaftaran, penempatan, hingga perlindungan. Indramayu, yang secara historis merupakan salah satu kantong utama migrasi pekerja, masih mempertahankan posisinya dalam lanskap buruh migran nasional, dengan pola yang semakin feminim, intensif, dan penuh tantangan struktural.

Tetapi, tidak semua pekerja migran asal Indramayu memilih untuk terus bekerja di luar negeri atau memperpanjang kontrak kerja mereka. Sebagian di antaranya memutuskan untuk kembali ke desa asal setelah kontrak selesai, sementara yang lain pulang karena pertimbangan keluarga, kondisi kesehatan, atau karena merasa tujuan ekonomi yang dikejar telah tercapai. Kepulangan ini menghadirkan situasi baru bagi para pekerja migran, karena mereka harus kembali menyesuaikan diri dengan kehidupan desa yang berbeda dengan ritme kerja dan pola hidup di negara tujuan. Bagi sebagian purna migran, kepulangan menjadi momen peralihan dari kehidupan dengan pendapatan tetap menuju kondisi ekonomi yang lebih tidak pasti.

Di Indramayu, kepulangan para pekerja migran sering kali terlihat secara kasat mata melalui perubahan kondisi fisik rumah tangga. Rumah-rumah permanen dengan bangunan yang lebih kokoh, perabot baru, atau renovasi rumah lama menjadi penanda umum kepulangan migran ke desa. Namun, perubahan tersebut tidak selalu diikuti dengan keberlanjutan penghasilan setelah mereka kembali. Banyak purna migran yang tidak lagi memiliki sumber pendapatan rutin, sehingga tabungan hasil bekerja di luar negeri menjadi tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini membuat fase kepulangan tidak hanya menjadi momen pulang secara fisik, tetapi juga periode penyesuaian ekonomi yang penuh perhitungan.

Selain perubahan ekonomi, kepulangan pekerja migran di Indramayu juga memengaruhi relasi sosial dan peran mereka di dalam keluarga. Perempuan yang sebelumnya berperan sebagai pencari nafkah utama harus kembali bernegosiasi dengan peran domestik setelah berada di rumah. Dalam beberapa kasus, kepulangan justru menimbulkan tuntutan baru dari keluarga dan lingkungan sekitar, terutama terkait ekspektasi bahwa purna migran masih mampu menopang kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kepulangan tidak selalu dipahami sebagai akhir dari tanggung jawab, melainkan sebagai fase lanjutan yang membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang berbeda dari masa kerja di luar negeri.

Pada tingkat komunitas, purna migran juga menghadapi perubahan posisi sosial. Selama bekerja di luar negeri, status sebagai pekerja migran kerap diasosiasikan dengan keberhasilan ekonomi, yang ditandai melalui remitansi dan kepemilikan aset material. Namun, setelah kepulangan, status tersebut tidak selalu bertahan. Ketika aliran remitansi berhenti, purna migran berhadapan dengan proses penilaian ulang dari

lingkungan sekitar, di mana keberhasilan masa lalu tidak lagi cukup untuk menjamin pengakuan sosial di masa kini. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepulangan pekerja migran di Indramayu bukan hanya soal kembali ke rumah, tetapi juga tentang bagaimana posisi sosial mereka dinegosiasikan ulang dalam struktur masyarakat desa.

Lebih jauh, kepulangan pekerja migran juga membuka ruang bagi kerentanan baru, terutama ketika tidak tersedia alternatif pekerjaan yang layak di daerah asal. Ketergantungan rumah tangga terhadap remitansi selama bertahun-tahun sering kali membuat proses adaptasi pasca kepulangan menjadi tidak mudah. Dalam konteks ini, kepulangan dapat dipahami sebagai fase transisi yang menuntut strategi bertahan hidup baru, baik dalam mengelola sumber daya ekonomi yang tersisa maupun dalam menyesuaikan peran sosial di dalam keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepulangan pekerja migran di Indramayu perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika migrasi yang berkelanjutan, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri.

2.6 Faktor Sosial-Budaya Terhadap Kepulangan Migran

Faktor sosial budaya memiliki peran penting dalam mendorong keputusan seseorang untuk menjadi pekerja migran. Nilai-nilai budaya yang menekankan pada kewajiban keluarga, seperti membantu ekonomi orang tua atau membiayai pendidikan saudara, seringkali menjadi motivasi utama, terutama di komunitas pedesaan. Selain itu, norma sosial yang memandang migrasi sebagai simbol keberhasilan ekonomi atau peningkatan status sosial dapat memperkuat keinginan individu untuk bekerja di luar negeri.

Keputusan kepulangan migran bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau kondisi kerja di negara tujuan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial–budaya yang membentuk peran, identitas, dan relasi mereka dalam keluarga maupun komunitas asal. Dalam konteks migrasi perempuan, proses kepulangan sering kali terkait erat dengan norma gender yang melekat, kewajiban keibuan, serta ekspektasi sosial yang mengatur posisi perempuan dalam kehidupan domestik. Berbagai kajian menunjukkan bahwa migran perempuan berada dalam tekanan sosial yang kompleks: di satu sisi mereka berperan sebagai pencari nafkah transnasional, namun di sisi lain tetap

dibebani tanggung jawab reproduktif dan tuntutan moral untuk hadir secara fisik dalam keluarga.

Analisis faktor sosial-budaya ini berasal dari observasi saya terhadap transkrip wawancara, di mana para informan secara konsisten menunjukkan bagaimana norma gender, kewajiban domestik, dan ekspektasi komunitas membentuk pola kepulangan mereka. Meskipun alasan ekonomi tetap hadir dalam narasi migrasi, dorongan untuk kembali ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh tuntutan sosial yang melekat pada posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dari berbagai pernyataan yang muncul, terlihat bahwa para informan tidak memaknai kepulangan sebagai pilihan individual semata, melainkan sebagai respons terhadap nilai dan aturan budaya yang menuntut mereka untuk menjalankan kembali peran keibuan serta tanggung jawab rumah tangga yang dianggap tidak dapat digantikan.

Selain itu, observasi terhadap pengalaman informan menunjukkan bahwa ketegangan antara identitas sebagai pekerja migran dan identitas sebagai ibu atau istri muncul secara kuat dalam proses keputusan untuk pulang. Para perempuan ini sering kali merasakan tekanan moral karena ketidakhadiran fisik mereka dinilai berdampak pada kesejahteraan keluarga, terutama anak. Norma sosial desa yang menilai perempuan berdasarkan kemampuan mereka menjaga harmoni rumah tangga semakin mempertegas dorongan tersebut. Dengan demikian, data wawancara memperlihatkan bahwa kepulangan para migran perempuan tidak sekadar dipicu oleh situasi ekonomi, tetapi merupakan manifestasi dari struktur sosial-budaya yang memprioritaskan peran domestik perempuan dan mendefinisikan kepulangan sebagai bentuk pemenuhan kembali kewajiban sosial yang melekat pada diri mereka.

2.6.1 Norma Gender dan Peran Domestik

Dalam konteks migrasi internasional, norma gender tidak hanya beroperasi sebagai seperangkat nilai budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur ruang gerak perempuan di ranah transnasional. Meskipun keberangkatan perempuan sebagai pekerja migran sering kali dipicu oleh kebutuhan ekonomi keluarga, keberadaan mereka di luar negeri tetap dinilai melalui lensa peran domestik yang dilekatkan kepada mereka. Perempuan kerap menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan kerja dan tetap menjaga identitas sebagai pengasuh keluarga. Ketidakhadiran fisik dalam rumah tangga

dapat dianggap sebagai bentuk "pelanggaran" terhadap ekspektasi sosial, sehingga memperkuat rasa tanggung jawab moral untuk kembali. Dalam banyak kasus, perempuan migran membawa beban ganda: bekerja sebagai penyedia nafkah sekaligus mempertahankan peran sebagai penjaga harmoni keluarga, sebuah tekanan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keputusan untuk kembali ke daerah asal. Dengan demikian, norma gender berfungsi sebagai faktor kultural yang secara signifikan mempengaruhi keputusan kepulangan migran perempuan, karena kepulangan dipahami sebagai bentuk pemenuhan ulang terhadap peran yang dinilai "semestinya" dijalankan oleh perempuan dalam struktur sosial masyarakat.

2.6.2 Kewajiban Keibuan dalam Kepulangan Migran Perempuan

Dalam kajian migrasi internasional perempuan, keibuan tidak hanya dipahami sebagai relasi biologis antara ibu dan anak, tetapi sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan nilai, norma, dan tuntutan moral. Keibuan melekat pada perempuan sebagai tanggung jawab sosial yang diharapkan untuk dijalankan secara langsung, terutama dalam konteks pengasuhan dan pemeliharaan kesejahteraan emosional anak. Ketika perempuan bermigrasi ke luar negeri, peran ini tidak serta-merta terputus, melainkan dijalankan dalam kondisi keterbatasan ruang dan jarak. Oleh karena itu, kewajiban keibuan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami dinamika migrasi dan kepulangan perempuan.

Berbagai literatur menyebutkan bahwa migrasi perempuan sering kali melahirkan situasi yang dikenal sebagai *transnational motherhood*, di mana ibu tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan dari jarak jauh melalui pengiriman uang, komunikasi, dan pengambilan keputusan terkait kebutuhan anak. Namun, praktik pengasuhan jarak jauh ini tidak selalu dipandang setara dengan kehadiran fisik ibu. Dalam banyak konteks sosial, kehadiran ibu secara langsung masih dianggap sebagai bentuk ideal dari pemenuhan peran keibuan. Ketidakhadiran fisik ibu dalam kehidupan sehari-hari anak kerap dikaitkan dengan kekhawatiran akan gangguan emosional, perkembangan anak, serta stabilitas keluarga, sehingga memunculkan tekanan moral bagi perempuan migran.

Selain itu, kewajiban keibuan juga berkaitan dengan ekspektasi sosial mengenai siapa yang dianggap paling bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Dalam struktur

sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama, peran ini sering kali dipahami sebagai tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh pihak lain, termasuk anggota keluarga atau pengasuh pengganti. Akibatnya, perempuan migran kerap berada dalam posisi dilematik: di satu sisi mereka menjalankan peran produktif sebagai pencari nafkah, namun di sisi lain tetap dibebani tuntutan untuk hadir dan terlibat secara langsung dalam kehidupan anak. Ketegangan ini menjadikan keibuan sebagai sumber tekanan emosional yang terus menyertai pengalaman migrasi.

Dalam konteks kepulangan migran perempuan, kewajiban keibuan berperan sebagai kerangka moral yang mempengaruhi cara perempuan memaknai keputusan untuk kembali ke daerah asal. Kepulangan tidak hanya dipahami sebagai akhir dari aktivitas kerja di luar negeri, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi kembali peran keibuan yang secara sosial dianggap ideal. Dengan demikian, keibuan berfungsi sebagai faktor sosial–budaya yang penting dalam membentuk keputusan kepulangan, karena ia menautkan pengalaman migrasi dengan nilai, identitas, dan tanggung jawab sosial perempuan dalam keluarga.

2.7 Dampak Ekonomi Terhadap Migrasi

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan kepulangan pekerja migran. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri dan memperoleh penghasilan yang relatif stabil, purna migran dihadapkan pada perubahan kondisi ekonomi ketika kembali ke daerah asal. Ketika tujuan ekonomi tertentu dianggap telah tercapai—seperti membangun rumah, membeli tanah, atau membiayai pendidikan anak—sebagian migran memutuskan untuk pulang dan menetap kembali bersama keluarga. Kepulangan dalam konteks ini dipahami sebagai tahap lanjutan dari strategi rumah tangga, di mana kerja migran tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang harus berlangsung terus-menerus.

Selain tercapainya target ekonomi, kepulangan juga berkaitan dengan keterbatasan peluang kerja di daerah asal yang memaksa purna migran untuk menata ulang strategi bertahan hidup. Perbedaan kondisi ekonomi antara masa bekerja di luar negeri dan setelah pulang membuat mereka harus lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran rumah tangga. Tanpa penghasilan bulanan yang pasti, purna migran sering

kali mengandalkan tabungan, aset hasil migrasi, atau pekerjaan informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan bahwa kepulangan bukan akhir dari persoalan ekonomi, melainkan fase baru yang menuntut penyesuaian dan perhitungan ulang terhadap sumber penghidupan.

Dalam kehidupan sosial desa, hasil ekonomi yang dibawa pulang turut memengaruhi cara purna migran memaknai kepulangan mereka. Rumah permanen, kepemilikan tanah, atau keberhasilan menyekolahkan anak menjadi penanda bahwa masa migrasi dianggap "berhasil," sehingga kepulangan memperoleh legitimasi sosial. Namun, di balik capaian tersebut, purna migran tetap menghadapi kerentanan ekonomi akibat terbatasnya lapangan kerja lokal dan ketidakpastian pendapatan. Dengan demikian, faktor ekonomi dalam kepulangan pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan jumlah aset yang dibawa pulang, tetapi juga dengan kemampuan mereka menyesuaikan strategi ekonomi dalam kehidupan pasca migrasi.

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indramayu Tahun 2023

Indikator	Nilai	Keterangan
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	224,73	BPS, 2023
Persentase penduduk miskin (%)	11,91	BPS, 2023

(Sumber: BPS Kabupaten Indramayu, 2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu Tahun 2025, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 11,91%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 224,73 ribu jiwa. Angka ini menempatkan Indramayu sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata, serta ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor rentan seperti pertanian dan perikanan yang sangat bergantung pada musim.

Dalam konteks kepulangan purna pekerja migran ke Indramayu, kondisi ekonomi daerah asal menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari. Meskipun sebagian purna migran kembali dengan membawa tabungan hasil remitansi, situasi ekonomi rumah tangga dan lingkungan sekitar sering kali menuntut penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan untuk menutup pengeluaran rutin—seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan—membuat remitansi yang dibawa pulang lebih banyak diarahkan pada konsumsi dibandingkan sebagai modal usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepulangan tidak serta-merta membuka peluang peningkatan ekonomi, tetapi justru mempertemukan purna migran dengan realitas keterbatasan ekonomi di daerah asal.

Situasi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja di Indramayu. Minimnya pilihan usaha yang dapat diakses serta rendahnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan membuat sebagian purna migran kesulitan mengembangkan dana yang mereka miliki. Akibatnya, tabungan hasil bekerja di luar negeri yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dapat berkurang dengan cepat setelah kepulangan. Dalam konteks ini, kepulangan bukan hanya tentang membawa pulang hasil migrasi, tetapi juga tentang kemampuan bertahan di tengah struktur ekonomi lokal yang belum sepenuhnya mendukung kemandirian ekonomi purna migran.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi pasca kepulangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya remitansi yang dibawa pulang, tetapi juga oleh situasi sosial-ekonomi di daerah asal. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan alternatif membuat remitansi rentan kembali terserap untuk kebutuhan jangka pendek. Dengan demikian, kepulangan purna pekerja migran di Indramayu perlu dipahami sebagai proses yang berhadapan langsung dengan struktur kemiskinan lokal, di mana hasil migrasi tidak selalu dapat diubah menjadi modal produktif yang berkelanjutan.

2.7.1 Ketidakpastian Pendapatan Pasca Kepulangan

Ketidakpastian pendapatan merupakan salah satu pengalaman paling menonjol yang dihadapi pekerja migran setelah kembali ke daerah asal. Selama bekerja di luar

negeri, migran terbiasa dengan ritme ekonomi yang relatif stabil: gaji diterima secara berkala, jam kerja terstruktur, dan kebutuhan dasar dapat diperkirakan dari bulan ke bulan. Kepulangan mengakhiri kepastian tersebut. Setibanya di desa asal, purna migran harus berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak memberikan jaminan penghasilan tetap, terutama di wilayah pedesaan yang lapangan kerjanya terbatas dan didominasi sektor informal. Perubahan ini menciptakan jarak yang tajam antara pengalaman ekonomi selama migrasi dan realitas pasca kepulangan, sehingga kepulangan sering dirasakan sebagai fase penuh ketidakpastian, bukan sebagai titik aman secara ekonomi.

Ketidakpastian ini tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan pekerjaan formal, tetapi juga dengan absennya sistem pendukung ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja purna migran. Banyak purna migran kembali dengan keterampilan yang spesifik pada sektor pekerjaan di luar negeri, seperti pekerjaan domestik atau manufaktur, yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Akibatnya, mereka kesulitan mengonversi pengalaman kerja migran menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan di desa. Situasi ini memaksa purna migran mengandalkan tabungan, remitansi tersisa, atau pekerjaan tidak tetap dengan pendapatan fluktuatif. Dalam konteks ini, kepulangan menjadi periode rentan di mana penghasilan rumah tangga tidak dapat dipastikan, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan.

Ketidakpastian pendapatan pasca kepulangan juga memengaruhi cara purna migran mengelola kehidupan sehari-hari. Tanpa pemasukan rutin, pengeluaran rumah tangga harus disesuaikan secara ketat, dan keputusan ekonomi menjadi lebih berhati-hati. Pengalaman hidup dengan gaji tetap di luar negeri membentuk standar baru dalam memaknai keamanan ekonomi, sehingga ketiadaan pendapatan bulanan setelah pulang sering kali menimbulkan kecemasan dan rasa tidak stabil. Dalam banyak kasus, purna migran harus menurunkan pola konsumsi, menunda rencana jangka panjang, atau kembali bergantung pada anggota keluarga lain. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada kondisi material, tetapi juga memengaruhi rasa percaya diri dan posisi purna migran dalam keluarga.

Dalam kerangka yang lebih luas, ketidakpastian pendapatan pasca kepulangan menunjukkan bahwa migrasi internasional tidak selalu menghasilkan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Kepulangan menempatkan purna migran dalam situasi transisi

yang rawan, di mana hasil kerja bertahun-tahun di luar negeri harus berhadapan dengan struktur ekonomi lokal yang belum mampu menyediakan alternatif penghidupan yang stabil. Dengan demikian, ketidakpastian pendapatan pasca kepulangan dapat dipahami sebagai faktor ekonomi penting yang membentuk pengalaman purna migran, sekaligus menjadi konteks struktural yang memengaruhi bagaimana mereka menafsirkan keberhasilan migrasi dan merencanakan masa depan setelah kembali ke daerah asal.

2.7.2 Aset dan Modal Pasca Migrasi

Aset dan modal yang dibawa pulang oleh pekerja migran setelah kepulangan sering kali dipahami sebagai hasil konkret dari pengalaman migrasi. Dalam banyak studi migrasi internasional, aset pasca migrasi tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga mencakup kepemilikan rumah, tanah, perabot rumah tangga, hingga tabungan dan perhiasan. Aset-aset ini menjadi penanda visual keberhasilan migrasi, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan kesempatan ekonomi. Kepemilikan aset pasca migrasi sering kali dimaknai sebagai bukti bahwa masa bekerja di luar negeri tidak berlalu sia-sia, sekaligus menjadi legitimasi sosial atas keputusan migrasi yang telah diambil sebelumnya.

Namun, kepemilikan aset tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan ekonomi setelah kepulangan. Banyak purna migran membawa pulang aset yang bersifat konsumtif atau simbolik, seperti rumah permanen atau barang elektronik, yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan. Dalam konteks ini, aset berfungsi lebih sebagai bentuk pengamanan sosial dan pengakuan status dibandingkan sebagai modal produktif. Keterbatasan akses terhadap pasar, minimnya pengetahuan usaha, serta absennya dukungan institusional membuat proses konversi aset menjadi sumber penghidupan jangka panjang menjadi sulit. Akibatnya, aset pasca migrasi sering kali berhenti pada fungsi representatif, bukan sebagai alat reproduksi ekonomi.

Selain aset material, migrasi juga menghasilkan modal non-material yang kerap disebut sebagai modal manusia dan modal sosial. Pengalaman kerja di luar negeri membentuk keterampilan teknis, etos kerja, serta kedisiplinan tertentu yang berpotensi dimanfaatkan setelah kepulangan. Namun, dalam praktiknya, modal manusia ini tidak selalu dapat diintegrasikan ke dalam struktur ekonomi lokal. Ketidaksesuaian antara

keterampilan migran dan kebutuhan pasar kerja di daerah asal membuat modal tersebut tidak sepenuhnya terserap. Demikian pula dengan modal sosial; jaringan yang terbentuk selama migrasi sering kali terputus atau tidak relevan ketika purna migran kembali ke desa, sehingga manfaat ekonominya menjadi terbatas.

Dengan demikian, aset dan modal pasca migrasi perlu dipahami secara lebih kritis sebagai hasil yang bersifat ambigu. Di satu sisi, aset tersebut mencerminkan capaian ekonomi dan kerja keras selama migrasi; di sisi lain, keterbatasan struktur ekonomi lokal membuat aset dan modal tersebut sulit dikembangkan menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Kepulangan menempatkan purna migran pada situasi di mana mereka harus menegosiasikan ulang makna keberhasilan migrasi—bukan hanya berdasarkan apa yang dibawa pulang, tetapi juga sejauh mana aset dan modal tersebut dapat menopang kehidupan setelah kembali. Kerangka ini penting untuk membaca pengalaman purna migran dalam menghadapi fase pasca migrasi yang penuh keterbatasan sekaligus harapan.

BAB III

KEHIDUPAN DAN PRAKTIK EKONOMI PASCA MIGRAN KEMBALI

Bab ini membahas secara rinci kehidupan para purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kepulangan mereka ke desa asal. Kehidupan pasca migrasi bukan sekadar kembalinya seorang perempuan dari luar negeri, tetapi sebuah fase transisi yang kompleks: dari status sebagai "pekerja" yang setiap bulan menerima gaji tetap, menjadi "purna pekerja migran" yang harus menata ulang cara hidup tanpa pemasukan reguler. Transisi ini penuh lapisan—ada rasa lega karena bisa kembali ke rumah, ada rasa kehilangan karena kehilangan penghasilan, dan ada pula kebanggaan yang dibayangi stigma sosial sebagai "mantan babu."

Praktik pengelolaan uang menjadi arena paling penting dalam transisi ini. Remitan yang dulunya rutin mengalir tiap bulan kini berhenti, berganti dengan tabungan hasil kerja yang terbatas. Di titik inilah para purna pekerja migran dituntut untuk membuat pilihan: apakah uang yang ada dipakai untuk konsumsi harian, dialihkan menjadi aset seperti rumah dan tanah, atau habis dalam pusaran kebutuhan keluarga besar yang kadang

berada di luar kontrol mereka. Bagi sebagian orang, rumah permanen atau emas yang dibeli dari hasil migrasi menjadi simbol keberhasilan; bagi yang lain, warung kecil atau usaha seadanya adalah cara bertahan hidup di tengah rapuhnya ekonomi pedesaan.

Namun pasca migrasi tidak hanya persoalan uang. Ia juga menyangkut strategi bertahan hidup sehari-hari: ada yang kembali bekerja serabutan di desa, ada yang menekuni usaha kecil, ada pula yang mempertimbangkan migrasi ulang meski usia tidak lagi muda. Semua strategi ini mencerminkan bagaimana perempuan-perempuan Indramayu terus menegosiasikan identitas mereka—sebagai ibu, janda, anak, sekaligus mantan pekerja migran. Di atas semuanya, remitan yang mereka hasilkan tidak pernah netral. Uang hasil kerja di luar negeri dilekati dengan nilai moral: sebagai bukti bakti pada orang tua, sebagai sumber legitimasi sosial, sekaligus sebagai pengingat jerih payah di negeri asing. Inilah yang menjadikan remitan bukan sekadar rupiah, tetapi "uang bermoral" yang sarat makna sosial dan kultural.

Bab ini disusun ke dalam empat sub-bab utama. Sub-bab pertama, *Kehidupan Pasca Migrasi: Transisi dari "Pekerja" ke "Purna Migran"*, menguraikan perubahan status sosial dan pengalaman emosional informan saat kembali ke desa. Sub-bab kedua, *Praktik Pengelolaan Uang Setelah Kepulangan*, membahas pola penggunaan remitan, mulai dari konsumsi hingga aset, serta kontrol keluarga. Sub-bab ketiga, *Strategi Bertahan Hidup Purna Migran*, menjelaskan cara-cara yang ditempuh informan untuk melanjutkan kehidupan ekonomi mereka setelah tidak lagi bekerja di luar negeri. Terakhir, sub-bab keempat, *Remitan sebagai Uang Bermoral*, menguraikan bagaimana para purna pekerja migran memaknai hasil kerja mereka dan menempatkan uang tersebut dalam hubungan sosial dan budaya di masyarakat Indramayu.

3.1 Transisi Kepulangan Pekerja Migran

Indramayu merupakan salah satu daerah dengan tradisi migrasi yang kuat, di mana bekerja ke luar negeri menjadi strategi yang lazim bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Desa Lohbener, lokasi penelitian ini, telah lama menjadi ruang sosial yang menandai mobilitas warganya melalui alur keberangkatan dan kepulangan para pekerja migran. Dalam konteks ini, kepulangan seorang pekerja migran bukan hanya pergerakan fisik dari negara tujuan kembali ke desa asal, tetapi sebuah fase transisi yang sarat dengan

perubahan sosial, emosional, dan ekonomi. Dari individu yang selama bertahun-tahun hidup dalam ritme kerja yang teratur dengan pendapatan tetap, para perempuan ini harus menata kembali identitas dan peran mereka sebagai purna pekerja migran di lingkungan desa yang dinamis dan penuh ekspektasi.

Fase pasca migrasi sering kali mempertemukan dua perasaan yang saling bertentangan: rasa lega dan rasa kehilangan. Lega karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga, terbebas dari tekanan kerja, serta kembali pada ruang yang akrab. Namun, ada pula rasa kehilangan—kehilangan pemasukan tetap, kehilangan status sebagai "pekerja", dan bahkan kehilangan sebagian identitas yang selama ini melekat selama di negeri orang. Transisi ini menciptakan tekanan dan cara penyesuaian yang berbeda pada setiap individu, bergantung pada tujuan awal migrasi, lamanya bekerja, hingga kondisi keluarga saat mereka kembali.

Di Desa Lohbener, fase kepulangan ini memiliki makna yang berlapis. Rumah-rumah permanen yang berdiri kokoh menjadi simbol keberhasilan migrasi, namun di balik itu tersimpan kecemasan tentang bagaimana mempertahankan kehidupan tanpa gaji bulanan. Para perempuan yang sebelumnya disebut "TKW" atau kini "PMI" kembali memikul identitas baru sebagai purna migran—identitas yang tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga serangkaian tuntutan sosial untuk tetap menopang keluarga meskipun mereka tidak lagi berada di luar negeri. Pada fase ini, identitas, peran, dan relasi mereka dinegosiasi ulang di tengah perubahan dinamika rumah tangga dan komunitas.

Kepulangan seorang pekerja migran ke desa asal selalu membawa cerita yang lebih besar daripada sekadar pergerakan tubuh dari luar negeri ke tanah kelahiran. Ia adalah sebuah transisi sosial, emosional, dan ekonomi yang sarat makna. Dari seorang "pekerja" yang setiap bulan menerima gaji dalam mata uang asing, seorang perempuan tiba-tiba harus menata hidup sebagai "purna pekerja migran" yang kembali bergulat dengan realitas desa: pendapatan yang tidak menentu, kebutuhan keluarga yang terus berjalan, serta pandangan masyarakat yang tidak selalu ramah.

Fase pasca migrasi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan babak baru yang penuh dengan ketegangan antara rasa lega dan rasa kehilangan. Lega karena bisa kembali ke rumah, bertemu keluarga, serta terlepas dari ikatan kontrak kerja yang melelahkan.

Namun, di sisi lain ada kehilangan: kehilangan penghasilan tetap, kehilangan status "pekerja," dan bahkan kehilangan sebagian identitas yang selama bertahun-tahun melekat di negeri orang. Transisi ini menimbulkan berbagai strategi, perasaan, dan pengalaman yang berbeda pada setiap individu, tergantung pada lama kerja, tujuan migrasi, serta kondisi keluarga ketika mereka pulang.

Dalam konteks Indramayu, desa asal para informan, fase pasca migrasi memiliki lapisan makna yang khas. Rumah-rumah permanen berdiri sebagai penanda keberhasilan migrasi, tetapi di balik dindingnya tersimpan cerita kecemasan tentang masa depan tanpa pemasukan tetap. Para perempuan yang dulu disebut "TKW" kini hidup dalam status baru: purna pekerja migran, yang dituntut untuk tetap menopang keluarga meskipun sudah tidak lagi bekerja di luar negeri. Di sinilah terlihat bagaimana identitas mereka dinegosiasikan kembali—antara kebanggaan, stigma, dan tuntutan bertahan hidup.

Untuk memahami transisi kepulangan ini secara lebih konkret, penting untuk melihat alasan-alasan yang mendorong para pekerja migran dalam penelitian ini untuk kembali ke desa. Setiap informan memiliki latar belakang dan situasi keluarga yang berbeda, sehingga kepulangan mereka tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, serta dinamika domestik yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri. Dengan menelusuri alasan kepulangan para informan, pola transisi mulai terlihat: siapa yang pulang karena anak, siapa yang pulang karena perceraian, siapa yang pulang karena kontrak selesai, dan siapa yang pulang karena tekanan sosial. Analisis ini menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana proses kepulangan membentuk pengalaman mereka sebagai purna pekerja migran.

3.1.1 Alasan Kepulangan Migran

Keputusan untuk berangkat menjadi pekerja migran tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berakar pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk kehidupan masyarakat Indramayu. Migrasi telah menjadi pola yang berulang: ketika tekanan ekonomi rumah tangga meningkat, sementara lapangan kerja lokal tidak mampu menyediakan penghasilan yang stabil, keluar negeri menjadi satu-satunya strategi yang dianggap realistis dan bermartabat. Dalam konteks inilah keputusan seorang perempuan

untuk merantau tidak hanya dipahami sebagai pilihan individual, tetapi sebagai respons terhadap struktur sosial yang membatasi peluang hidup mereka.

3.1.1.1 Alasan Kepulangan Atas Faktor Sosial-Budaya

1). Norma Gender

Dalam konteks migrasi internasional, pengalaman kepulangan migran perempuan dapat dibaca sebagai proses yang dipengaruhi oleh relasi sosial dan norma budaya yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Norma gender yang menempatkan perempuan sebagai figur utama dalam ranah domestik tidak serta-merta hilang ketika mereka bermigrasi ke luar negeri. Sebaliknya, norma tersebut tetap hadir dan membingkai cara perempuan memaknai peran dirinya, baik sebagai pekerja migran maupun sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana norma gender memengaruhi keputusan kepulangan secara konkret, penting untuk melihat pengalaman individual migran perempuan dalam konteks sosial yang mereka hadapi.

Pengalaman Bu Uus sebagai pekerja migran memberikan gambaran tentang bagaimana tuntutan domestik tetap melekat meskipun ia berada di luar negeri. Selama bekerja, Bu Uus menghadapi situasi di mana pengasuhan anak tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada anggota keluarga lain. Kondisi ini menciptakan jarak tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, karena peran sebagai ibu tetap dipahami sebagai tanggung jawab utama yang seharusnya dijalankan secara langsung. Dalam narasi Bu Uus, ketidakhadiran dalam kehidupan sehari-hari anak dipersepsikan sebagai sesuatu yang problematis, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga dalam pandangan lingkungan sosial di sekitarnya.

Selain itu, pengalaman Bu Uus menunjukkan adanya ketegangan antara peran produktif dan peran reproduktif yang harus dijalani secara bersamaan. Di satu sisi, keberangkatan ke luar negeri dimaknai sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, peran domestik yang dilekatkan secara kultural pada perempuan tetap menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberadaannya. Ketika peran tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal akibat jarak dan waktu, muncul tekanan moral yang mendorong

keinginan untuk kembali. Tekanan ini tidak selalu diungkapkan secara eksplisit sebagai paksaan, tetapi hadir dalam bentuk rasa tanggung jawab dan kewajiban yang terus dirasakan.

Dalam hal ini, kepulangan Bu Uus tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan individual yang rasional, melainkan sebagai bagian dari proses negosiasi antara tuntutan ekonomi dan ekspektasi sosial yang mengikatnya sebagai perempuan dan ibu. Norma gender berperan dalam membentuk kerangka berpikir tentang apa yang dianggap sebagai peran "seharusnya" dijalankan, serta batas-batas yang diterima secara sosial terhadap keterlibatan perempuan dalam kerja migran. Pengalaman Bu Uus dengan demikian memperlihatkan bagaimana norma gender bekerja secara halus namun kuat dalam mempengaruhi dinamika kepulangan migran perempuan.

Pengalaman kepulangan migran perempuan juga dapat dipahami melalui dinamika norma gender yang berkaitan dengan peran keibuan dan tanggung jawab domestik, sebagaimana terlihat dalam kasus Bu Laeliyah. Dalam konteks migrasi internasional, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga tetap dilekatkan pada peran sosial sebagai ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesejahteraan anak. Norma ini membentuk cara perempuan memaknai keberangkatan dan kepulangan, terutama ketika kondisi keluarga menuntut kehadiran fisik yang lebih intens di rumah.

Dalam narasi Bu Laeliyah, keputusan untuk bekerja ke luar negeri berkaitan erat dengan upaya memenuhi kebutuhan anak, khususnya dalam konteks tanggung jawab pengasuhan yang kompleks. Selama berada di luar negeri, peran sebagai ibu tetap menjadi pusat pertimbangan, meskipun dijalankan dari jarak jauh. Pengiriman uang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak dipahami sebagai bagian dari kewajiban keibuan, namun tidak sepenuhnya menggantikan kehadiran fisik yang secara sosial dianggap penting. Situasi ini menunjukkan bagaimana norma gender membingkai pengasuhan sebagai tanggung jawab yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan moral.

Selain itu, pengalaman Bu Laeliyah memperlihatkan adanya beban ganda yang harus dijalani perempuan migran. Di satu sisi, ia menjalankan peran produktif sebagai pencari nafkah di luar negeri, sementara di sisi lain tetap memikul ekspektasi sosial untuk menjadi pengasuh utama anak. Ketegangan antara kedua peran ini menciptakan tekanan yang terus berulang selama masa migrasi. Norma sosial yang menempatkan ibu sebagai figur sentral dalam kehidupan anak membuat jarak geografis menjadi persoalan yang tidak sekadar teknis, tetapi juga kultural dan emosional.

Dalam konteks tersebut, kepulangan Bu Laeliyah dapat dilihat sebagai bagian dari proses negosiasi antara tuntutan ekonomi dan norma gender yang mengatur peran perempuan dalam keluarga. Kepulangan tidak hanya dimaknai sebagai akhir dari aktivitas kerja migran, tetapi juga sebagai upaya untuk kembali menjalankan peran domestik yang secara sosial dilekatkan kepadanya. Dengan demikian, pengalaman Bu Laeliyah memperlihatkan bagaimana norma gender beroperasi secara berkelanjutan dalam membentuk keputusan kepulangan migran perempuan, terutama ketika pengasuhan anak menjadi pusat dari identitas dan tanggung jawab sosial perempuan.

2). Eksistensi Peran Ibu

Kepulangan pekerja migran tidak selalu didorong oleh berakhirnya kontrak kerja atau pertimbangan ekonomi semata. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk kembali ke desa asal justru dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkaitan dengan peran dalam keluarga, terutama peran sebagai ibu. Bagi sebagian purna migran perempuan, keberadaan mereka di rumah memiliki makna yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh remitansi. Peran pengasuhan, kedekatan emosional dengan anak, serta tanggung jawab moral sebagai ibu menjadi pertimbangan penting yang mendorong keputusan untuk pulang.

Hal tersebut tercermin dalam pengalaman Bu Laeliyah (50 tahun), seorang purna pekerja migran yang memutuskan pulang ke Indramayu bukan semata karena faktor ekonomi, melainkan karena kebutuhan untuk mendampingi anaknya secara langsung. Sebagai ibu dari anak berkebutuhan khusus, Bu Laeliyah merasa

bahwa peran pengasuhan tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada anggota keluarga lain, sehingga kepulangannya menjadi pilihan yang dianggap paling memungkinkan untuk menjaga keseimbangan keluarga.

Kepulangan Bu Laeliyah tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai seorang ibu yang memiliki tanggung jawab pengasuhan langsung. Selama bekerja di Taiwan, ia memang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga melalui remitansi yang dikirim secara rutin. Namun, jarak fisik dengan anaknya menimbulkan kegelisahan yang terus berulang, terutama karena anaknya membutuhkan pendampingan khusus dalam kehidupan sehari-hari. Bu Laeliyah menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan materi dapat dipenuhi dari luar negeri, kehadirannya sebagai ibu tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh anggota keluarga lain. Kondisi ini membuatnya terus mempertimbangkan kepulangan, bukan sebagai kegagalan migrasi, melainkan sebagai bentuk pengambilan tanggung jawab yang berbeda. Dalam konteks ini, kepulangan menjadi keputusan yang berangkat dari kesadaran akan batas peran ekonomi dan pentingnya kehadiran ibu dalam keluarga.

Setelah kembali ke Indramayu, Bu Laeliyah menghadapi perubahan signifikan dalam ritme kehidupannya. Waktu yang sebelumnya terserap oleh jam kerja panjang di luar negeri kini sepenuhnya dialihkan untuk mengurus anak dan rumah tangga. Ia menggambarkan kesehariannya sebagai lebih melelahkan secara emosional, namun sekaligus memberi rasa tenang karena dapat memantau kondisi anak secara langsung. Kepulangan ini juga menuntut penyesuaian ekonomi, karena ia tidak lagi memiliki pendapatan tetap seperti saat bekerja di luar negeri. Meski demikian, Bu Laeliyah menilai keputusan pulang sebagai langkah yang "lebih benar" secara moral baginya, sebab peran sebagai ibu menuntut keterlibatan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga kehadiran fisik dan perhatian sehari-hari. Perubahan ini menunjukkan bahwa kepulangan tidak serta-merta memperbaiki kondisi hidup, tetapi menghadirkan bentuk tanggung jawab baru yang dianggap lebih sesuai dengan perannya dalam keluarga.

Pengalaman Bu Laeliyah memperlihatkan bahwa dalam konteks sosial dan budaya desa asal, eksistensi peran ibu memiliki bobot yang kuat dalam

pengambilan keputusan kepulangan. Di satu sisi, bekerja sebagai pekerja migran memberi legitimasi sebagai pencari nafkah, tetapi di sisi lain, norma tentang kehadiran ibu di rumah tetap menjadi rujukan penting dalam menilai keberlangsungan keluarga. Bu Laeliyah menyadari bahwa selama ia berada di luar negeri, perannya sebagai ibu sering kali direduksi menjadi pengirim uang, sementara fungsi pengasuhan dijalankan oleh pihak lain. Kepulangan menjadi cara untuk merebut kembali peran tersebut dan menegaskan posisinya dalam keluarga. Dengan demikian, alasan kepulangan Bu Laeliyah tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mencerminkan bagaimana peran ibu dipahami dan dinegosiasikan dalam struktur sosial keluarga, di mana kehadiran fisik dianggap sebagai bagian penting dari tanggung jawab keibuan.

3.1.1.2 Alasan Kepulangan Atas Faktor Ekonomi

Bagi sebagian informan, keputusan untuk pulang juga berkaitan dengan pertimbangan ekonomi yang mereka hadapi menjelang akhir masa kerja di luar negeri. Dari wawancara, mereka menceritakan bahwa kondisi keuangan tidak lagi berada pada titik yang sama seperti ketika pertama kali berangkat. Ada yang merasa bahwa gaji yang diterima tidak sebanding lagi dengan beban kerja dan biaya hidup di negara tujuan, sementara di sisi lain kebutuhan fisik dan kesehatan semakin menurun sehingga kesempatan lembur ikut berkurang. Dalam situasi seperti itu, bekerja lebih lama dianggap tidak lagi memberikan keuntungan ekonomi yang berarti. Sebagian informan juga menyebut bahwa mereka memilih pulang ketika tujuan finansial yang direncanakan—seperti membangun rumah atau melunasi utang—sudah terpenuhi, sehingga melanjutkan kontrak kerja dirasa tidak lagi mendesak secara ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kepulangan mereka tidak semata-mata terjadi karena faktor keluarga, tetapi juga karena kalkulasi ekonomi yang terus mereka evaluasi selama masa migrasi.

Bagi Bu Linda, keputusan untuk pulang tidak diambil secara tiba-tiba, tetapi melalui pertimbangan ekonomi yang ia lakukan menjelang akhir masa kontrak kerjanya di Hongkong. Dalam wawancara, ia menceritakan bahwa kondisi fisiknya sudah tidak sekuat ketika pertama kali bekerja di luar negeri.

Pekerjaan domestik yang mengharuskan banyak aktivitas fisik, seperti membersihkan rumah dan merawat lansia, mulai terasa semakin berat. Pada saat yang sama, peluang lembur yang sebelumnya menjadi sumber tambahan pendapatan mulai berkurang karena tenaganya tidak lagi memungkinkan untuk bekerja dengan ritme sepadat dulu. Dalam situasi ini, Bu Linda merasa bahwa tenaga yang dikeluarkan sudah tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, sehingga melanjutkan kontrak kerja dianggap tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.

Selain itu, Bu Linda juga melihat bahwa sebagian tujuan finansial yang ia bawa sejak awal keberangkatan sudah tercapai. Selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri, ia berhasil membangun rumah, membantu kebutuhan anak-anaknya, serta melunasi beberapa keperluan keluarga. Ketika saya menanyakan alasan kenapa ia tidak memperpanjang kontrak, Bu Linda menjelaskan bahwa "yang utama sudah kebeli dan anak sudah mulai mandiri," sehingga ia merasa tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti ketika pertama kali memutuskan merantau. Pada titik ini, bekerja lebih lama di luar negeri tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan mendesak, melainkan justru berpotensi menambah beban fisik tanpa memberikan keuntungan ekonomi yang berarti.

Setelah mempertimbangkan kondisi tersebut, kepulangan akhirnya menjadi pilihan yang ia nilai paling rasional. Menurut penuturannya, pulang ke Indramayu memberi ruang bagi dirinya untuk mengurangi tekanan kerja sekaligus menata ulang sumber penghidupan di desa, meskipun itu berarti menghadapi situasi ekonomi yang lebih tidak stabil dibandingkan saat masih menerima gaji bulanan. Pengalaman Bu Linda menunjukkan bahwa keputusan pulang bukan semata-mata karena kontrak berakhir, tetapi merupakan hasil dari evaluasi berkelanjutan terhadap manfaat dan biaya ekonomi migrasi yang ia rasakan menjelang akhir masa kerjanya.

3.1.1.3 Alasan Kepulangan atas Faktor Lain

Selain faktor gender, keluarga dan ekonomi, beberapa informan juga memutuskan untuk pulang karena alasan lain yang muncul dari pengalaman

mereka selama bekerja di luar negeri. Dalam wawancara, alasan-alasan ini tidak selalu berdiri sendiri, melainkan hadir sebagai situasi yang menyertai kehidupan kerja mereka, seperti masalah kesehatan, rasa tidak betah dengan lingkungan kerja, tekanan psikologis, atau keinginan untuk kembali membangun kehidupan di kampung halaman setelah merasa cukup lama berada di negara tujuan. Pada kasus tertentu, kepulangan juga dipicu oleh situasi mendadak, misalnya perubahan kondisi kerja, konflik di tempat kerja, atau kebutuhan pribadi yang sulit diselesaikan bila tetap berada di luar negeri. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa keputusan pulang tidak selalu mengikuti pola yang sama, melainkan terbentuk dari pengalaman subjektif yang beragam sesuai dengan konteks masing-masing informan.

1). Alasan Kesehatan

Beberapa informan memutuskan untuk pulang karena kondisi kesehatan yang semakin menurun setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Dalam wawancara, mereka menceritakan bahwa ritme kerja yang berat, jam kerja panjang, serta aktivitas fisik yang terus-menerus membuat tubuh tidak lagi mampu bekerja dengan kapasitas yang sama seperti saat pertama kali berangkat. Rasa sakit di bagian tubuh tertentu, cepat lelah, dan berkurangnya kekuatan fisik menjadi tanda-tanda yang mereka rasakan menjelang akhir masa kontrak. Pada fase inilah, kepulangan dipilih sebagai cara untuk memulihkan kondisi tubuh sekaligus menghindari risiko kesehatan yang lebih serius apabila tetap memaksakan diri bekerja.

Contoh dari permasalahan kesehatan yang menjadi alasan kepulangan adalah pada Bu Neni yang terkena penyakit kista. Dalam wawancara, ia menceritakan bahwa rasa nyeri di bagian perut mulai sering muncul ketika masih bekerja di luar negeri, terutama saat melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak gerak dan berdiri dalam waktu lama. Pada awalnya, keluhan tersebut ia abaikan karena masih merasa mampu bekerja, namun lama-kelamaan rasa sakit semakin intens dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi kerja yang padat dan terbatasnya akses untuk beristirahat membuat Bu Neni merasa bahwa kesehatannya semakin menurun. Dalam situasi tersebut, ia mulai memikirkan

kemungkinan pulang, karena merasa tidak lagi sanggup melanjutkan pekerjaan dengan kondisi tubuh seperti itu.

Keputusan untuk pulang akhirnya diambil setelah ia mendapatkan diagnosis kista dari dokter di negara tujuan. Menurut penuturannya, ia merasa lebih aman jika menjalani proses pemulihan di Indonesia, karena dapat berada dekat dengan keluarga dan mendapatkan dukungan emosional selama masa sakit. Selain itu, biaya perawatan yang tinggi di negara tempat bekerja juga menjadi pertimbangan penting yang membuatnya memilih pulang lebih awal. Bagi Bu Neni, kepulangan bukan hanya akhir dari kontrak kerja, tetapi juga pilihan yang diambil demi menjaga keselamatan tubuh dan mencegah kondisi kesehatannya semakin parah.

Berbeda dengan Bu Neni yang pulang karena sakit yang dialami dirinya sendiri, alasan kepulangan Bu Laeliyah justru berkaitan dengan kondisi kesehatan anaknya yang mengalami *cerebral palsy*. Dalam wawancara, ia menceritakan bahwa selama bekerja di luar negeri, ia terus merasa tidak tenang karena harus meninggalkan anaknya dalam pengasuhan keluarga di rumah. Meskipun kebutuhan ekonomi keluarga terpenuhi melalui hasil kerjanya, Bu Laeliyah merasa bahwa kehadirannya secara fisik dan emosional lebih dibutuhkan di rumah, terutama dalam hal pendampingan perawatan anak. Ketika kondisinya semakin menuntut perhatian intensif, ia akhirnya memutuskan untuk pulang dan menghentikan kontrak kerjanya.

Bagi Bu Laeliyah, kepulangan bukan hanya keputusan praktis, tetapi sekaligus bentuk tanggung jawab sebagai ibu yang merasa perlu hadir langsung dalam proses pengasuhan dan perawatan anaknya. Ia menyadari bahwa bekerja di luar negeri memberi dukungan finansial, tetapi di sisi lain membuatnya jauh dari peran pengasuhan yang selama ini tidak bisa ia jalankan secara penuh. Melalui kisah Bu Laeliyah, terlihat bahwa kesehatan—baik kesehatan diri maupun anggota keluarga—menjadi faktor penting yang membentuk keputusan kepulangan para purna migran, dan tidak selalu dapat dipisahkan dari pertimbangan emosional serta relasi keluarga yang menyertai kehidupan mereka setelah kembali ke desa. Dengan demikian, alasan kepulangan para informan

tidak hanya dipengaruhi aspek ekonomi maupun keluarga, tetapi juga kondisi kesehatan, baik yang dialami diri sendiri maupun anggota keluarga.

Siang itu, terik matahari di jalur Pantura Indramayu terasa menyengat di kulit. Saya menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 11 kilometer dari rumah menuju Desa Lohbener. Kisah Bu Linda (51 tahun) menggambarkan pola tersebut secara jelas. Ia memutuskan menjadi pekerja migran pada tahun 1999, sesaat setelah suaminya meninggal dan ia harus menghidupi anak-anaknya seorang diri. Tekanan ekonomi sebagai janda—posisi sosial yang rentan dalam kultur Indramayu—mendorongnya mencari penghasilan yang lebih pasti. Faktor ini tidak hanya personal, tetapi mencerminkan pola umum perempuan migran Indonesia: motif ekonomi sebagai pendorong utama (Mas'udah, 2019), posisi perempuan sebagai penopang keluarga (Sembada et al., 2024), serta norma lokal yang menerima bahkan mendorong perempuan bekerja di luar negeri.

Kediaman Bu Linda jaraknya tidak jauh dari rumah Bu Diah, hanya berjarak 15 meter dari rumah Bu Diah. Rumah Bu Linda terletak di gang kecil dengan halaman cukup luas; akses menuju rumahnya hanya dapat dilalui oleh satu sepeda motor. Rumahnya baru dibangun satu tahun yang lalu, dengan cat nuansa warna putih dan biru tua. Selama saya berada di rumah Bu Linda, saya dipersilakan duduk di ruang tengah. Di ruangan tersebut terdapat sebuah televisi Android berukuran cukup besar yang menjadi pusat perhatian keluarga. Sementara itu, di ruang tamu terlihat sebuah motor Vespa Matic edisi Sprint S yang diparkir rapi—menjadi salah satu simbol keberhasilan seorang pekerja migran selama bekerja di luar negeri, karena jika saya refleksikan dengan kondisi masyarakat sekitar, memiliki barang mewah seperti motor Vespa merupakan sebuah pencapaian yang tidak main-main, apalagi di Desa Lohbener tidak banyak masyarakat yang memiliki motor Vespa.

Bu Linda saat itu ditemani oleh anaknya yang bernama Mas Ilham, dan keponakannya yang bernama Mbak Opi. Mas Ilham merupakan pekerja migran di Korea Selatan yang sedang pulang ke rumah untuk mengurus perpanjangan kontrak, saat ini berumur 26 tahun. Sedangkan Mbak Opi berusia 30 tahun, beliau merupakan mantan pekerja migran di Taiwan yang sedang pulang dan ingin memperpanjang kontrak dengan PT-nya, dikarenakan majikannya meninggal dunia.

Setelah saling menyapa dan berbincang ringan di ruang tengah, saya mulai membuka pembicaraan mengenai pengalaman Bu Linda sebagai pekerja migran. Bu Linda menyiapkan air mineral kemasan gelas dan menyuruh Mbak Opi untuk mengambil cemilan di dapur, tak lama saya membantu Mbak Opi untuk mengambil cemilan di dapur dan menaruh cemilan di ruang tengah dekat saya dan Bu Linda. Tak lama, Bu Linda pun mulai bercerita. Saya memulai wawancara santai namun mendalam, sebagai pembuka dari obrolan kami, saya menanyakan alasan Bu Linda berangkat ke luar negeri. Beliau tampak tenang namun mantap dan antusias saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ketika ditanya tentang alasan keberangkatannya menjadi pekerja migran, Bu Linda menjelaskan:

> Bu Linda : "Punya suami meninggal, tahun 1999. Pertama ke Saudi, untuk mencukupi kebutuhan anak, seperti susu, dan lain lain".
>
> Saya : "Kenapa memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Bu?"
>
> Bu Linda : "Karena pada saat itu ramai bekerja ke luar negeri, dan pada saat itu juga Indramayu sedang ramai ke luar negeri". (wawancara dengan Bu Linda, 56 tahun, seorang mantan pekerja migran di Taiwan dan Hongkong)

Bu Linda juga menceritakan bahwa ketika ia pertama kali berangkat, banyak perempuan di lingkungan rumahnya yang sudah lebih dulu bekerja ke luar negeri. Setiap beberapa bulan, ia melihat tetangganya pulang membawa oleh-oleh atau memperbaiki rumah, sehingga pekerjaan migran terlihat sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan dan sudah biasa dijalani oleh perempuan di desanya. Informasi tentang keberangkatan, prosedur, dan negara tujuan juga ia peroleh dari mereka, sehingga ia merasa lebih yakin untuk mengikuti langkah yang sama. Ia mengatakan bahwa waktu itu hampir semua perempuan sebayanya sedang bersiap berangkat atau baru saja pulang, sehingga bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan yang dianggap wajar ketika seseorang membutuhkan tambahan penghasilan.

Ketika ditanya apakah ada rasa ragu sebelum ia berangkat, Bu Linda menegaskan bahwa ia tidak sempat memikirkan hal tersebut karena fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan anak-anak setelah suaminya meninggal. "Nggak mikir panjang, Mbak. Yang penting anak saya bisa makan dan minum susu," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa sebelum berangkat, ia hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki pemasukan tetap, sehingga

keputusannya untuk menjadi pekerja migran ia anggap sebagai langkah yang dapat segera membantu kondisi keluarga. Dalam ceritanya, ia juga menyebut bahwa ia tidak terlalu memperhitungkan risiko atau kesulitan yang mungkin akan ia hadapi di negara tujuan, karena pada saat itu yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar anak-anak tidak kekurangan.

Alasan awal ini kemudian berkaitan dengan keputusan kepulangannya setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan kebutuhan mereka mulai berbeda, Bu Linda merasa bahwa kehadirannya di rumah menjadi lebih penting daripada penghasilan yang ia terima di luar negeri. Ia juga mulai merasakan perubahan fisik setelah bekerja lebih dari sepuluh tahun di beberapa negara, sehingga ia merasa tidak lagi sanggup mengikuti ritme kerja yang sama seperti ketika ia masih muda. Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa ia memilih pulang ketika kontraknya selesai karena ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, terutama setelah ia merasa semuanya "sudah cukup" untuk kehidupan sehari-hari.

Selain faktor usia, Bu Linda menyebut bahwa saat ia pulang, ia sudah memiliki rumah sendiri yang dibangun dari hasil bekerja di luar negeri. Hal itu membuatnya lebih tenang untuk menetap di Indramayu dan tidak berniat memperpanjang kontrak. Anak-anaknya juga meminta ia pulang karena khawatir dengan kesehatannya. Karena itu, ketika masa kerjanya habis, Bu Linda memutuskan untuk tidak mencari kontrak baru dan memilih kembali ke desa untuk tinggal bersama keluarganya.

Setelah kami melakukan sesi wawancara, Bu Linda mengajak saya untuk ke rumah Bu Laeliyah yang jaraknya kurang dari 10 meter dari rumah Bu Linda. Bu Laeliyah merupakan teman masa kecil Bu Linda, beliau memiliki warung yang menjual sembako dan cemilan.

Kisah Bu Laeliyah (50 tahun) juga memperlihatkan bagaimana masa kepulangan menjadi fase yang tidak mudah. Setelah delapan tahun bekerja di Taiwan, ia memutuskan pulang karena ingin kembali mengasuh anaknya yang berkebutuhan khusus. Sesampainya di Indramayu, Bu Laeliyah merasakan perubahan besar dalam kesehariannya, terutama terkait pengelolaan keuangan. Ia membandingkan kondisi hidupnya sebelum dan sesudah pulang dengan jelas. "Kalau di luar negeri enak, ngeluarin

uang nggak takut, karena bulan depan pasti gaji masuk. Tapi kalau di sini harus hati-hati, soalnya pemasukan nggak tentu," ujarnya. Sejak kembali, ia merasa harus lebih cermat mengatur pengeluaran karena tidak ada penghasilan tetap yang bisa diandalkan. Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan anaknya tetap menjadi prioritas utama, sehingga semua keputusan keuangan harus dipikirkan berulang kali. Transisi dari pekerja migran menjadi migran kembali, bagi Bu Laeliyah, ditandai oleh upaya menyesuaikan diri dengan pola hidup baru yang lebih tidak stabil secara ekonomi sekaligus tuntutan untuk kembali hadir penuh dalam kehidupan keluarganya.

Saat itu, suasana rumah Bu Laeliyah cukup ramai oleh anak-anak yang sedang membeli es teh manis dan gorengan. Saya dipersilahkan masuk ke dalam rumah Bu Laeliyah dan duduk di kursi ruang tamu. "Sebentar ya, Mbak. Saya mau *ngangkat* gorengan dulu di dapur". Bu Laeliyah dengan agak tergesa-gesa pergi ke dapur, saya menyusul Bu Laeliyah ke dapur dan membantu Bu Laeliyah untuk mengangkat gorengan tersebut dan membawanya ke ruang tamu. Ruang tamu Bu Laeliyah dipenuhi barang-barang antik dan foto-foto lawas. Yang membuat saya tersentuh dan terdiam adalah putri beliau, yaitu Mbak Ziah yang mengidap *Cerebral Palsy*—sebuah kondisi lumpuh otak yang memengaruhi gerak tubuh manusia. Menurut Vitrikas (2020, dikutip dalam Kautsar, 2024: 2507), *Cerebral Palsy* merupakan kecacatan paling umum pada masa kanak-kanak yang mempengaruhi fungsi motorik akibat cedera pada otak yang sedang berkembang. Selama 30 tahun, Mbak Ziah menghabiskan hidupnya di kursi roda karena kondisinya tergolong parah karena Mbak Ziah kesulitan untuk berjalan dan berbicara. Saya menyapa Mbak Ziah dan Mbak Ziah tersenyum ke arah saya. Tanpa berlama-lama, saya melakukan wawancara dengan Bu Laeliyah mengenai pengalaman kepulangannya setelah delapan tahun bekerja di Taiwan. Dalam percakapannya, Bu Laeliyah menjelaskan bagaimana masa awal kepulangannya menjadi periode yang berat, terutama karena perubahan kondisi ekonomi dan pola hidup yang sangat berbeda dengan saat ia masih bekerja di luar negeri.

> Bu Laeliyah : "Awalnya 2009, akhir tahun desember. itu tuh demi kebutuhan anak ibu yang berkebutuhan khusus.
>
> Saya : "Waktu itu berangkatnya kemana bu?"
>
> Bu Laeliyah : "Taiwan."

> Bu Laeliyah : “Masalah rumah tangga itu karena perceraian, Dek. Waktu Ibu berangkat ke Taiwan, Ziah diurus sama yayasan. Yah, bapaknya ngasih jajan juga sih. Tapi nggak terlibat ngurusin langsung”.

Kisah Bu Laeliyah memperlihatkan bahwa keputusan untuk menjadi pekerja migran tidak semata-mata digerakkan oleh dorongan ekonomi umum, tetapi juga oleh kebutuhan personal yang sangat mendesak dan emosional—dalam hal ini, pengobatan anak dengan disabilitas. Statusnya sebagai janda dan orang tua tunggal mempertegas posisi rentan sekaligus kuat yang dimiliki perempuan dalam keluarga. Migrasi, dalam konteks ini, menjadi strategi survival yang kompleks: tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk merawat, menyelamatkan, dan mempertahankan martabat sebagai ibu dan manusia yang ingin memperbaiki hidup anaknya.

Pilihan Bu Laeliyah untuk “membereskan urusan rumah tangga” sebelum berangkat juga menunjukkan bahwa migrasi bukan tindakan spontan, melainkan keputusan strategis dengan perhitungan sosial, emosional, dan spiritual. Seperti informan lain, narasi Bu Laeliyah memperkuat temuan bahwa pekerja migran sering kali digerakkan oleh tuntutan sosial dan keluarga. Uang yang mereka hasilkan di luar negeri (remitansi) tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian moral terhadap keluarga (Mas’udah, 2019: 13).

Hasil wawancara saya dengan para purna migran menunjukkan bahwa masa kepulangan menjadi fase yang tidak kalah berat dibanding masa ketika mereka bekerja di luar negeri. Setelah bertahun-tahun hidup dengan pendapatan yang stabil, para informan harus menyesuaikan diri kembali pada kondisi ekonomi desa yang tidak menentu. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan bahwa pengeluaran rumah tangga harus diatur lebih ketat karena tidak ada lagi pemasukan bulanan seperti ketika bekerja di luar negeri. Proses kembali ke keluarga juga memerlukan waktu, terutama bagi mereka yang telah lama berpisah dengan anak atau pasangan. Untuk memahami dinamika masa kepulangan ini lebih jauh, saya melakukan wawancara dengan Bu Linda—seorang purna pekerja migran yang kembali ke Indramayu setelah bekerja di Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong selama hampir dua dekade.

Dari kisah Bu Linda dan Bu Laeliyah dapat dilihat bahwa kepulangan mereka sebagai purna migran menandai dimulainya kembali kehidupan yang berbeda dengan

masa ketika mereka bekerja di luar negeri. Setelah kontrak kerja mereka berakhir, alasan kepulangan keduanya berkaitan erat dengan kondisi keluarga dan keadaan fisik mereka. Bu Linda memilih menetap di Indramayu karena merasa tidak lagi sanggup mengikuti ritme kerja yang berat serta ingin kembali dekat dengan anak-anaknya setelah bertahun-tahun berpisah. Sementara itu, Bu Laeliyah memutuskan pulang untuk mengasuh anaknya yang berkebutuhan khusus karena merasa tidak tenang jika terus bekerja jauh dari rumah.

Sesampainya di desa, keduanya menghadapi perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penghasilan yang sebelumnya stabil setiap bulan berganti dengan ketidakpastian ekonomi, sehingga mereka harus lebih berhati-hati dalam mengatur kebutuhan rumah tangga. Rutinitas harian pun berubah: tempo kerja yang teratur dan padat ketika di luar negeri digantikan oleh ritme domestik yang lebih cair, membuat mereka perlu menyesuaikan diri kembali dengan kegiatan rumah, pengasuhan, dan peran keluarga. Pengalaman Bu Linda dan Bu Laeliyah menunjukkan bahwa kepulangan bukan sekadar perpindahan dari luar negeri ke desa asal, tetapi proses menata ulang kehidupan—baik dalam keluarga, pengelolaan ekonomi, maupun kebiasaan harian yang membentuk identitas mereka sebagai purna pekerja migran.

3.1.2 Dinamika Setelah Kembali ke Desa

Setiap informan mengalami proses kepulangan yang berbeda, tetapi keseluruhannya menunjukkan bahwa masa kembali ke desa tidak berlangsung secara mulus. Kepulangan bukan hanya urusan perjalanan fisik dari negara tempat bekerja menuju rumah, melainkan rangkaian penyesuaian yang dimulai sejak hari pertama mereka menjejakkan kaki di Indramayu. Pada fase ini, para purna migran kembali menemukan ritme keluarga, menghadapi perubahan ekonomi, dan berhadapan dengan situasi baru yang tidak mereka temui ketika masih bekerja di luar negeri. Proses inilah yang menjadi jembatan antara masa kerja mereka di luar negeri dan kehidupan setelah kembali, dan dari sini terlihat bagaimana setiap individu membangun kembali kesehariannya sebagai purna migran.

Setelah masa kontrak kerja berakhir, para purna TKW kembali ke desa dengan membawa pengalaman dan hasil kerja keras mereka di luar negeri. Namun, kepulangan

ini tidak serta merta berarti kehidupan berjalan mulus. Justru banyak di antara mereka yang mengalami perubahan drastis, terutama dalam hal mengatur keuangan sehari-hari. Jika sebelumnya mereka terbiasa dengan pemasukan rutin setiap bulan, maka di kampung halaman mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa gaji tetap. Bu Laeliyah menggambarkan perbedaan ini dengan jelas: "kalau di luar negeri enak, ngeluarin uang nggak takut, karena bulan depan pasti gaji masuk. Tapi kalau di sini harus hati-hati, soalnya pemasukan nggak tentu."

Pernyataan serupa datang dari Bu Linda (51 tahun), yang mengakui bahwa saat bekerja di luar negeri ia dapat mengatur kebutuhan pribadinya secara lebih leluasa, berbeda dengan di kampung halaman di mana hampir semua uang habis untuk kebutuhan keluarga. Bagi sebagian purna TKW lain, seperti Bu Uus (61 tahun), perasaan yang muncul setelah pulang justru adalah kegelisahan, karena uang hasil kerja yang dulu terlihat besar menjadi cepat berkurang ketika dipakai untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa adanya pemasukan tetap. Perubahan drastis ini membuat banyak purna TKW harus lebih berhati-hati, bahkan cenderung "pelit" dalam membelanjakan uang, karena mereka sadar bahwa kini tidak ada lagi kepastian gaji bulanan yang bisa diandalkan.

Kisah lain datang dari Bu Uus (61 tahun) yang berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2000 dan bekerja selama 18 bulan. Selama masa kontrak tersebut, ia rutin mengirimkan uang kepada keluarganya. Namun, ketika pulang, sebagian besar hasil kerjanya habis dipakai untuk membangun rumah. Ia mengakui tidak sempat mengalokasikan uang untuk usaha produktif.

> Saya : "Berarti rumah ibu ini hasil dari kerja ibu di Arab ya?"
>
> Bu Uus : "Iya betul. Rumah ini dibangun pakai uang saya, hasil kerja di Arab."
>
> Saya : "Mau tanya bu, memang iya kah kalau TKW pulang pasti bangun rumah?"
>
> Bu Uus : "Iya bangun rumah, cuman kalau kata orang tua dulu kalau (uangnya) buat usaha pasti habis, tapi kalau buat bangun rumah mah malah bagus. Jadi kalau buat usaha tuh cepet habis uangnya."

Akibatnya, setelah kepulangan, ia kembali bekerja serabutan demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Bu Uus pernah menjadi asisten rumah tangga di kampungnya

sendiri, berjualan es, hingga sesekali ikut “majengan” untuk membantu tetangga ketika ada hajatan.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana rumah sebagai simbol keberhasilan migrasi tidak selalu diikuti dengan stabilitas ekonomi. Bagi Bu Uus, rumah yang berhasil dibangun memang menjadi kebanggaan, tetapi pada saat yang sama ia masih harus berjuang memenuhi kebutuhan harian dengan pekerjaan informal. Hal ini kontras dengan pengalaman saat masih bekerja di luar negeri, ketika ada kepastian gaji bulanan yang membuatnya lebih leluasa dalam mengatur pengeluaran.

Pengalaman Bu Uus menunjukkan bahwa transisi dari pekerja migran ke purna TKW kerap ditandai dengan rasa “kehilangan”—tidak hanya kehilangan penghasilan tetap, tetapi juga kehilangan identitas sebagai pencari nafkah utama. Tekanan itu semakin berat karena usianya yang sudah tidak memungkinkan untuk kembali berangkat ke luar negeri. Dengan demikian, kepulangannya tidak hanya soal “pulang kampung,” tetapi juga soal beradaptasi dengan keterbatasan baru di lingkungan asal.

Pengalaman Bu Uus memperlihatkan bagaimana kepulangan purna TKW tidak selalu diikuti dengan kestabilan ekonomi. Rumah yang berhasil dibangun memang menjadi simbol keberhasilan, tetapi tidak menjamin keberlanjutan penghidupan. Tanpa adanya tabungan atau usaha kecil yang bisa menopang, ia harus kembali pada pekerjaan informal yang sifatnya sementara dan tidak menentu.

Selain perubahan dalam pola ekonomi, kepulangan juga membawa konsekuensi sosial. Di satu sisi, keberhasilan membangun rumah atau membeli kendaraan membuat mereka dipandang sebagai sosok yang berhasil. Seperti dikatakan Bu Linda, “kalau di kampung ada rumah bagus, orang pasti mikir itu rumah TKW.” Rumah, emas, atau barang elektronik hasil kerja di luar negeri menjadi simbol status yang mudah dikenali oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, masih ada stigma yang melekat. Hasil kerja keras itu membuatnya mampu membeli rumah BTN dan menata kembali kehidupan keluarga setelah sempat terpuruk. *“Saya bersyukur bisa beli rumah sendiri dari hasil kerja di luar negeri. Walau orang suka bilang TKW itu babu, tapi bagi saya, yang penting anak-anak bisa sekolah dan punya tempat tinggal yang layak,”* ungkapnya saat wawancara (12 Juni 2024).

Meski demikian, kepulangan Bu Linda tidak sepenuhnya membawa kenyamanan. Di desanya, keberadaan rumah BTN dan perhiasan emas yang ia beli memang dianggap sebagai tanda keberhasilan. *"Kalau di kampung ada rumah bagus, orang pasti mikir itu rumah TKW,"* ujarnya. Namun, pada saat yang sama, ia sering merasa dilekati stigma negatif. Menurutnya, sebagian tetangga masih memandang rendah mantan TKW karena pekerjaan di luar negeri identik dengan "babu." Ambivalensi ini membuat Bu Linda bangga sekaligus tersisih: bangga karena mampu bertahan hidup dan membesarkan anak-anaknya dengan mandiri, tetapi tersisih karena status sosial TKW yang dianggap rendah oleh sebagian orang.

Cerita yang tidak kalah menarik datang dari Bu Laeliyah (50 tahun). Ia memutuskan berangkat ke Taiwan setelah perceraian dengan suaminya, sebuah keputusan yang menurutnya terpaksa diambil karena harus menanggung seorang anak berkebutuhan khusus. Dalam wawancara, ia mengingat bagaimana dulu hidupnya terasa lebih tenang ketika bekerja di luar negeri. Gaji bulanan yang teratur memberinya rasa aman, seolah apa pun yang ia keluarkan pasti akan kembali tertutup oleh pemasukan bulan berikutnya. *"Kalau di luar negeri enak, ngeluarin uang nggak takut, karena bulan depan pasti gaji masuk,"* tuturnya dengan nada setengah bernostalgia.

Namun, suasana berubah drastis setelah ia kembali ke Indramayu. Kepulangan itu memperlihatkan kenyataan bahwa kehidupan di kampung tidak bisa lagi dijalani dengan cara yang sama. Tanpa adanya gaji bulanan, setiap rupiah harus dihitung dengan hati-hati. Bu Laeliyah sering merasa bahwa dirinya kini jauh lebih hemat, bahkan cenderung dinilai pelit oleh tetangga sekitar. Ia menuturkan bagaimana dirinya kerap membatasi pengeluaran, terutama karena kebutuhan anaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ketika bercerita, ia menekankan bahwa sebagian besar uang yang ia simpan dialokasikan untuk anak, mulai dari biaya sekolah hingga perawatan medis yang tidak murah.

Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini tampak jelas. Jika dulu di Taiwan ia bisa membeli barang tanpa rasa khawatir, kini di kampung setiap keputusan pembelian selalu melewati pertimbangan panjang. Ia menggambarkan situasi itu sebagai masa yang penuh keterbatasan, di mana dirinya tidak lagi menjadi "pekerja migran dengan gaji rutin," melainkan seorang ibu sekaligus tulang punggung keluarga yang harus menjaga

agar uang yang dibawa pulang tidak cepat habis. Suasana rumah sederhana tempat ia tinggal, dengan perabot yang sebagian besar hasil dari jerih payahnya di luar negeri, menjadi pengingat terus-menerus akan perbedaan hidupnya dulu dan sekarang.

3.2 Praktik Pengelolaan Uang Setelah Kepulangan

Setelah kembali dari luar negeri, sebagian besar purna TKW menghadapi kenyataan bahwa uang yang mereka bawa pulang lebih banyak terserap untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kehidupan di desa berbeda jauh dari situasi ketika bekerja di luar negeri, karena tidak ada lagi gaji bulanan yang pasti. Hal ini membuat mereka harus mengatur uang dengan sangat hati-hati agar bisa bertahan.

Kepulangan pekerja migran tidak hanya menandai berakhirnya masa kerja di luar negeri, tetapi juga membuka babak baru dalam kehidupan ekonomi mereka di desa asal. Di titik ini, remitan—uang hasil kerja yang dikirim atau dibawa pulang—bertransformasi menjadi fondasi utama dalam membangun kembali kehidupan pasca migrasi. Bagi banyak perempuan di Lohbener, uang bukan sekadar alat transaksi, tetapi jejak dari perjuangan, pengorbanan, dan nilai moral yang melekat pada setiap lembarannya. Setiap keputusan untuk menggunakan uang itu—apakah untuk membangun rumah, membuka warung, membantu keluarga, atau sekadar memenuhi kebutuhan harian—tidak lahir dari perhitungan ekonomi semata, melainkan juga dari relasi sosial dan makna kultural yang mereka bangun selama bertahun-tahun bekerja jauh dari rumah.

Dalam konteks masyarakat Indramayu, pengelolaan uang remitan memiliki arti sosial yang kuat. Rumah, tanah, atau bahkan perabot yang dibeli dari hasil kerja di luar negeri kerap dijadikan simbol keberhasilan dan penanda status sosial di mata lingkungan sekitar. Namun, di sisi lain, tidak semua purna pekerja migran berhasil mengonversi hasil kerja mereka menjadi stabilitas ekonomi jangka panjang. Sebagian di antara mereka harus kembali menghadapi realitas ekonomi yang rapuh, di mana uang yang dulu diperoleh dengan susah payah perlahan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah dinamika ini, praktik pengelolaan remitan menjadi cermin bagaimana perempuan purna migran menegosiasikan antara logika ekonomi dan tuntutan moral terhadap keluarga.

Bab ini menguraikan berbagai bentuk praktik pengelolaan uang setelah kepulangan para informan ke desa asal. Melalui kisah-kisah yang mereka sampaikan, tampak bahwa remitan tidak berhenti pada fungsi materialnya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun citra diri, memperkuat posisi sosial, dan menjaga kehormatan keluarga. Uang hasil kerja di luar negeri mengandung narasi panjang tentang kerja keras, tanggung jawab, dan cita-cita untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, memahami bagaimana purna pekerja migran mengelola uangnya berarti memahami bagaimana mereka membangun ulang relasi dengan keluarga, desa, dan identitas mereka sendiri setelah masa migrasi berakhir.

3.2.1 Penggunaan Remitan untuk Konsumsi dan Kebutuhan Keluarga

Kepulangan seorang pekerja migran tidak hanya membawa cerita tentang hasil jerih payah di negeri orang, tetapi juga tentang bagaimana uang hasil kerja itu dialirkan kembali ke rumah tangga dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase awal setelah kepulangan, sebagian besar purna pekerja migran di desa Lohbener mengarahkan remitan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga—seperti perbaikan rumah, biaya sekolah anak, atau membantu orang tua yang masih memiliki tanggungan ekonomi. Dalam konteks ini, remitan tidak semata berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap keluarga di kampung halaman.

Bagi banyak perempuan, keputusan tentang bagaimana uang itu digunakan sering kali dipandu oleh nilai-nilai pengabdian dan kasih terhadap keluarga, bukan semata perhitungan ekonomi. Hal ini tampak jelas pada kisah Bu Diah, yang sejak awal keberangkatannya bekerja di luar negeri didorong oleh keinginan untuk membantu melunasi utang orang tuanya dan memastikan mereka hidup lebih layak. Penggunaan uang remitan yang difokuskan pada kebutuhan keluarga mencerminkan bahwa uang bagi purna pekerja migran tidak pernah netral: ia selalu membawa nilai-nilai moral, afeksi, dan tanggung jawab yang melekat pada relasi sosial di dalam rumah tangga.

Bu Laeliyah (50 tahun), misalnya, menggambarkan perbedaan tajam antara kehidupan di Taiwan dengan di kampung halaman. Selama delapan tahun di Taiwan, ia terbiasa hidup dengan kepastian gaji bulanan. *"Kalau di luar negeri enak, ngeluarin uang nggak takut, karena bulan depan pasti gaji masuk. Tapi kalau di sini harus hati-hati,*

soalnya pemasukan nggak tentu," tuturnya (Wawancara dengan Bu Laeliyah, 3 Juni 2025). Setelah pulang, uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari, terutama biaya perawatan anaknya yang berkebutuhan khusus. Kondisi ini membuatnya jauh lebih hemat, bahkan kadang dianggap pelit oleh tetangganya. Namun, baginya, kehati-hatian adalah satu-satunya cara agar uang tidak cepat habis.

Hal yang sama dialami Bu Linda (51 tahun). Selama bekerja di Taiwan dan Hongkong, ia bisa dengan leluasa menggunakan uang untuk kebutuhan pribadinya. Tetapi setelah kembali, pengeluaran hampir seluruhnya diarahkan untuk keluarga. Ia mengatakan: *"Kalau di luar negeri kan kita lebih mikir kebutuhan sendiri, tapi kalau sudah pulang ya semua buat keluarga. Jadi uang cepat habis, apalagi anak-anak sekolah dan butuh macam-macam."* (Wawancara dengan Bu Linda, 3 Juni 2025). Dengan kata lain, orientasi konsumsi bergeser dari individual ke kolektif: uang bukan lagi untuk dirinya, melainkan untuk menopang kebutuhan keluarga yang lebih luas.

Kondisi konsumsi juga diwarnai dengan rasa cemas akan habisnya uang tanpa ada pemasukan baru. Bu Uus (61 tahun) menceritakan bahwa setelah pulang, uang yang ia miliki cepat habis untuk kebutuhan pokok. Tanpa gaji bulanan, ia merasa sulit menjaga kestabilan ekonomi. Sore itu, pada tanggal 9 Agustus 2025, saya mengunjungi rumah Bu Uus mengendarai sepeda motor. Rumah Bu Uus terletak sekitar 500 meter dari rumah Bu Laeliyah. Suasana rumah Bu Uus saat itu sedikit ramai, ayam-ayam berkeliaran di pekarangan rumah, kemudian seekor kucing mendekati saya disusul cucu Bu Uus yang bernama Ivan datang untuk menggendong kucing itu dan membawa kedalam rumah, Ivan berteriak kepada ibunya, yaitu Mbak Deva, memberitahukan bahwa saya sudah sampai dirumah. Saya mengetuk pintu rumah Bu Uus, kemudian mengucapkan salam. Anak Bu Uus yang bernama Mbak Deva mempersilahkan saya untuk duduk di teras rumah, sementara Mbak Deva ingin pergi ke warung untuk membelikan saya es. Tak lama kemudian, Bu Uus datang membawa kantong plastik berisi risol dan samosa. Saya menyambut Bu Uus dan mencium tangannya. Setelah bertukar kabar, Bu Uus memberikan saya sebuah risol dan kami berbincang. Obrolan kami sore itu membahas mengenai pengalaman migrasi internasional yang dilakukan oleh Bu Uus, ia bercerita bahwa ia pernah menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Hal menarik yang saya temukan

dari perbincangan saya dengan Bu Uus adalah bagaimana cara Bu Uus melakukan praktik pengelolaan uang setelah beliau menjadi seorang migran kembali.

> Saya : “Berarti rumah ibu hasil dari kerja di arab ya?”
>
> Bu Uus : “Iya betul. Ini dibangun pake uang saya hasil kerja di Arab.”
>
> Saya : “Mau tanya bu, emang iya kah kalo tkw pulang pasti bangun rumah?”
>
> Bu Uus : “Iya bangun rumah, cuman kalo kata orang luar kalo buat usaha pasti habis, tapi kalo buat bangun rumah mah malah bagus. Jadi kalo buat usaha tuh cepet habis uangnya.” (Wawancara dengan Bu Uus, 9 Agustus 2025).

Situasi ini membuatnya harus kembali bekerja serabutan, seperti berjualan es atau menjadi ART di kampung sendiri, hanya demi mencukupi kebutuhan harian. Bagi Bu Uus, rumah menjadi satu-satunya bukti nyata dari hasil kerja keras di negeri orang. Sebelum memutuskan menjadi seorang pekerja migran, Bu Uus, suami dan anaknya tinggal di rumah ibu dari Bu Uus. Setelah menjadim migran kembali, rumah yang dibangun oleh penghasilan Bu Uus sewaktu menjadi pekerja migran menjadi simbol keberhasilan dan kebanggaan di tengah lingkungan sosialnya. Namun, di balik tembok rumah itu, kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah. Setelah uang hasil migrasi habis untuk pembangunan rumah, ia kembali dihadapkan pada kenyataan ekonomi desa yang serba terbatas. Tidak ada lagi gaji rutin setiap bulan seperti saat bekerja di Arab, dan seluruh kebutuhan rumah tangga harus ditopang dari pekerjaan kecil yang ia jalani sendiri.

Menjelang sore hari, Bu Uus menyiapkan barang-barang dagangan seperti es dan cemilan, kemudian menata rapi rak didepan rumahnya. Bu Uus berjualan di depan rumahnya sendiri. Kadang ia juga membantu tetangga yang sedang punya hajatan, menjadi buruh masak atau tukang bersih-bersih, dengan bayaran yang tidak selalu berupa uang—kadang nasi kotak, kadang lauk untuk makan malam. “Ya se-dikasihnya aja mbak, kadang nggak dikasih uang tapi dapet makanan, dapet uang juga, dapet dua duanya ya pernah juga,” ujarnya pelan saat menceritakan rutinitasnya. (Wawancara dengan Bu Uus, 9 Agustus 2025).

Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin terlihat sebagai “penurunan” atau *downgrade* setelah bekerja di luar negeri. Namun bagi Bu Uus, pulang dan tetap bisa

hidup mandiri di rumah hasil kerja sendiri adalah bentuk pencapaian tersendiri. Ia tidak menyesal uangnya habis untuk bangun rumah, karena baginya rumah adalah sesuatu yang "tidak akan hilang." Rumah menjadi tanda bahwa kerja kerasnya di Arab tidak sia-sia, meski kini ia harus kembali menjalani pekerjaan serabutan dengan penghasilan tak menentu. Dalam pandangannya, uang boleh habis, tapi rumah adalah simbol keberlanjutan, bukti bahwa dirinya pernah berjuang jauh dari rumah demi membangun satu untuk dirinya sendiri.`

Dalam beberapa kasus lain, pola konsumsi tidak hanya terkait dengan kebutuhan pokok, tetapi juga dengan suatu upaya balas budi pada keluarga. Bu Diah, misalnya, menyisihkan beberapa persen dari gajinya selama menjadi pekerja migran kepada orang tua, dikarenakan orang tua dari Bu Diah memiliki banyak hutang sehingga Bu Diah merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu meringankan beban keluarga. Setiap kali menerima gaji, sebagian ia kirimkan ke kampung untuk menutup cicilan pinjaman dan kebutuhan sehari-hari orang tuanya. Motivasi itu membuat Bu Diah tidak terlalu memikirkan berapa banyak yang bisa ia tabung untuk dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah melihat orang tuanya tidak lagi berutang dan bisa hidup lebih tenang. Kepuasan moral yang ia rasakan jauh lebih besar daripada hasil materi yang ia kumpulkan. Maka ketika masa kontraknya selesai dan ia memutuskan untuk pulang, ia tidak membawa banyak uang, tetapi membawa perasaan lega karena sudah menunaikan niat yang sejak awal menjadi alasan keberangkatannya. Praktik ini memperlihatkan bahwa konsumsi purna TKW tidak selalu bermakna konsumsi pribadi, melainkan juga konsumsi kolektif keluarga, terutama untuk kepentingan jangka panjang seperti pendidikan adiknya.

Sore hari itu, saya berkunjung ke warung Bu Diah untuk melakukan observasi dan wawancara. Warung tersebut terletak di depan Masjid Istiqomah, desa Lohbener—sebuah lokasi yang strategis karena berdekatan dengan jalur utama yang sering dilalui rombongan ziarah dan pengunjung dari luar kota. Saya bertanya kepada salah satu peserta ziarah tersebut, beliau menjelaskan bahwa rombongannya telah menghadiri pengajian di Jakarta dan memutuskan untuk istirahat di Indramayu, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Indramayu Kota untuk menghadiri pengajian dalam rangka ulang tahun salah satu pesantren di daerah Indramayu Kota. Niat saya mendatangi warung Bu Diah untuk

melakukan observasi dan wawancara, tak lama warungnya ramai pembeli oleh rombongan ziarah. Dengan cepat saya membantu Bu Diah untuk melayani pembeli. Ramainya pembeli tentu saja membuat kami kewalahan, di satu sisi saya harus bolak-balik rumah Bu Diah untuk mengambil air panas karena lonjakan pesanan. Saya juga mengambil stok air mineral ukuran biasa dan ukuran besar di warung sebelah rumah Bu Diah. Orang-orang dari rombongan ziarah tersebut banyak memesan teh, kopi, dan air mineral. Pukul 20.30, rombongan ziarah mulai meninggalkan lingkungan masjid dan berangkat ke pondok pesantren. Puji Tuhan, segala lelah kami di hari itu terbayarkan dengan barang dagangan Bu Diah yang laris.

Keesokan harinya, pada tanggal 5 September 2025, saya kembali mendatangi kediaman Bu Diah untuk melakukan wawancara lanjutan. Sore itu udara di desa Lohbener terasa hangat, jalanan di depan rumah Bu Diah masih ramai oleh anak-anak yang bermain sepulang sekolah. Rumahnya sederhana, berdinding tembok berwarna putih dengan gerobak yang terletak di teras rumah. Di ruang tamu, saya disambut dengan senyum ramah Bu Diah yang tengah menyiapkan tiga gelas teh hangat.

Tak lama kemudian, datang seorang perempuan lain yang sudah saya hubungi beberapa hari sebelumnya—Bu Neni, salah satu informan lain dalam penelitian ini. Kami memang telah bersepakat untuk melakukan wawancara bersama di rumah Bu Diah agar suasananya lebih santai. Bu Neni merupakan mantan pekerja migran di negara Arab Saudi yang berangkat pada tahun 1992. Keduanya merupakan kakak dan adik; sesekali saling bercanda sambil membicarakan kenangan masa kerja mereka di luar negeri. Percakapan sore itu dimulai dengan ringan, membahas kegiatan mereka sehari-hari setelah pulang dari migrasi, sebelum akhirnya beralih pada topik utama mengenai pengalaman kerja, pengelolaan uang, dan kehidupan setelah menjadi purna pekerja migran.

Wawancara ini dimulai dari Bu Diah yang bercerita soal awal keberangkatan dan motivasi untuk menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Kemudian, Bu Diah lanjut menceritakan kisahnya saat bekerja di sana—bagaimana ia bertahan dalam rutinitas panjang sebagai asisten rumah tangga dan menyesuaikan diri dengan kehidupan majikannya yang jauh berbeda dari kebiasaan di desa. Ia bercerita dengan nada datar namun matanya sesekali menerawang, seolah mengingat betapa beratnya tahun-tahun pertama di negeri orang. Di tengah cerita itu, Bu Diah kemudian mulai menyinggung

alasan yang sebenarnya membuatnya kuat bertahan: keinginan membantu orang tua yang terlilit utang dan membiayai adik-adiknya agar bisa sekolah lebih tinggi.

> Saya : “Yang bikin ibu terinspirasi pengen berangkat ke Arab selain itu apa?”
>
> Bu Diah : “Dulu bapak saya banyak hutang, jadi pengen membantu nutupin hutang bapak biar nggak ada tanggungan. Alhamdulillah lunas semua.”
>
> Saya : “Setelah ibu kerja di Arab, ada perubahan gak di segi ekonomi ibu?”
>
> Bu Diah : “Ada, terutama buat orang tua.”
>
> Saya : “Waktu ibu pulang ada pemikiran untuk bikin tabungan gitu, gak?”
>
> Bu Diah : “Iya sih pengennya mah, tapi uang nya saya kasihin terus ke orang tua. Jadi saya ngga berani minta kalo uangnya udah dikasih ke orang tua. Yang penting ada uang buat mereka.”

Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana motivasi ekonomi Bu Diah tidak bisa dilepaskan dari rasa tanggung jawab terhadap keluarga, terutama terhadap orang tuanya. Sejak awal keberangkatannya ke Arab Saudi, Bu Diah memaknai kerja migrasi bukan semata sebagai pencarian penghasilan pribadi, melainkan sebagai bentuk pengabdian anak kepada orang tua. Ucapan “pengen membantu nutupin hutang bapak biar nggak ada tanggungan” menandakan adanya dorongan moral yang kuat untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga, yang dalam konteks masyarakat pedesaan kerap dianggap sebagai kewajiban anak sulung.

Keputusan Bu Diah untuk menyerahkan seluruh pendapatannya kepada orang tua memperlihatkan pola remitan konsumtif yang bermakna afektif. Dalam hal ini, uang tidak lagi netral sebagai alat ekonomi, melainkan sarat dengan nilai-nilai sosial dan emosional. Ia menyebut, “Yang penting ada uang buat mereka,” sebagai penegasan bahwa kebahagiaan dan kestabilan orang tua menjadi tujuan utama, bahkan lebih penting daripada menabung untuk diri sendiri.

Situasi ini juga memperlihatkan relasi kepercayaan yang tinggi antara Bu Diah dan keluarganya. Ia tidak pernah menuntut atau menanyakan kembali uang yang telah dikirim, karena di balik tindakan itu ada keyakinan bahwa pengorbanan demi orang tua akan membawa kebaikan tersendiri. Dalam masyarakat seperti Lohbener, pengiriman uang kepada orang tua sering dimaknai sebagai wujud bakti dan cara menjaga nama baik

keluarga. Dengan demikian, remitan yang dikirim oleh Bu Diah tidak hanya berperan dalam menopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai medium menjaga kehormatan keluarga di mata sosial desa.

Kejadian serupa juga dialami oleh Bu Neni, selaku kakak dari Bu Diah yang menjadikan remitan sebagai konsumsi dan kebutuhan keluarga. Cerita tentang bagaimana remitan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan keluarga juga tampak pada pengalaman Bu Neni, kakak dari Bu Diah. Jika Bu Diah mengalokasikan penghasilannya langsung kepada orang tua untuk melunasi utang dan membantu pendidikan adiknya, maka Bu Neni menunjukkan pola yang sedikit berbeda namun masih berakar pada nilai tanggung jawab keluarga yang sama. Ia tidak hanya menyerahkan pengelolaan uangnya kepada orang tua dan anak, tetapi juga mempercayakan seluruh keputusan ekonomi keluarga pada ayahnya yang dianggap lebih paham soal keuangan rumah tangga.

Berbeda dengan Bu Diah yang setelah kepulangan berinisiatif membuka warung dengan tabungan sendiri, Bu Neni justru mengalami bentuk pengelolaan remitan yang lebih berjarak—di mana peran dirinya sebagai pengirim uang dan ayahnya sebagai pengatur keuangan berjalan dalam relasi saling percaya. Namun, pada akhirnya, hasil dari kerja keras itu tetap kembali ke rumah dan menjadi milik bersama keluarga. Melalui perantaraan ayahnya, sebagian uang hasil kerjanya digunakan untuk membangun warung di depan rumah, yang kemudian menjadi tumpuan ekonomi keluarga setelah Bu Neni berhenti bekerja di luar negeri.

> Saya : “Dari gaji ibu disisihin berapa untuk nabung?”
>
> Bu Neni : “Ya kalo itu, almarhum bapak saya yang megang, bukan saya. Jadi uang saya dikirim semua ke bapak jadi bapak yang megang.”
>
> Saya : “Berarti ibu bilang ke bapak kalo minta disisihin untuk bikin warung?”
>
> Bu Neni : “Iya betul. Kan dibikinin warung didepan rumah waktu itu.”
>
> Saya : “Tapi balik modal gak bu?”
>
> Bu Neni : “Kalo balik modal enggak, karena banyak yang makan (uangnya).”
>
> Saya : “Tapi kalo nambahin sedikit sedikit mah bisa kan?”

> Bu Neni : “Bisa. Untuk kehidupan ibu dan anak-anak. Juga bisa nyumbang orang tua waktu itu karena rumahnya *paving block* nya mau di renovasi. Sama buat biaya kuliah adek saya.”

Kisah Bu Neni memperlihatkan bagaimana praktik pengelolaan uang di kalangan purna pekerja migran tidak selalu berlangsung secara individual, melainkan kerap melibatkan figur keluarga yang dipercaya. Dalam kasusnya, seluruh hasil kerja di luar negeri diserahkan kepada almarhum ayahnya untuk dikelola. Keputusan ini menunjukkan adanya struktur kepercayaan dan hierarki dalam keluarga yang masih kuat, di mana peran kepala keluarga dianggap paling berwenang menentukan arah penggunaan uang. Bagi Bu Neni, tindakan menyerahkan seluruh remitannya bukan bentuk ketidakmandirian, melainkan ekspresi bakti dan penghormatan terhadap orang tua.

Uang yang dikelola sang ayah kemudian dialokasikan untuk membangun warung kecil di depan rumah, sebuah bentuk investasi yang sederhana namun sarat makna. Warung itu menjadi simbol nyata hasil kerja Bu Neni di luar negeri—meski tidak sepenuhnya menghasilkan keuntungan ekonomi, ia tetap memiliki nilai moral dan sosial bagi keluarga. Kalimatnya, “banyak yang makan (uangnya),” menggambarkan bagaimana pendapatan dari warung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan harian dan membantu anggota keluarga lain, seperti biaya kuliah adik dan renovasi rumah orang tua. Dengan demikian, fungsi ekonomi warung ini tidak terletak pada laba finansial, tetapi pada kemampuannya menopang keberlangsungan hidup keluarga besar.

Melalui kisah Bu Neni, tampak bahwa remitan tidak hanya diubah menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi sarana memperkuat jaringan solidaritas keluarga. Pengelolaan uang dalam lingkup keluarga besar seperti ini memperlihatkan bagaimana logika ekonomi rumah tangga di desa bekerja: uang beredar tidak untuk akumulasi, melainkan untuk memastikan semua anggota keluarga dapat bertahan. Dalam konteks ini, warung yang dibangun dari hasil kerja Bu Neni bukan sekadar tempat berdagang, tetapi juga ruang sosial yang menegaskan nilai gotong royong, kasih, dan tanggung jawab yang dibawa pulang oleh para perempuan migran setelah masa kerjanya di luar negeri.

Kisah-kisah tersebut menggambarkan bahwa pola konsumsi para purna pekerja migran setelah kepulangan sangat dipengaruhi oleh perubahan ritme ekonomi—dari kepastian gaji rutin menjadi ketidakpastian pemasukan di kampung halaman. Uang yang

dulunya terasa cukup kini cepat habis, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan keluarga dan tanggungan sosial di sekitar mereka. Dalam konteks ini, konsumsi bukan semata bentuk pengeluaran ekonomi, melainkan wujud dari tanggung jawab moral terhadap keluarga yang telah mereka tinggalkan selama bertahun-tahun.

Bagi banyak perempuan pekerja migran, uang yang dikirim atau dibawa pulang bukan hanya alat tukar, tetapi simbol kasih sayang, bakti, dan cara mereka menegaskan peran sebagai anak atau ibu yang mampu membalas jerih payah keluarga. Remitan berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial—mengalir dari luar negeri menuju rumah tangga yang menunggu di desa, dan menghidupi ikatan emosional di antara mereka. Dengan demikian, praktik konsumsi pasca migrasi tidak bisa dipahami semata sebagai perilaku ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang sarat makna dan nilai.

Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa bagi purna pekerja migran, uang tidak berhenti pada fungsi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagian dari mereka berusaha mengubah remitan menjadi bentuk investasi jangka panjang—baik dalam bentuk rumah, usaha kecil, maupun aset keluarga lainnya—sebagai cara untuk menjamin keberlangsungan ekonomi setelah sumber pendapatan utama mereka berakhir.

3.2.2 Investasi dalam Aset dan Properti

Bagi sebagian migran kembali, kepulangan ke tanah air tidak berhenti pada urusan membayar utang atau memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Di balik setiap lembar uang yang dikirim dan disimpan, tersimpan pula cita-cita untuk memiliki sesuatu yang lebih permanen—sebuah rumah, tanah, atau usaha kecil yang dapat menjadi penopang kehidupan setelah masa kerja di luar negeri berakhir. Dalam pandangan banyak perempuan di Lohbener, memiliki rumah sendiri atau aset nyata merupakan bukti keberhasilan moral sekaligus simbol sosial yang menunjukkan hasil dari perjuangan di negeri orang.

Investasi dalam bentuk rumah atau warung tidak hanya dilihat sebagai upaya ekonomi, melainkan juga sebagai cara untuk meneguhkan identitas sebagai “mantan TKW yang berhasil.” Rumah menjadi semacam monumen yang menandai kerja keras mereka, sementara usaha kecil seperti warung atau empang berfungsi sebagai sumber pendapatan yang diharapkan bisa menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Dengan kata

lain, remitan yang dikonversi menjadi aset fisik merupakan wujud konkret dari harapan mereka agar hasil kerja keras di luar negeri tidak lenyap begitu saja setelah kepulangan.

Namun, tidak semua upaya investasi tersebut berjalan sesuai harapan. Ada yang berhasil membangun rumah dan memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitar, tetapi ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa hasil kerja mereka habis sebelum sempat diwujudkan menjadi aset. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana pengelolaan remitan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, hubungan keluarga, serta kemampuan individu dalam menavigasi ketidakpastian ekonomi di kampung halaman.

Selain untuk konsumsi harian, sebagian migran kembali juga mengalokasikan uang hasil migrasi mereka untuk aset jangka panjang seperti rumah, tanah, atau emas. Aset ini menjadi penanda keberhasilan, sekaligus jaminan yang bisa dibanggakan di desa. Namun, bagi sebagian perempuan, bentuk investasi ini tidak selalu diwujudkan dalam skala besar. Ada pula yang memilih langkah sederhana, seperti membuka usaha kecil dengan modal dari tabungan remitan. Pilihan ini bukan semata karena keterbatasan dana, melainkan karena keinginan untuk tetap produktif tanpa harus meninggalkan keluarga lagi.

Bu Diah adalah salah satu di antaranya. Setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi, ia menggunakan sisa tabungan hasil migrasinya untuk membuka warung kecil di depan Masjid Istiqomah, tidak jauh dari rumahnya di Desa Lohbener. Usaha itu menjadi bentuk transformasi remitan yang paling realistis baginya—tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai cara untuk menegaskan keberadaannya di tengah kehidupan sosial desa. Bagi Bu Diah, warung itu lebih dari sekadar tempat berdagang; ia adalah simbol kerja keras, kenangan masa migrasi, dan wujud nyata dari hasil tangan sendiri yang kini bisa dinikmati tanpa harus jauh dari keluarga.

> Saya : “Waktu ibu pulang ada pemikiran untuk bikin tabungan gitu gak?”
>
> Bu Diah : “Iya sih pengennya mah, tapi uang nya saya kasihin terus ke orang tua. jadi saya ngga berani minta kalo uangnya udah dikasih ke orang tua. Yang penting ada uang buat mereka.”
>
> Saya : “Nah kalo warung yang di masjid itu, modalnya dari ibu sendiri atau hasil dari kerja TKW?”

> Bu Diah : “Iya. Modal sendiri. Modalnya 5jt an, sudah kontrakan sama isinya. Dari tahun 2010. Gantiin Ibu Neni disitu.”
>
> Saya : “Sebelum ibu jualan, ibu ngapain?”
>
> Bu Diah : “Saya sebelum jualan di warung, jualan dirumah dulu sama nerima orderan bikin peyek. alhamdulillah itu hasil nabung selama bertahun tahun kekumpul 5jt dan gantiin ibu neni jualan diwarung sampe sekarang.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pendapatan Bu Diah selama bekerja di luar negeri diserahkan kepada orang tuanya, ia tetap memiliki kesadaran untuk menabung sedikit demi sedikit. Kalimatnya, “uangnya saya kasihin terus ke orang tua... yang penting ada uang buat mereka,” menggambarkan bentuk pengabdian yang kuat kepada keluarga, di mana prioritas utama bukan dirinya sendiri, melainkan kesejahteraan orang tua. Dalam konteks sosial Indramayu, tindakan seperti ini tidak semata dipahami sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai bakti anak terhadap orang tua yang menjadi landasan moral banyak perempuan migran.

Namun, di balik sikap pasrah terhadap pengelolaan uang oleh orang tua, Bu Diah menunjukkan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi setelah kepulangan. Ia memanfaatkan sisa tabungan hasil kerja di Arab—yang berhasil ia kumpulkan perlahan dari orderan peyek dan jualan di rumah—untuk membuka warung kecil di depan Masjid Istiqomah. Warung itu didirikannya pada tahun 2010 dengan modal sekitar lima juta rupiah, menggantikan posisi kakaknya, Bu Neni, yang sebelumnya berdagang di tempat yang sama.

Kisah Bu Diah memperlihatkan bahwa investasi bagi purna pekerja migran tidak selalu berwujud aset besar seperti rumah atau tanah, melainkan bisa hadir dalam bentuk usaha mikro yang dikelola dengan kedekatan sosial dan rasa tanggung jawab. Warung kecil itu menjadi bukti nyata dari hasil kerja kerasnya selama di luar negeri—menjadi sumber penghasilan harian sekaligus ruang interaksi sosial dengan warga sekitar. Dari meja warung sederhana di depan masjid, Bu Diah membangun kembali ritme hidupnya yang baru, menegosiasikan peran antara mantan pekerja migran dan perempuan desa yang berdaya, tanpa meninggalkan nilai-nilai pengabdian yang membentuk identitasnya sejak awal keberangkatan.

Kisah serupa yang dialami Bu Neni memperlihatkan bentuk lain dari transformasi remitan menjadi aset keluarga. Setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi, seluruh gajinya dikirim kepada ayahnya untuk dikelola. Sebagian uang itu kemudian digunakan untuk membangun warung kecil di depan rumah mereka, yang hingga kini masih menjadi sumber penghasilan keluarga. Meskipun hasil dari usaha tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan secara ekonomi, karena sebagian besar keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, warung itu tetap menyimpan nilai penting bagi keluarga Bu Neni.

Dalam skala yang lebih luas, warung kecil itu bukan hanya bentuk investasi material, melainkan juga simbol keberhasilan moral—bukti bahwa hasil kerja di luar negeri benar-benar diwujudkan dalam sesuatu yang nyata di kampung halaman. Keputusan untuk menyerahkan kendali keuangan pada ayahnya juga mencerminkan kuatnya struktur keluarga patriarkal dalam pengelolaan remitan, di mana figur laki-laki masih dianggap paling berwenang dalam menentukan arah penggunaan uang. Namun di balik itu, Bu Neni tetap menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangganya melalui warung tersebut, menjadikannya contoh bagaimana perempuan migran menegosiasikan nilai bakti dan kemandirian ekonomi dalam satu waktu.

Pernyataan Bu Uus juga memperlihatkan bagaimana rumah menjadi bentuk investasi paling ideal bagi banyak purna pekerja migran. Dalam pandangannya, membangun rumah tidak hanya berarti memiliki tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga menandai keberhasilan moral setelah bertahun-tahun bekerja jauh dari keluarga. Kalimatnya, "kalo buat usaha pasti habis, tapi kalo buat bangun rumah mah malah bagus," mencerminkan keyakinan umum di kalangan perempuan migran Indramayu: bahwa uang hasil kerja di luar negeri paling aman diwujudkan dalam bentuk bangunan yang nyata dan tidak mudah hilang.

Dinding tembok rumah Bu Uus yang kini berdiri kokoh menjadi simbol perubahan status sosial sekaligus bukti konkret dari hasil kerja kerasnya di Arab Saudi. Dulu, sebelum berangkat, ia dan keluarganya tinggal di rumah sederhana berdinding papan bersama ibunya. Kini, rumah permanen yang ia bangun dengan hasil keringat sendiri menjadi penanda transformasi kehidupannya—baik secara ekonomi maupun simbolik. Bagi Bu Uus, rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga

“prasasti” sosial yang menunjukkan bahwa dirinya telah berhasil menunaikan tanggung jawab sebagai anak sekaligus perempuan pekerja.

Makna rumah bagi Bu Uus tidak bisa dilepaskan dari nilai kehormatan sosial yang melekat pada sosok mantan TKW. Di lingkungan desa, perempuan yang berhasil membangun rumah dari hasil kerja di luar negeri sering kali dipandang sebagai contoh kesuksesan dan ketekunan. Namun di balik kebanggaan itu, tersimpan pula kesadaran bahwa kerja keras di luar negeri harus diabadikan dalam sesuatu yang terlihat—karena tanpa bukti fisik, perjuangan selama bertahun-tahun dianggap belum “terbayar.” Rumah, dalam hal ini, berfungsi ganda: sebagai aset ekonomi dan sekaligus monumen moral atas perjuangan di negeri orang.

Bu Linda menjadi salah satu contoh yang menonjol. Dari hasil kerja kerasnya di Taiwan dan Hongkong, ia berhasil membeli rumah BTN. Ia menuturkan dengan bangga:

> Saya : “Sewaktu pulang ke Indonesia, ada gak perbedaan dalam pengelolaan keuangan?”
>
> Bu Linda : “Ada, kalau disana kan pengeluarannya kita sendiri, tapi kalau di rumah sudah pasti pengeluarannya untuk kebutuhan keluarga seperti listrik, air, beras, dll. Tapi kalau disana selain kebutuhan sendiri, paling untuk jajan, seperti ada yang beli jajan, emas, dsb.”
>
> Saya : “Berarti ibu sempat nabung ya?”
>
> Bu Linda : “Ada alhamdulillah, kebeli BTN, didekat polsek sindang.” (Wawancara dengan Bu Linda, 3 Juni 2025)

Kutipan di atas menggambarkan bagaimana perubahan konteks ekonomi setelah kepulangan membuat pola pengelolaan uang Bu Linda mengalami pergeseran. Saat masih bekerja di luar negeri, pengeluaran bersifat pribadi dan terukur—terbatas pada kebutuhan diri sendiri serta sedikit hiburan seperti membeli emas atau barang kecil. Namun, setelah pulang ke Indonesia, uang hasil kerja itu tidak lagi menjadi milik individu sepenuhnya. Ia harus beralih fungsi menjadi sumber ekonomi keluarga, mencakup kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti listrik, air, dan bahan pangan. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari logika ekonomi individual menuju logika ekonomi kolektif, di mana uang perempuan migran bertransformasi menjadi alat pemelihara kehidupan keluarga.

Dari hasil tabungannya selama bekerja di luar negeri, Bu Linda berhasil membeli sebuah rumah BTN yang terletak di dekat Polsek Sindang. Rumah ini menjadi wujud nyata dari kerja kerasnya sekaligus simbol keberhasilan yang diakui secara sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Kepemilikan rumah BTN bagi Bu Linda tidak hanya bermakna ekonomi, tetapi juga menjadi sumber legitimasi moral—sebuah bukti bahwa jerih payah bertahun-tahun di negeri orang terbayar dalam bentuk yang dapat dilihat, disentuh, dan dibanggakan.

Dalam masyarakat seperti Lohbener, rumah BTN menjadi bentuk investasi modern yang kerap dikaitkan dengan "mobilitas sosial" purna pekerja migran. Tidak semua perempuan mampu mencapai titik ini; karena itu, rumah milik Bu Linda menjadi semacam penanda kelas baru, yang membedakannya dari mereka yang hanya mampu membangun rumah sederhana di desa. Kisah Bu Linda memperlihatkan bagaimana remitan tidak hanya mengubah kondisi material, tetapi juga menegosiasikan posisi sosial perempuan dalam tatanan masyarakat desa—dari pekerja migran menjadi pemilik aset, dari pencari nafkah menjadi simbol keberhasilan yang diakui publik.

Kisah selanjutnya datang dari Bu Betty Berbeda dengan sebagian informan lain yang bekerja pada dekade 1990-an ke atas, Bu Betty termasuk generasi awal pekerja migran dari Indramayu. Ia berangkat ke Arab Saudi pada tahun 1987, ketika peluang kerja bagi perempuan desa di luar negeri mulai terbuka luas, tetapi belum sepopuler sekarang. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membantu orang tuanya, sekaligus menabung sebagian hasil kerjanya. Saat kembali ke Indonesia, Bu Betty memutuskan untuk menikah dan menggunakan sebagian dari tabungannya untuk membangun usaha empang bersama suaminya.

Ketika saya mewawancarai Bu Betty, sore itu suasananya terasa tenang. Dari obrolan ringan kami di teras rumah, Bu Betty mulai bercerita tentang masa-masa awal ia memutuskan bekerja ke luar negeri pada tahun 1987. Dengan nada tenang tapi penuh keyakinan, ia menjelaskan bagaimana pengalaman bekerja di Arab Saudi menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menuturkan bahwa uang hasil kerja di luar negeri kemudian ia gunakan untuk membangun kehidupan baru setelah menikah, salah satunya dengan membuka usaha empang bersama suaminya.

Saya : “Ada kepikiran untuk nabung ngga, bu?”

Bu Betty : “Ada.”

Saya : “Setelah pulang ibu kerja lagi? Atau gimana, gitu? Ada upaya gak buat menyambung hidup?”

Bu Betty : “Pengennya mah kerja lagi tapi saya keburu nikah. Dinikahin sama suami saya terus ngebangun usaha empang. Ya Alhamdulillah, banyak untungnya.”

Bagi Bu Betty, empang bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang yang paling masuk akal bagi keluarganya. Ia menyadari bahwa uang hasil kerja di luar negeri akan cepat habis jika hanya dipakai untuk konsumsi, sehingga memilih menanamkannya pada sesuatu yang bisa menghasilkan setiap musim. Usaha empang itu kini menjadi sumber nafkah keluarga dan sekaligus simbol keberhasilan atas jerih payahnya di negeri orang. Di mata masyarakat sekitar, Bu Betty dikenal sebagai “mantan TKW yang sukses,” bukan karena gaya hidupnya yang berubah, melainkan karena ia mampu mengubah hasil kerjanya menjadi aset produktif yang bermanfaat hingga kini.

Dari percakapan tersebut, terlihat bahwa masa kepulangan Bu Betty tidak diwarnai dengan fase menganggur atau kebingungan seperti yang dialami oleh sebagian purna pekerja migran lainnya. Keputusan untuk menikah segera setelah pulang justru menjadi titik awal fase baru dalam kehidupannya. Ia tidak lagi memaknai uang hasil kerja di luar negeri sebagai sesuatu yang harus dihabiskan untuk konsumsi, tetapi sebagai modal untuk membangun keberlanjutan hidup bersama suaminya.

Usaha empang yang didirikan bersama suaminya menjadi simbol transformasi ekonomi dari tenaga kerja individual menjadi unit ekonomi keluarga. Dalam konteks sosial pedesaan, empang bukan hanya bentuk investasi yang produktif, tetapi juga menandakan status sosial tertentu—sebuah pencapaian yang memberi pengakuan bahwa kerja keras di luar negeri tidak berakhir sia-sia.

Kisah Bu Betty menunjukkan bagaimana perempuan migran yang telah kembali mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan peran dan situasi ekonomi baru. Dari seorang pekerja di negeri orang, ia beralih menjadi pengelola aset lokal yang menopang kehidupan keluarga. Usaha empang yang masih berjalan hingga kini

memperlihatkan bahwa bagi sebagian purna pekerja migran, remitan bukan sekadar uang hasil jerih payah, melainkan bekal untuk meneguhkan identitas sebagai perempuan yang mampu menghidupi diri dan keluarganya, bahkan setelah migrasi berakhir.

Dari berbagai kisah yang terhimpun, dapat dilihat bahwa praktik investasi dan kepemilikan aset menjadi salah satu cara utama purna pekerja migran dalam meneguhkan hasil kerja mereka setelah kembali ke tanah air. Baik dalam bentuk rumah, warung, empang, maupun tanah, aset-aset tersebut berfungsi tidak hanya sebagai jaminan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol sosial yang memperlihatkan keberhasilan dan legitimasi kerja keras mereka di luar negeri.

Pembangunan rumah oleh Bu Uus, pembukaan warung oleh Bu Diah, dan pendirian empang oleh Bu Betty menunjukkan pola yang serupa: bahwa remitan tidak semata dimaknai sebagai uang konsumsi, melainkan sebagai modal simbolik untuk membangun stabilitas hidup dan status sosial di desa. Dalam pandangan masyarakat, rumah tembok, warung, atau empang bukan sekadar wujud materi, melainkan tanda nyata bahwa perjuangan mereka di negeri orang menghasilkan sesuatu yang "terlihat" dan "diakui".

Namun, di balik simbol-simbol material tersebut, terselip juga ketegangan antara harapan dan kenyataan. Tidak semua usaha berjalan mulus; sebagian aset tidak berfungsi optimal, bahkan ada yang lambat laun tidak lagi produktif. Meski demikian, bagi para purna pekerja migran, keberadaan aset tersebut tetap memiliki makna sosial yang penting—ia menjadi bukti dari kerja keras, pengorbanan, dan kemampuan perempuan untuk mengelola hasil migrasi mereka dalam batasan struktur ekonomi desa yang terbatas.

Dengan demikian, praktik investasi ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan ekonomi, tetapi juga menunjukkan upaya perempuan dalam membangun keberlanjutan hidup pasca migrasi. Melalui aset-aset yang mereka miliki, para purna pekerja migran berusaha menegosiasikan kembali posisi dan peran mereka dalam keluarga serta masyarakat. Bab selanjutnya akan menguraikan lebih jauh tentang strategi-strategi bertahan hidup yang mereka lakukan setelah kembali ke desa—ketika remitan mulai

menipis, dan mereka harus berhadapan dengan realitas ekonomi yang tidak lagi sekuat masa mereka bekerja di luar negeri.

3.3 Strategi Bertahan Hidup Migran Kembali

Kepulangan bagi para pekerja migran perempuan tidak selalu berarti akhir dari perjuangan ekonomi. Justru di titik ini, mereka dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana mempertahankan keberlangsungan hidup ketika sumber penghasilan utama telah berhenti. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan pendapatan tetap dan kehidupan yang serba teratur di luar negeri, mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi desa yang fluktuatif dan penuh ketidakpastian. Transisi ini bukan hanya soal pergeseran ekonomi, tetapi juga pergeseran identitas—dari "pekerja dengan gaji pasti" menjadi "perempuan desa" yang kembali bergulat dengan pekerjaan informal, tanggung jawab domestik, dan tekanan sosial di sekitarnya.

Dalam kondisi ini, strategi bertahan hidup para migran kembali tidak hanya dimaknai sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai proses sosial yang kompleks. Mereka tidak sekadar mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan juga berusaha menjaga martabat, harga diri, dan posisi sosial yang telah mereka bangun selama bekerja di luar negeri. Di tengah keterbatasan lapangan kerja di desa, kreativitas dan kemampuan beradaptasi menjadi modal utama. Ada yang membuka usaha kecil, bekerja serabutan, atau bergantung pada jaringan sosial dan solidaritas sesama perempuan. Semua bentuk upaya itu mencerminkan daya lenting (resilience) perempuan pekerja migran dalam menghadapi perubahan hidup pasca migrasi.

3.3.1 Perubahan Sumber Penghidupan: Dari Gaji Tetap ke Penghasilan Harian

Setelah memahami konteks kembalinya para pekerja migran dan tantangan yang mereka hadapi, penting untuk melihat secara lebih konkret bagaimana proses bertahan hidup itu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek utama yang paling menonjol adalah perubahan dalam sumber penghidupan. Ketika pendapatan bulanan yang stabil sudah tidak lagi diterima, para purna pekerja migran harus menyesuaikan diri dengan ritme ekonomi desa yang tidak pasti. Pada titik inilah mereka mulai merumuskan

strategi ekonomi baru, baik melalui usaha kecil, pekerjaan informal, maupun aktivitas produktif lainnya yang dapat dijalankan dari rumah atau lingkungan sekitar.

Perubahan penghidupan menjadi salah satu dampak paling nyata setelah migran kembali ke desa. Ketika berada di luar negeri, para pekerja migran terbiasa dengan *ritme ekonomi yang stabil*—gaji yang diterima setiap bulan, jam kerja yang teratur, dan kepastian finansial yang dapat diandalkan. Namun, ketika mereka kembali, ritme tersebut bergeser menjadi lebih cair dan tidak pasti. Hal ini terlihat jelas pada pengalaman Bu Uus.

Selama bekerja di Arab Saudi, Bu Uus menerima upah tetap setiap bulan. Ia bercerita,

> Saya : "Kalau dulu per-bulan dapet nya berapa, bu?"
>
> Bu Uus : "Dulu jaman saya masih 600 riyal, itu 6jt an."

Jumlah itu, bagi Bu Uus, bukan hanya angka. Itu adalah pendapatan paling stabil yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Di desa, sebelum berangkat, pekerjaan yang tersedia untuk perempuan umumnya berupah harian, seperti buruh tani, membantu di dapur hajatan, atau mengurus warung kecil keluarga. Upahnya kecil, tidak tetap, dan sangat tergantung musim serta permintaan. Karena itu, menerima gaji dalam bentuk mata uang asing setiap bulan terasa seperti memasuki dunia ekonomi yang sama sekali berbeda. Gaji yang tetap membuat hidupnya memiliki ritme: ada kepastian untuk mengirim uang, ada kepastian untuk menabung, ada kepastian untuk membayangkan masa depan. Ketika Bu Uus menyebut nominal itu, cara ia menyampaikannya bukan dengan nada bangga, tetapi lebih seperti seseorang yang mengingat rasa aman yang pernah dia punya. Sebuah rasa aman yang kini telah hilang.

Gaji tersebut juga mengubah posisi sosialnya dalam keluarga. Ia bukan hanya "anak perempuan" atau "ibu rumah tangga", tetapi pencari nafkah utama. Orang-orang di sekitarnya memandangnya sebagai perempuan yang mampu, perempuan yang "bisa bantu keluarga", perempuan yang "punya hasil". Dalam konteks sosial Indramayu, posisi itu penting—bukan hanya soal ekonomi, tapi soal martabat. Namun, kepastian itu hanya berlangsung selama ia berada di luar negeri. Ketika masa kontrak selesai dan ia kembali ke desa, pendapatan tersebut berhenti seketika. Celah antara hidup dengan gaji tetap dan

hidup dengan pemasukan tidak menentu inilah yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup yang ia lakukan setelah kembali.

Setelah berhenti bekerja sebagai pekerja migran, Bu Uus melanjutkan bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Bu Nining selama 8 tahun. Selepas menjadi Asisten Rumah Tangga (ART), Bu Uus tidak lagi memiliki pekerjaan dengan pendapatan tetap. Di titik ini, ia mulai mengandalkan pekerjaan-pekerjaan kecil yang muncul dari jaringan sosial sekitar: tetangga, saudara, atau ibu-ibu lain di desa. Pekerjaan ini umumnya bersifat harian, situasional, dan tidak terikat, tetapi menjadi salah satu cara paling realistis untuk tetap "bergerak" dalam ekonomi desa. Aktivitas semacam ini tidak hanya berkaitan dengan mencari pemasukan, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan keterlibatan di dalam komunitas.

> Saya : "Oke, ibu kan disana kerja 18 bulan. Terus ketika pulang kesini ibu kerja lagi nggak?"
>
> Bu Uus : "Enggak. Udah nggak kerja jadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) lagi, jadi saya pulang itu lanjut kerja jadi ART di rumah ibu Nining selama 8 tahun. setelah berhenti jadi ART, saya sempat jualan es di GOR, mau lanjut jualan tapi nggak ada modalnya. Jadi sekarang yaudah kerja serabutan aja, kayak tadi tuh saya habis majengan* (bantu masak masak) di tetangga bikin risol 200 buah.
>
> Saya : "Kalo dari majengan gitu, ibu biasanya dapet berapa?"
>
> Bu Uus : "Ya se dikasihnya aja mbak, kadang nggak dikasih uang tapi dapet makanan, dapet uang juga, dapet dua duanya ya pernah juga."

Setelah berhenti menjadi ART, sumber pendapatan Bu Uus semakin tidak menentu. Ia sempat membuka usaha kecil berjualan es di GOR desa, memanfaatkan keramaian sebagai peluang ekonomi. Namun usaha tersebut tidak dapat berlanjut karena keterbatasan modal, sehingga ia harus menghentikannya. Sejak itu, pekerjaan yang tersedia baginya lebih bersifat serabutan, muncul dari situasi sosial sehari-hari, bukan dari struktur kerja formal.

Salah satu bentuk kerja yang kini dilakukannya adalah majengan—membantu proses memasak ketika ada tetangga yang mengadakan hajatan atau acara keluarga.

Dalam kegiatan ini, pendapatan yang diterima tidak memiliki nilai yang pasti. Kadang berupa uang, kadang berupa makanan, dan kadang keduanya sekaligus. Dengan demikian, pekerjaan ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai jembatan sosial untuk tetap menjaga hubungan dan posisi dalam komunitas.

Majengan memperlihatkan bagaimana perempuan seperti Bu Uus membangun strategi bertahan hidup dengan mengandalkan jaringan sosial. Di desa, kerja informal semacam ini menjadi bagian dari sistem pertukaran yang cair: tenaga dibalas dengan kebaikan, kedekatan dibalas dengan dukungan, dan kehadiran dibalas dengan pengakuan sebagai bagian dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak hanya menggantikan fungsi penghasilan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan relasi sosial yang esensial dalam kehidupan pasca migrasi. Dalam kondisi di mana sumber pemasukan tidak lagi stabil, strategi bertahan hidup seperti yang dilakukan Bu Uus menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi purna pekerja migran tidak pernah semata-mata bergantung pada uang, tetapi pada kemampuan beradaptasi, membaca peluang kecil, dan merawat jaringan sosial yang menopang kehidupan sehari-hari.

Berbeda dengan Bu Uus yang mengandalkan pekerjaan serabutan, strategi bertahan hidup Bu Diah bergerak melalui usaha kecil yang ia bangun di rumah. Setelah pulang dari Arab Saudi, pendapatan yang ia terima tidak hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi sebagian besar diberikan kepada orang tuanya. Pada masa itu, keluarga Bu Diah tengah menghadapi tekanan ekonomi karena banyaknya hutang yang harus dilunasi. Kontribusi finansial yang ia berikan kemudian menjadi penopang utama pemulihan ekonomi keluarga, sekaligus menegaskan posisi Bu Diah sebagai anak yang “berhasil” dan mampu membantu orang tua.

Ketika melakukan wawancara, saya bertanya kepada Bu Diah tentang bagaimana strategi ia bertahan hidup pasca menjadi migran kembali,

> Saya : “Waktu ibu pulang ada pemikiran untuk bikin tabungan gitu gak?”
>
> Bu Diah : “Iya sih pengennya mah, tapi uang nya saya kasihin terus ke orang tua. Jadi saya nggak berani minta kalo uangnya udah dikasih ke orang tua. yang penting ada uang buat mereka.”

> Saya : “Nah kalo warung yang di masjid itu, modalnya dari ibu sendiri atau hasil dari kerja TKW?”
>
> Bu Diah : “Iya. Modal sendiri. Modalnya 5jt an, sudah kontrakan sama isinya. Dari tahun 2010, gantiin Bu Neni disitu.”
>
> Saya : “Sebelum ibu jualan, ibu ngapain?”
>
> Bu Diah : “Saya sebelum jualan di warung, jualan dirumah dulu sama nerima orderan bikin peyek. Alhamdulillah itu hasil nabung selama bertahun tahun kekumpul 5jt dan gantiin Bu Neni jualan di warung sampai sekarang.”

Dalam kisah Bu Diah, remitan yang ia hasilkan selama bekerja di luar negeri tidak langsung bertransformasi menjadi modal usaha yang besar. Sebagian besar uang tersebut ia serahkan kepada orang tuanya, terutama untuk membantu melunasi hutang keluarga dan membiayai kebutuhan adiknya. Keputusan tersebut bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai moral dan tanggung jawab seorang anak terhadap orang tua. Dalam konteks sosial desa, membantu orang tua bukan sekadar pilihan personal, tetapi bentuk kewajiban etis yang menentukan bagaimana seseorang dipandang oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Namun, pilihan untuk terus mengalokasikan uang ke keluarga membuat Bu Diah tidak memiliki tabungan yang cukup besar ketika ia kembali ke desa. Untuk memulai kehidupan ekonominya pasca migrasi, ia harus membangun dari yang paling mungkin, yaitu memanfaatkan keterampilan dapur yang ia pelajari sejak sebelum migrasi. Ia mulai dengan usaha kecil: menerima pesanan peyek dan makanan ringan rumahan. Usaha ini tidak hanya memberi pemasukan perlahan, tetapi juga menciptakan jaringan pelanggan yang menjadi fondasi ekonomi barunya—kerabat, tetangga, ibu-ibu jamaah masjid, dan pengunjung lingkungan sekitarnya.

Melalui proses menabung yang dilakukan sedikit demi sedikit dari hasil usaha rumahan itu, Bu Diah akhirnya mampu mengumpulkan modal sekitar lima juta rupiah. Dengan modal tersebut, ia kemudian mengambil alih warung di depan Masjid Istiqomah yang sebelumnya dikelola oleh kakaknya. Warung ini menjadi titik penting dalam strategi bertahan hidupnya sebagai purna pekerja migran.

Warung tersebut bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga ruang sosial. Lokasinya yang strategis—di depan masjid yang menjadi pusat aktivitas ibadah,

pengajian, serta mampirnya rombongan ziarah dari berbagai daerah—membuat warung ini selalu berada dalam arus lalu lintas sosial desa. Di sana, Bu Diah bukan hanya "berjualan," tetapi juga menghadirkan dirinya dalam kehidupan komunitas: menyapa orang, membangun relasi, dan tetap menjadi bagian dari ritme sosial yang berjalan setiap hari.

Kisah Bu Diah memperlihatkan bahwa strategi bertahan hidup pasca migrasi tidak selalu bergantung pada besar kecilnya remitan, tetapi pada kemampuan mengelola modal kecil dan memanfaatkan jaringan sosial sebagai ruang untuk menciptakan keberlanjutan hidup. Modal lima juta bukan sekadar angka, tetapi hasil kumpulan waktu, tenaga, tanggung jawab keluarga, dan proses bertahap untuk kembali menata hidup di kampung halaman.

3.3.2 Strategi Melalui Pemanfaatan Aset & Jaringan Sosial

Meski sebagian purna pekerja migran kembali ke desa dengan mengandalkan kerja informal sebagai sumber penghidupan, tidak semua strategi bertahan hidup berpusat pada tenaga dan aktivitas harian. Bagi sebagian lainnya, kemampuan untuk bertahan tidak hanya ditentukan oleh pekerjaan yang dilakukan setelah kepulangan, tetapi juga oleh aset yang berhasil dibawa pulang serta jaringan sosial yang mereka bangun selama dan setelah migrasi. Dalam konteks ini, remitan tidak semata berubah menjadi konsumsi atau modal usaha kecil, tetapi dapat berwujud dalam bentuk kepemilikan rumah, usaha keluarga, atau dukungan sosial yang menopang keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang.

Strategi seperti ini tampak pada migran kembali yang tidak lagi berada dalam posisi harus mencari pekerjaan setiap hari, tetapi tetap mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga melalui pemanfaatan aset, usaha mikro keluarga, hubungan kekerabatan, dan status yang telah dibangun selama masa migrasi. Dengan kata lain, remitan bekerja tidak hanya melalui aliran uang, tetapi juga melalui aliran kepercayaan, kedekatan keluarga, dan pengakuan sosial di lingkungan desa.

Saya bertanya kepada Bu Neni perihal bagaimana ia memanfaatkan remitan sebagai sarana untuk bertahan hidup,

Saya : waktu ibu pulang ada plan gitu gak kira kira setelah pulang jadi tkw mau ngapain?

Bu Neni : rencananya sebelum pulang saya mau nambah kontrak lagi, tapi qodarullah waktu itu saya kena penyakit kista. jadi 2 bulan sebelum kontrak habis, saya pulang ke indonesia dan operasi kista disini. majikan saya udah tau tentang penyakit saya, jadi memang dianjurkan untuk pulang dan saya dikasih sangu banyak dari majikan. waktu pulang, memutuskan untuk kerja disini dengan buka warung.

Saya : itu modalnya dari tabungan ibu atau gimana?

Bu Neni : iya betul, dari tabungan.

Saya : dari gaji ibu disisihin berapa untuk nabung?

Bu Neni : ya kalo itu, almarhum bapak saya yang megang, bukan saya. jadi uang saya dikirim semua ke bapak jadi bapak yang megang.

Saya : berarti ibu bilang ke bapak kalo minta disisihin untuk bikin warung?

Bu Neni : iya betul. kan dibikinin warung didepan rumah waktu itu.

Saya : tapi balik modal gak bu?

Bu Neni : kalo balik modal enggak, karena banyak yang makan (uangnya).

Saya : tapi kalo nambahin sedikit sedikit mah bisa kan?

Bu Neni : bisa. untuk kehidupan ibu dan anak anak. juga bisa nyumbang orang tua waktu itu karena rumahnya paving block nya mau di renovasi. buat biaya kuliah adek saya.

Setelah kembali ke Indonesia, fase kepulangan bagi Bu Neni bukanlah akhir dari perjalanan migrasinya, melainkan awal dari proses baru dalam menata kehidupan ekonomi keluarga. Sebelum masa kontraknya berakhir, Bu Neni sebenarnya berniat untuk memperpanjang kontrak dan tetap bekerja di negara penempatan. Namun rencana tersebut berubah ketika ia mengalami penyakit kista. Kondisi kesehatannya memaksa ia pulang dua bulan lebih awal untuk menjalani operasi di Indonesia. Keputusan pulang ini bukan semata keputusan pribadi, tetapi juga hasil komunikasi dan pertimbangan bersama dengan majikannya yang selama ini mempercayakan banyak pekerjaan rumah tangga pada Bu Neni. Majikannya bahkan memberikan sangu yang cukup sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih atas kerja keras dan kedekatan emosional yang terbangun selama bertahun-tahun.

Selama bekerja di luar negeri, Bu Neni menyerahkan pengelolaan seluruh penghasilannya kepada ayahnya. Keputusan ini bukan hanya soal teknis remitansi, tetapi mencerminkan struktur otoritas ekonomi dalam keluarga. Dalam rumah tangga, ayah dianggap sebagai figur yang paling tepat mengatur alokasi keuangan agar tetap berada dalam koridor kebutuhan keluarga. Bu Neni tidak mengarahkan secara spesifik bagaimana uang tersebut harus digunakan; baginya, memberikan uang kepada orang tua adalah cara untuk membayar kembali jerih payah mereka dalam membesarkannya. Ada nilai moral di dalamnya: bekerja untuk anak-anak dan orang tua adalah bentuk bakti.

Ketika kembali ke kampung halaman, uang tabungan yang terkelola di tangan ayahnya tersebut kemudian dipakai untuk membangun sebuah warung kecil di depan rumah. Warung itu bukan hanya muncul sebagai usaha ekonomi, tetapi juga sebagai penanda kepulangan, kehadiran, dan hasil dari kerja jauh. Warung menjadi ruang yang menghubungkan Bu Neni kembali dengan lingkungan sosialnya—tempat berinteraksi, menerima tamu, dan menunjukkan bahwa kerja kerasnya di luar negeri meninggalkan sesuatu yang dapat "dilihat" dan "diakses" oleh orang lain.

Namun, perjalanan usaha tersebut tidak berjalan dalam logika ekonomi murni. Hasil dari warung tersebut tidak pernah sepenuhnya dihitung secara ketat: keuntungan, modal, atau laba sering kali melebur dalam kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan anak-anak, dan kebutuhan anggota keluarga lain. Bu Neni sendiri menyebut bahwa warung tersebut "tidak balik modal" karena uang yang berputar di dalamnya banyak yang "dimakan"—bukan dalam arti konsumtif semata, tetapi karena pemasukan warung menyatu dengan kebutuhan hidup harian keluarga. Selain itu, sebagian uang juga dipakai untuk membantu orang tua ketika halaman rumah mereka direnovasi, serta untuk membiayai pendidikan adiknya. Warung tersebut, dengan demikian, bukan sekadar investasi finansial, melainkan investasi sosial yang menjaga keberlanjutan kehidupan rumah tangga dan relasi kekeluargaan.

Dalam konteks ini, aset seperti warung tidak dapat dipahami hanya sebagai usaha ekonomi yang ditujukan untuk keuntungan semata. Ia berperan sebagai penyangga ekonomi keluarga, wadah untuk memastikan kebutuhan selalu terpenuhi meski pemasukan tidak tetap. Bagi Bu Neni, warung tersebut menjadi bukti kerja kerasnya

sekaligus ruang untuk mempertahankan martabat keluarga dan menjaga relasi sosial yang selama ini menjadi pusat kehidupan di kampung.

Jika pada pengalaman Bu Neni warung menjadi bentuk investasi yang lahir dari akumulasi remitan dan hubungan keuangan dengan orang tua, maka pada Bu Betty, arah pemanfaatan remitan memperlihatkan pola yang berbeda. Bagi Bu Betty, remitan tidak hanya berubah menjadi aset ekonomi yang dapat dilihat secara fisik, tetapi juga menjadi bagian dari narasi *transisi kehidupan*—dari seorang pekerja migran menjadi seorang istri dan pengelola usaha keluarga.

Tidak seperti Bu Diah dan Bu Neni yang merintis usaha secara mandiri, perjalanan ekonomi Bu Betty setelah kepulangannya justru banyak dipengaruhi oleh dinamika rumah tangga dan peran baru yang ia jalani setelah menikah. Remitan dan tabungan hasil bekerja di luar negeri menjadi modal yang melebur ke dalam usaha empang milik keluarga suaminya. Di sini, uang hasil migrasi tidak berdiri sendiri sebagai hasil kerja individual, melainkan menjadi bagian dari ekonomi kolektif keluarga baru yang ia masuki.

Dari percakapan saya dengan Bu Betty, Bu Betty menjelaskan bagaimana ia dapat bertahan hidup setelah menjadi migran kembali,

> Saya : “Ada kepikiran untuk nabung nggak, bu?”
>
> Bu Betty : “Ada.”
>
> Saya : “Setelah pulang ibu kerja lagi? Atau gimana gitu? Ada upaya nggak buat menyambung hidup?”
>
> Bu Betty : “Pengennya mah kerja lagi tapi saya keburu nikah. Dinikahin sama suami saya terus ngebangun usaha empang. Ya alhamdulillah banyak untungnya.”

Kisah Bu Betty menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan informan lainnya. Setelah pulang dari masa kerjanya sebagai pekerja migran, Bu Betty sebenarnya memiliki keinginan untuk kembali bekerja di luar negeri. Namun, keinginannya tersebut tidak sempat terwujud karena ia menikah tak lama setelah kepulangannya. Pergeseran status dari seorang pekerja migran menjadi seorang istri membuat arah hidup dan pengelolaan hasil kerjanya berubah sepenuhnya. Uang hasil tabungannya selama bekerja

di luar negeri kemudian melebur ke dalam kehidupan rumah tangganya bersama suami. Dalam percakapannya, ia menyebut bahwa sebagian uang itu digunakan sebagai modal untuk membangun usaha empang ikan milik keluarga suaminya.

Keputusan ini bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan bentuk penyesuaian terhadap norma sosial yang berlaku di lingkungannya—bahwa setelah menikah, perempuan tidak lagi berdiri sendiri sebagai pengelola finansial, melainkan menjadi bagian dari unit ekonomi keluarga yang dipimpin oleh suami. Dalam konteks ini, remitan tidak lagi menjadi simbol individual atas keberhasilan migrasi, tetapi menjadi kontribusi domestik yang memperkuat ekonomi rumah tangga baru.

Bagi Bu Betty, keputusan tersebut bukan sebuah kehilangan, melainkan transformasi dari bentuk kemandirian menjadi kolaborasi ekonomi. Ia menempatkan hasil kerjanya bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memastikan keberlangsungan hidup bersama. Usaha empang yang dibangun dari tabungan hasil migrasi menjadi ruang baru bagi Bu Betty untuk berperan tanpa harus kembali bermigrasi. Ia merasa cukup dengan kehidupan yang lebih stabil di desa—menjadi istri, mengurus rumah, dan turut membantu dalam pengelolaan hasil empang.

Meski tidak semua keuntungan dari usaha tersebut dikelola secara langsung olehnya, Bu Betty menganggap bahwa usahanya selama menjadi pekerja migran "tidak sia-sia." Hasil kerja kerasnya telah menjelma menjadi aset produktif yang bisa diwariskan dan dirawat bersama keluarga barunya. Dalam pandangan Bu Betty, keberhasilan bukan lagi diukur dari besarnya uang yang tersisa, tetapi dari kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih tenang dan mapan setelah bertahun-tahun bekerja jauh dari rumah.

Dari pengalaman Bu Neni dan Bu Betty dapat dipahami bahwa strategi bertahan hidup purna pekerja migran tidak semata bergantung pada besar kecilnya uang yang dibawa pulang, melainkan pada bagaimana uang tersebut menemukan bentuk dan maknanya di dalam kehidupan sosial mereka. Dalam dua kisah ini, remitan tidak berhenti pada fungsi ekonomi, tetapi terus hidup sebagai bagian dari dinamika keluarga dan nilai moral yang melekat pada peran perempuan di desa.

Bagi Bu Neni, warung yang dibangun dari hasil tabungannya bersama sang ayah bukan sekadar tempat berdagang, tetapi juga wujud dari hubungan yang terjaga antar anggota keluarga. Warung menjadi ruang ekonomi sekaligus sosial, tempat ia melanjutkan hidup dan meneguhkan identitasnya sebagai perempuan yang pernah berjuang jauh dari rumah. Sedangkan pada Bu Betty, hasil migrasi bertransformasi menjadi modal usaha keluarga setelah ia menikah. Uang yang dulu ia hasilkan sendiri kini melebur dalam struktur ekonomi rumah tangga baru, memperlihatkan pergeseran peran dari pekerja migran menjadi istri sekaligus pengelola aset keluarga.

Kedua kisah ini menegaskan bahwa bertahan hidup pasca migrasi tidak hanya berarti mempertahankan sumber pendapatan, tetapi juga menegosiasikan posisi, peran, dan hubungan sosial di tengah perubahan status ekonomi dan domestik. Perempuan purna pekerja migran menata ulang kehidupannya bukan dengan logika akumulasi, melainkan dengan logika keberlanjutan—bagaimana aset, hubungan, dan pengalaman masa lalu dijaga agar tetap menjadi penopang hari ini.

Dalam konteks ini, strategi bertahan hidup muncul bukan sebagai upaya ekonomis semata, tetapi sebagai cara untuk tetap berada—di rumah, di keluarga, dan di tengah masyarakat yang menjadi ruang pulang mereka. Keberhasilan tidak selalu diukur dari laba, tetapi dari kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dan tetap mempertahankan martabat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

3.3.3 Negosiasi Peran Gender dan Status dalam Keluarga

Membahas negosiasi peran gender menjadi penting dalam konteks penelitian ini karena migrasi perempuan tidak hanya memindahkan tubuh dari satu negara ke negara lain, tetapi juga mengguncang struktur sosial dan relasi kekuasaan di dalam keluarga. Ketika perempuan menjadi pihak yang menghasilkan uang dan menopang ekonomi rumah tangga, posisi mereka di dalam struktur gender tradisional mengalami perubahan yang signifikan. Namun, perubahan itu tidak selalu berjalan linier menuju pemberdayaan. Dalam banyak kasus, ketika perempuan kembali ke desa, mereka justru harus menegosiasikan ulang peran dan kuasanya—antara pengalaman menjadi pekerja berupah di luar negeri dan ekspektasi untuk kembali menjadi istri, anak, atau ibu yang tunduk pada norma lokal.

Negosiasi ini penting dibahas karena di sinilah tampak bagaimana "hasil kerja" perempuan migran tidak hanya diukur dalam bentuk remitan atau aset, tetapi juga dalam bentuk perubahan relasi sosial. Migrasi membuka ruang bagi perempuan untuk mengalami otonomi ekonomi dan kontrol atas hidup mereka sendiri; namun ketika pulang, ruang itu sering kali mengecil kembali dalam sistem rumah tangga yang menempatkan laki-laki sebagai pusat keputusan. Melalui kisah para informan, terutama dalam hal bagaimana uang dikelola, dibagi, dan dimaknai, kita dapat melihat proses negosiasi yang berlangsung di antara struktur sosial yang mapan dengan pengalaman hidup perempuan yang telah berubah.

Kepulangan perempuan pekerja migran tidak hanya mengubah kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga menggoyang tatanan relasi sosial di dalam keluarga. Perempuan yang sebelumnya bekerja di luar negeri dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sering kali membawa pulang bukan hanya uang, tetapi juga pengalaman, kebiasaan, dan cara pandang baru terhadap peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun, perubahan itu tidak selalu diterima begitu saja. Dalam banyak kasus, perempuan purna pekerja migran harus berhadapan dengan proses penyesuaian yang rumit—antara identitas sebagai pencari nafkah dan posisi mereka sebagai istri, anak, atau ibu di ruang domestik yang kembali menuntut peran tradisional.

Di masyarakat pedesaan seperti Lohbener, struktur rumah tangga masih banyak diatur oleh norma patriarki dan pembagian peran gender yang kuat. Ketika perempuan membawa pulang remitan dalam jumlah besar, mereka bukan hanya membawa sumber daya ekonomi, tetapi juga kuasa simbolik: kemampuan untuk menentukan, memilih, dan memutuskan. Namun, kuasa tersebut sering kali dinegosiasikan ulang setelah mereka kembali ke rumah. Uang yang dulunya mereka hasilkan sendiri kini harus melebur dalam mekanisme keputusan keluarga yang tidak selalu memberi ruang bagi suara perempuan. Dalam konteks ini, remitan menjadi arena di mana gender, kekuasaan, dan moralitas saling berkelindan.

Kisah Bu Laeliyah memberi gambaran paling nyata tentang bagaimana pengalaman migrasi dan perceraian membentuk ulang posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Sebelum berangkat menjadi pekerja migran, Bu Laeliyah hidup dalam pola rumah tangga yang konvensional—ia bergantung pada penghasilan suami dan jarang

terlibat langsung dalam keputusan keuangan keluarga. Di rumah, ia menjalankan peran domestik sebagaimana perempuan desa pada umumnya: mengurus anak, memasak, dan memastikan rumah tetap rapi. Namun, situasi ekonomi yang sulit dan ketegangan dalam hubungan pernikahan mendorongnya untuk mengambil keputusan besar: pergi bekerja ke luar negeri.

Selama masa migrasi, Bu Laeliyah mengalami perubahan besar dalam pandangan terhadap diri dan perannya. Ia mengatur sendiri uang yang diperoleh, mengirimkan sebagian untuk keluarga di rumah, dan menabung sebagian lainnya atas nama dirinya sendiri—sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan bisa dilakukan. Uang bukan hanya menjadi alat bertahan hidup, tetapi juga simbol dari kebebasan dan kemandirian yang baru ia rasakan. Dalam wawancara, ia mengaku bahwa bekerja di luar negeri membuatnya "berani menentukan", tidak lagi takut untuk mengambil keputusan, bahkan hal-hal kecil sekalipun.

Namun kepulangan tidak selalu berarti kembali ke kehidupan yang sama. Setibanya di rumah, ia mendapati rumah tangga yang sudah rapuh akhirnya benar-benar runtuh. Perceraian menjadikannya harus memikul peran ganda—sebagai kepala keluarga sekaligus ibu tunggal. Ia tidak lagi memiliki suami yang menjadi penentu arah ekonomi rumah tangga; kini semua keputusan berada di tangannya. Dalam kondisi itu, pengalaman migrasi menjadi modal utama: keterampilan mengelola uang, kedisiplinan bekerja, serta keyakinan bahwa dirinya mampu bertahan tanpa bergantung pada laki-laki.

Bu Laeliyah menggunakan sebagian tabungan hasil migrasinya untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sisa uang yang ada ia kelola dengan hati-hati, sebagian disimpan untuk keperluan darurat. Ia tidak lagi hidup dengan rasa takut kehilangan pemasukan, karena yang ia andalkan bukan hanya uang, tetapi juga cara berpikir baru tentang kemandirian. Perceraian tidak menjatuhkannya, melainkan menjadi momen ketika ia menegosiasikan ulang makna "perempuan kuat" dalam konteks sosial yang masih menilai perempuan janda secara negatif.

Di lingkungan sosialnya, Bu Laeliyah berhadapan dengan pandangan miring terhadap statusnya. Namun, ia memilih untuk tetap aktif dalam kegiatan kampung, berinteraksi dengan tetangga, dan menjaga hubungan sosialnya agar tetap diterima.

Dalam tindakan-tindakan kecil itu—membeli kebutuhan sehari-hari sendiri, menyekolahkan anak tanpa bantuan mantan suami, dan terus bekerja serabutan—terdapat bentuk agensi yang halus namun kuat. Ia tidak perlu membuktikan keberhasilan dengan pamer harta; cukup dengan terus bertahan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai ibu, ia sudah merasa cukup berdaya.

Melalui kisah Bu Laeliyah, terlihat bahwa negosiasi peran gender setelah migrasi tidak selalu berbentuk pertarungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bisa menjadi proses menemukan keseimbangan baru antara otonomi dan tanggung jawab sosial. Bagi Bu Laeliyah, menjadi perempuan purna migran sekaligus janda bukanlah stigma, melainkan status yang ia isi dengan kerja keras, disiplin, dan kebanggaan terhadap hasil tangannya sendiri. Pengalaman migrasi telah memberinya ruang untuk menulis ulang definisi "kepala keluarga"—bukan sebagai laki-laki yang memberi nafkah, tetapi sebagai perempuan yang mampu menanggung beban hidup dengan martabatnya sendiri.

Kisah-kisah para informan menunjukkan bahwa perubahan status sosial ekonomi akibat migrasi tidak serta-merta menjadikan perempuan sepenuhnya berdaya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sebaliknya, posisi mereka justru kerap berayun di antara dua kutub: di satu sisi sebagai sumber ekonomi, di sisi lain sebagai bagian dari sistem sosial yang masih memosisikan laki-laki sebagai pemegang keputusan utama. Melalui pengalaman ini, tampak bahwa kepulangan tidak hanya soal menyesuaikan diri dengan kehidupan desa, tetapi juga tentang bagaimana perempuan bernegosiasi untuk tetap memiliki kendali atas hasil kerja dan kehidupan yang telah mereka bangun.

Kisah Bu Uus menutup rangkaian pengalaman negosiasi peran gender dengan nada yang lebih tenang namun tidak kalah dalam maknanya. Jika Bu Laeliyah menunjukkan kemandirian melalui keputusan untuk berdiri sendiri, maka Bu Uus memperlihatkan bentuk ketahanan yang berbeda—ketahanan yang lahir dari kesabaran, kerja keras, dan penerimaan terhadap kondisi hidup yang berubah. Setelah pulang dari Arab Saudi, Bu Uus tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Ia memilih tetap tinggal di desanya dan menjalani berbagai pekerjaan serabutan yang datang silih berganti: menjadi asisten rumah tangga, berjualan es di GOR Singalodra Indramayu, membantu tetangga memasak pesanan risol dalam jumlah besar, atau sesekali menerima upah kecil dari kegiatan majengan.

Dalam kehidupannya sehari-hari, negosiasi peran gender tidak berlangsung dalam bentuk konflik atau pertentangan, melainkan melalui *ritme keseharian* yang dijalani dengan diam. Sebagai perempuan purna migran, Bu Uus pernah merasakan bagaimana rasanya memiliki penghasilan rutin, mengirimkan uang ke keluarga, dan diakui sebagai tulang punggung ekonomi. Namun setelah kepulangan, posisinya bergeser: dari yang dulu menghasilkan, kini harus bergantung pada kesempatan kecil dan solidaritas sosial di lingkungannya. Dalam situasi seperti ini, kerja menjadi tidak hanya urusan mencari uang, tetapi juga cara menjaga harga diri dan tetap merasa "berguna" di mata keluarga maupun tetangga.

Bu Uus sering kali tidak menerima upah dalam bentuk uang, melainkan makanan atau ucapan terima kasih. Tetapi bagi dirinya, hal itu bukan bentuk kehilangan, melainkan cara untuk tetap berada dalam sirkulasi sosial di desanya. Dengan membantu tetangga, menghadiri arisan, dan ikut kegiatan masak bersama, ia menjaga relasi yang menopang hidupnya sehari-hari. Di sinilah tampak bahwa agensi perempuan purna migran tidak selalu diwujudkan lewat kontrol terhadap uang, tetapi juga melalui kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mempertahankan hubungan sosial di tengah keterbatasan ekonomi.

Perubahan dari posisi sebagai pencari nafkah di luar negeri menjadi pekerja informal di kampung tidak membuat Bu Uus kehilangan makna kerja. Rumah yang ia bangun dari hasil migrasi menjadi saksi bisu dari masa lalu yang penuh kerja keras, sekaligus pengingat bahwa dirinya pernah memiliki masa di mana ia mampu menentukan arah hidup sendiri. Kini, dinding tembok yang dulu hanya papan berdiri kokoh sebagai simbol ketekunan dan bukti bahwa jerih payahnya tidak hilang begitu saja. Dalam diamnya, Bu Uus menegosiasikan kembali perannya sebagai perempuan, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kesetiaan pada kerja dan kehidupan yang sederhana.

Bagi Bu Uus, menjadi perempuan pasca migrasi berarti memahami bahwa kekuatan tidak selalu tampak dalam bentuk kuasa atau kepemilikan, melainkan dalam kemampuan untuk tetap bertahan dan menjaga keseimbangan di tengah keterbatasan. Ia mungkin tidak lagi memegang kendali penuh atas ekonomi keluarga, tetapi ia tetap menjadi pusat dalam jaringan sosial yang memastikan hidupnya terus berjalan. Dalam sosoknya, kita melihat bentuk lain dari negosiasi peran gender: ketahanan yang senyap,

tapi kuat—sebuah strategi hidup yang tak terucap, namun tetap berlangsung dari hari ke hari.

Kisah Bu Laeliyah dan Bu Uus menggambarkan dua sisi dari negosiasi peran gender yang dijalani perempuan purna pekerja migran. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa kepulangan bukan sekadar akhir dari perjalanan ekonomi, tetapi juga awal dari proses panjang untuk menata kembali posisi, peran, dan makna diri di dalam keluarga serta masyarakat. Bu Laeliyah menegosiasikan perannya melalui kemandirian dan keberanian untuk memutus ketergantungan. Perceraian membuatnya berdiri di antara stigma dan kekuatan, namun ia memilih untuk tetap bertahan dengan menjadikan hasil kerjanya sebagai simbol harga diri. Bagi Bu Laeliyah, menjadi perempuan tanpa suami bukan berarti kehilangan tempat, melainkan kesempatan untuk membangun makna baru tentang "perempuan yang mampu."

Sementara itu, Bu Uus menegosiasikan peran melalui bentuk ketahanan yang berbeda—diam, sabar, namun kokoh. Ia tidak lagi berada di posisi produktif secara ekonomi seperti masa migrasi, tetapi tetap menjaga martabatnya melalui kerja-kerja kecil dan relasi sosial di lingkungan sekitar. Dalam kehidupannya yang sederhana, tampak bentuk agensi yang lembut namun berdaya: menerima keadaan tanpa menyerah, dan tetap bekerja agar tetap diakui sebagai bagian penting dari komunitasnya. Dari keduanya, tampak bahwa negosiasi peran gender pasca migrasi tidak selalu berarti perlawanan terhadap norma, tetapi juga proses memahami diri dan menyesuaikan kehidupan dengan cara yang paling mungkin. Perempuan-perempuan ini menata ulang identitasnya bukan di ruang wacana, tetapi di dapur, di warung, di halaman rumah, dan dalam setiap keputusan kecil yang mereka buat setiap hari.

BAB IV

MORALITAS UANG DAN PEMAKNAAN REMITAN OLEH PURNA PEKERJA MIGRAN

4.1 Praktik Pengelolaan Uang Sebagai Arena Moral

Ariel Wilkis dalam *The Moral Power of Money* (2017) menjelaskan bahwa uang tidak pernah sepenuhnya netral. Ia membawa serta nilai-nilai moral, hubungan kuasa, dan logika sosial yang membentuk cara orang memaknai serta menggunakannya. Dalam kehidupan purna pekerja migran, remitan dapat dipahami sebagai bentuk earned money (uang hasil jerih payah), sekaligus donated money (uang yang diberikan secara sukarela kepada keluarga) dan sacrificed money (uang yang menjadi simbol pengorbanan personal). Melalui pengelolaan dan penggunaan remitan, para perempuan ini tidak hanya membangun kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi moral mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dan layak dihormati di masyarakat.

Remitan yang mereka hasilkan selama bekerja di luar negeri tidak sekadar berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga menjadi medium untuk menegosiasikan identitas, tanggung jawab, dan kehormatan diri di hadapan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, uang bertransformasi menjadi sesuatu yang melampaui fungsi transaksionalnya; ia menjadi representasi dari kerja keras, kasih sayang, serta moralitas perempuan yang berjuang di ruang-ruang domestik maupun global.

Dalam kehidupan purna pekerja migran perempuan di Desa Lohbener, uang remitan tidak pernah dipahami sebagai benda ekonomi yang netral. Uang selalu membawa muatan nilai, emosi, dan hubungan sosial yang membentuk bagaimana ia diperlakukan dan dimaknai. Ariel Wilkis (2017) menyatakan bahwa uang memiliki *moral power*, yaitu kemampuan untuk mengorganisasi relasi sosial sekaligus menyematkan dimensi moral dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, uang tidak hanya merefleksikan nilai tukar, tetapi juga menjadi medium untuk mengukur tanggung jawab, pengorbanan, dan komitmen individu dalam lingkungannya.

Bagi purna pekerja migran, remitan mengandung moralitas karena diperoleh melalui kerja yang berat, penuh risiko, dan jauh dari rumah. Proses memperoleh uang itu sendiri sudah dianggap sebagai tindakan bermoral—tanda bahwa seorang perempuan

“berjuang” untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika remitan dikirim, uang tersebut kemudian menjadi simbol kepedulian, kasih sayang, dan loyalitas terhadap keluarga. Dalam konteks ini, nilai moral uang tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi pada cerita, usaha, dan penderitaan yang melatarbelakanginya.

Posisi perempuan sebagai pengirim remitan juga memperkuat pemaknaan moral tersebut. Mereka sering dinilai “baik”, “bertanggung jawab”, atau “berbakti” berdasarkan seberapa besar dan seberapa konsisten mereka mengirimkan uang. Bahkan setelah kepulangan, cara mereka mengelola dan menggunakan remitan masih menjadi dasar penilaian moral dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, remitan berfungsi sebagai penanda karakter moral seseorang: siapa yang dianggap pekerja keras, siapa yang dianggap pelit, siapa yang dianggap peduli, dan siapa yang dinilai tidak memiliki tanggung jawab.

Uang yang dibawa pulang oleh perempuan purna pekerja migran tidak pernah sepenuhnya netral. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai representasi moral, kehormatan, dan identitas sosial. Dalam kehidupan masyarakat Indramayu, remitan hidup dalam dua ranah sekaligus: ranah ekonomi yang konkret dan ranah simbolik yang sarat nilai. Di satu sisi, ia menjadi sumber penghidupan, membiayai konsumsi, pendidikan, serta membangun rumah dan aset. Namun di sisi lain, uang ini juga menjadi ukuran kesalehan, bakti, dan keberhasilan seseorang di mata keluarga dan lingkungan sosialnya.

Remitan membawa cerita tentang kerja, pengorbanan, dan harapan. Setiap lembar uang yang dikirim atau dibelanjakan memiliki makna tersendiri: ada uang yang dikirim untuk menebus utang orang tua, uang untuk membiayai pendidikan adik, atau uang yang dijadikan modal membangun rumah sebagai tanda keberhasilan. Dengan demikian, remitan tidak sekadar menjadi hasil ekonomi, tetapi juga sarana untuk menegaskan posisi moral perempuan yang telah “berjuang” di luar negeri. Ia adalah bentuk material dari cinta, tanggung jawab, dan pengabdian terhadap keluarga.

Dalam konteks ini, moralitas uang menjadi penting karena menentukan bagaimana remitan diperlakukan. Uang migran tidak boleh dianggap sama dengan uang yang diperoleh dengan cara biasa; ia memiliki nilai emosional yang harus dijaga. Oleh

karena itu, banyak perempuan purna migran memilih menggunakan uang hasil kerja mereka untuk hal-hal yang dianggap "baik" dan "bermanfaat," seperti memperbaiki rumah, membantu keluarga, atau kegiatan sosial. Penggunaan uang di luar konteks itu sering kali dipandang tidak pantas, seolah-olah mencemari makna kerja keras yang telah dilakukan.

Remitan, dengan demikian, tidak hanya mencerminkan keberhasilan ekonomi, tetapi juga memelihara tatanan moral masyarakat. Ia menandai siapa yang dianggap berhasil, siapa yang berbakti, dan siapa yang menjaga nama baik keluarga. Melalui cara mereka mengelola, menyimpan, dan membelanjakan uang, para perempuan purna migran menegosiasikan identitasnya di antara dua dunia—dunia ekonomi yang menuntut rasionalitas, dan dunia moral yang menuntut kesetiaan pada nilai sosial dan keluarga.

4.1.1 Makna di Balik Uang Remitan

Dalam kehidupan para purna pekerja migran, uang bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol dari perjalanan panjang, pengorbanan, dan niat baik yang melekat pada setiap rupiahnya. Bagi mereka, remitan adalah hasil dari kerja keras yang penuh risiko, yang tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya. Di titik ini, uang tidak lagi netral—ia mengandung nilai moral, spiritual, dan emosional yang menjadikannya bermakna lebih dalam daripada sekadar pendapatan.

Remitan sering kali dipandang sebagai wujud kasih sayang dan bentuk bakti kepada orang tua. Dalam banyak kasus, perempuan yang merantau tidak menggunakan penghasilannya untuk memperkaya diri, melainkan untuk memastikan keluarganya di rumah hidup lebih layak, terbebas dari hutang, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Praktik ini memperlihatkan bagaimana kerja dan penghasilan perempuan di ranah migrasi justru memperkuat dimensi moral ekonomi keluarga: bekerja menjadi tindakan etis, dan mengirim uang menjadi wujud cinta yang konkret.

Dalam konteks ini, kisah Bu Diah menjadi representasi yang kuat. Baginya, bekerja di luar negeri bukan hanya upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap orang tua. Remitan yang ia kirimkan tidak hanya berfungsi sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan juga

sebagai bentuk pengabdian dan pembuktian diri bahwa hasil kerja kerasnya di negeri orang membawa keberkahan bagi rumahnya sendiri.

Bagi Bu Diah, uang hasil kerja migrasi bukan sekadar alat untuk menabung atau memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga bentuk pemenuhan tanggung jawab moral sebagai anak. Selama bekerja di Arab Saudi, hampir seluruh gaji yang ia terima dikirimkan kepada orang tuanya di Indramayu. Ia tidak menuntut bagian untuk dirinya sendiri, bahkan menganggap bahwa uang itu memang seharusnya menjadi milik orang tuanya. Dalam wawancara, Bu Diah menuturkan bagaimana setiap kali menerima gaji, ia segera mentransfernya ke rumah tanpa menunda. “Yang penting ada uang buat mereka,” ujarnya dengan nada mantap, menggambarkan rasa hormat yang dalam terhadap orang tua yang telah membesarkannya di tengah keterbatasan ekonomi.

Uang hasil kerja migrasi bukan sekadar alat untuk menabung atau memenuhi kebutuhan materi, tetapi menjadi bentuk pemenuhan tanggung jawab moral dan emosional sebagai anak perempuan. Sejak awal keberangkatannya ke Arab Saudi, ia memaknai bekerja bukan hanya sebagai upaya memperbaiki nasib pribadi, melainkan sebagai tugas untuk “membalas budi” kepada orang tua yang telah bersusah payah membesarkannya. Dalam pandangan Bu Diah, penghasilan yang diperoleh di luar negeri tidak pernah benar-benar menjadi miliknya; uang itu “milik keluarga,” terutama milik orang tuanya yang menanggung hutang. Karena itu, setiap kali menerima gaji, ia segera mentransfer seluruhnya ke Indramayu tanpa menunda atau menyisihkan untuk dirinya sendiri. “Yang penting ada uang buat mereka,” ujarnya dengan nada yang menunjukkan kebanggaan sekaligus ketulusan.

Tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana praktik ekonomi dalam konteks migrasi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat asal. Dalam kasus Bu Diah, kerja migrasi menjadi medium di mana nilai-nilai tradisional tentang bakti dan tanggung jawab anak terhadap orang tua beroperasi dan mendapatkan aktualisasinya. Remitan di sini bukan sekadar hasil kerja keras, tetapi juga simbol dari cinta, rasa hormat, dan legitimasi moral. Di banyak keluarga di Lohbener, kiriman uang dari anak perempuan yang bekerja di luar negeri dianggap sebagai bentuk pengabdian yang nyata—sebuah bukti bahwa perempuan juga mampu “mengangkat derajat keluarga,” tidak hanya dalam arti ekonomi, tetapi juga dalam kehormatan sosial.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana remitan bergerak di antara dua ranah: ekonomi dan moral. Secara ekonomi, ia menopang kebutuhan rumah tangga, membayar hutang, dan memperbaiki kondisi hidup keluarga. Namun secara moral, ia berfungsi sebagai tanda bahwa nilai-nilai keutamaan seperti pengorbanan dan kepatuhan terhadap orang tua tetap dijaga, bahkan ketika si pengirim berada jauh dari rumah. Dalam konteks ini, uang bukan lagi benda netral, melainkan sarana simbolik untuk memperkuat hubungan emosional lintas jarak antara anak dan orang tua.

Selain itu, praktik Bu Diah juga menunjukkan dimensi gender dari remitan. Sebagai perempuan, ia memikul tanggung jawab ganda: menjadi pencari nafkah sekaligus penjaga keharmonisan moral keluarga. Pengirimannya yang total kepada orang tua memperlihatkan bentuk femininitas yang khas dalam konteks pedesaan—bukan melalui kepatuhan pasif, tetapi melalui kerja keras dan kontribusi ekonomi. Dengan begitu, posisi perempuan tidak hanya direduksi sebagai "yang memberi," melainkan juga sebagai agen moral yang memelihara stabilitas keluarga melalui tindakan ekonomi.

Dengan kata lain, keputusan Bu Diah untuk mengirim seluruh gajinya bukan semata-mata soal keuangan, melainkan ekspresi dari tatanan moral ekonomi yang menempatkan keluarga sebagai pusat makna hidup. Dalam sistem nilai semacam ini, memberi uang bukan sekadar transaksi, melainkan sebuah ritual sosial yang meneguhkan identitas, peran, dan rasa keterikatan seseorang terhadap keluarganya.

Praktik ini memperlihatkan bahwa remitan tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sebagai simbol moral dari relasi antar generasi. Dalam masyarakat pedesaan seperti Lohbener, pengiriman uang dari anak kepada orang tua memiliki nilai sosial yang tinggi. Ia dipandang sebagai bukti bakti, tanggung jawab, dan keberhasilan. Dengan demikian, tindakan Bu Diah mengirim seluruh gajinya bukanlah tanda ketidakmandirian finansial, melainkan ekspresi dari sistem nilai yang menempatkan keluarga—terutama orang tua—sebagai pusat orientasi moral dan emosional.

Setelah pulang ke Indonesia, makna moral itu tetap melekat pada cara Bu Diah mengelola uangnya. Hasil tabungan selama bekerja di luar negeri ia gunakan untuk membangun warung sederhana di depan masjid desa, meneruskan usaha kakaknya, Bu Neni. Warung itu bukan sekadar sumber pendapatan, tetapi juga bentuk kontinuitas dari

semangat kerja keras yang ia tanam selama migrasi. Dari balik etalase kecil dan termos air panas di warungnya, Bu Diah menerjemahkan kembali hasil remitan menjadi kehidupan yang lebih stabil tidak lagi dalam bentuk uang kiriman, tetapi sebagai penghidupan nyata yang bisa ia pegang dan rawat setiap hari.

Dengan demikian, uang hasil migrasi yang semula hanya berupa nominal kini menjelma menjadi ruang moral yang lebih luas. Ia bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga simbol kehormatan, kemandirian, dan kebanggaan sebagai perempuan yang pernah bekerja di luar negeri.

Cerita yang hampir serupa juga ditemukan dalam kisah Bu Neni, kakak dari Bu Diah, yang memiliki pola pengelolaan remitan dengan nuansa moralitas yang sama kuatnya. Selama bekerja di Arab Saudi, Bu Neni mempercayakan seluruh gajinya kepada ayahnya di Indramayu. Ia tidak pernah secara langsung mengelola hasil jerih payahnya, melainkan memilih untuk menyerahkan penuh keputusan penggunaan uang itu kepada orang tuanya. Bagi Bu Neni, tindakan tersebut bukan bentuk ketidakmandirian, melainkan wujud kepercayaan dan penghormatan terhadap otoritas ayah sebagai kepala keluarga. “Ya kalo itu, almarhum bapak saya yang megang, bukan saya,” ujarnya saat wawancara.

Praktik menyerahkan kendali atas uang ini mencerminkan adanya moral order dalam keluarga migran, di mana remitan menjadi perpanjangan dari relasi kuasa dan kasih dalam rumah tangga. Dalam hal ini, keputusan Bu Neni untuk tidak mengatur sendiri uangnya dapat dibaca sebagai bentuk internalisasi nilai-nilai patriarkal yang masih kuat di desa: bahwa peran ayah atau laki-laki dalam keluarga tetap menjadi pengelola utama sumber ekonomi. Namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan kompleksitas moral yang dijalankan oleh perempuan migran. Dengan menyerahkan uangnya kepada orang tua, Bu Neni tidak sedang kehilangan kendali, melainkan menegaskan dirinya sebagai anak yang berbakti dan patuh, sembari memastikan bahwa hasil kerjanya benar-benar membawa manfaat bagi seluruh keluarga.

Uang hasil kerjanya kemudian dititipkan kepada sang ayah untuk membangun warung di depan rumah—sebuah keputusan yang memperlihatkan bagaimana remitan bertransformasi dari sekadar kiriman uang menjadi bentuk nyata dari kemajuan keluarga.

Walaupun warung tersebut tidak menghasilkan keuntungan besar, keberadaannya memiliki nilai simbolik yang penting: menjadi bukti bahwa hasil kerja keras di luar negeri membuahkan sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, dan dibanggakan. Warung itu bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga monumen kecil dari perjuangan keluarga mereka.

Pengalaman Bu Neni menegaskan bahwa remitan tidak hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga tentang moralitas hubungan keluarga—tentang siapa yang dipercaya, siapa yang berhak mengelola, dan bagaimana kepercayaan itu sendiri menjadi bagian dari sistem nilai yang menata kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, uang migrasi tidak berhenti di tangan pengirimnya, tetapi hidup dalam jaringan relasi sosial yang mengikat keluarga, kehormatan, dan makna pengorbanan.

Dengan demikian, baik Bu Diah maupun Bu Neni menunjukkan bagaimana remitan bekerja sebagai "uang bermoral"—uang yang mengandung nilai kasih sayang, bakti, dan rasa tanggung jawab. Mereka tidak sekadar mengirimkan uang, tetapi juga mengirimkan bagian dari diri mereka: kerja keras, doa, dan keinginan untuk menebus penderitaan keluarga mereka di kampung halaman.

Kisah Bu Diah dan Bu Neni menunjukkan bahwa uang hasil migrasi tidak pernah benar-benar berhenti di ranah material. Ia bergerak melewati batas fungsionalnya sebagai alat tukar, menjadi simbol yang mengikat relasi keluarga, nilai sosial, dan perasaan moral. Dalam dua kisah itu, remitan hadir bukan sebagai bentuk kemandirian individual, melainkan sebagai ekspresi keterikatan sosial yang terus bekerja bahkan setelah migrasi berakhir. Uang yang dikirimkan ke kampung tidak hanya membawa nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan makna tentang kasih sayang, bakti, dan rasa tanggung jawab terhadap orang tua.

Kedua perempuan ini memperlihatkan bagaimana tindakan ekonomi justru menjadi arena moral yang kompleks. Bu Diah, dengan segala keterbatasannya, memilih untuk memberikan seluruh penghasilannya kepada orang tua tanpa sisa, bukan karena tidak tahu cara mengelola uang, tetapi karena ia memahami bahwa nilai uang tidak diukur dari seberapa banyak disimpan, melainkan dari siapa yang mendapatkan manfaatnya. Dalam logika moral seperti ini, memberi kepada orang tua adalah tindakan yang paling

tinggi nilainya — lebih tinggi dari sekadar menabung atau berinvestasi. Di sisi lain, Bu Neni yang mempercayakan uangnya kepada ayahnya, juga memperlihatkan cara yang berbeda dalam mengartikulasikan moralitas kerja migrasi. Ia menyerahkan kontrol finansialnya bukan karena pasrah, melainkan karena percaya bahwa otoritas ekonomi ayah adalah bentuk legitimasi sosial yang menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Jika dilihat lebih jauh, kedua kisah ini menyingkap relasi yang halus antara uang, kasih sayang, dan kekuasaan. Dalam masyarakat seperti Lohbener, uang migran bukan alat untuk menegaskan individualitas, melainkan media untuk memperkuat jaringan sosial yang telah ada. Memberi uang kepada orang tua, membangun rumah, atau membuka warung adalah tindakan yang membawa makna sosial lebih dalam: menunjukkan bahwa seseorang berhasil, tetapi juga bahwa keberhasilan itu tidak boleh memutus hubungan moral dengan keluarga. Perempuan migran seperti Bu Diah dan Bu Neni hidup dalam ketegangan antara dua dunia — dunia kapitalisme yang menuntut kemandirian, dan dunia moral pedesaan yang menuntut kebersamaan. Dalam ketegangan itulah mereka membangun bentuk moralitas baru: menjadi perempuan yang bekerja keras, tetapi tetap berbakti; menjadi pencari nafkah, tetapi tidak kehilangan identitas sosialnya sebagai anak dan bagian dari keluarga.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana remitan berfungsi sebagai "bahasa moral" yang menghubungkan pengalaman kerja global dengan kehidupan lokal. Ia mengubah cara orang memaknai kerja, keluarga, dan kehormatan. Uang hasil migrasi tidak lagi sekadar milik pribadi, melainkan aset simbolik keluarga yang menjaga citra dan status sosial mereka di mata tetangga. Rumah yang dibangun, warung yang berdiri, atau bahkan utang yang terlunasi, menjadi bukti nyata bahwa perempuan migran telah "mengembalikan martabat keluarga."

Dengan demikian, moralitas remitan bukan sekadar cerita tentang siapa yang memberi uang kepada siapa, melainkan tentang bagaimana perempuan migran menegosiasikan makna kerja, kasih sayang, dan tanggung jawab di antara struktur sosial yang masih patriarkal. Dalam setiap kiriman uang yang mereka transfer untuk keluarga, terkandung cerita panjang tentang pengorbanan, cinta, dan perjuangan untuk mempertahankan identitas di antara dua dunia; dunia tempat mereka bekerja, dan dunia yang selalu menunggu mereka pulang.

4.1.2 Aset, Rumah, dan Simbol Keberhasilan

Jika remitan menjadi simbol kasih dan tanggung jawab moral selama masa kerja migrasi, maka wujud paling konkret dari simbol itu hadir setelah kepulangan—dalam bentuk rumah, tanah, atau aset produktif lain yang bisa "dilihat" dan "disentuh." Bagi para purna pekerja migran, membangun rumah bukan sekadar memenuhi kebutuhan tempat tinggal, melainkan menegaskan hasil dari perjuangan mereka di negeri orang. Rumah menjadi monumen atas kerja keras, bukti eksistensi, dan representasi sosial yang meneguhkan bahwa masa kerja di luar negeri tidak sia-sia.

Dalam banyak kasus di Lohbener, rumah hasil remitan dibangun dengan penuh kebanggaan dan cerita panjang. Bu Uus, misalnya, mengingat dengan jelas bagaimana setiap bata dan semen di rumahnya adalah hasil dari tenaga yang ia curahkan selama menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi. "Dinding tembok yang dulu hanya papan kini berdiri kokoh," katanya dengan nada lirih tapi penuh makna. Kalimat itu bukan sekadar deskripsi fisik, tapi pernyataan simbolis tentang perubahan status sosialnya: dari perempuan yang dulu menumpang di rumah orang tua, menjadi pemilik rumah sendiri. Bagi Bu Uus, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal—melainkan wujud martabat dan bukti konkret bahwa dirinya mampu "mengangkat" keluarga.

Namun, keputusan membangun rumah tidak semata-mata rasional dalam logika ekonomi. Bu Uus sendiri mengakui bahwa sebagian besar tetangga dan keluarga sesama mantan TKW memandang membangun rumah sebagai pilihan paling "aman" dibanding membuka usaha. Menurutnya, uang hasil migrasi yang digunakan untuk bisnis seringkali cepat habis, sementara rumah bisa menjadi "jejak" yang bertahan lebih lama. Dalam pandangan moral masyarakat desa, rumah adalah bentuk kekayaan yang paling terhormat—karena ia tidak hanya milik individu, tapi juga menjadi warisan keluarga dan lambang stabilitas sosial. Maka, tindakan membangun rumah sekaligus menciptakan *legitimasi moral* bagi perempuan migran: mereka boleh bekerja jauh, tetapi hasilnya harus tampak dan diakui secara publik.

Pengalaman Bu Diah juga menguatkan makna tersebut. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, ia memilih menginvestasikan hasil tabungannya untuk membuka warung di depan masjid, meneruskan usaha kakaknya. Warung itu menjadi ruang kecil

tempat remitan “berubah bentuk”—dari uang kiriman menjadi sumber penghidupan baru yang bersifat lokal. Dalam praktik sehari-hari, warung itu tidak hanya berfungsi ekonomis, tetapi juga menjadi sarana sosial yang mempertemukan orang-orang desa. Dari balik etalase kaca itu, Bu Diah menjaga ritme hidupnya, memastikan bahwa hasil kerjanya di luar negeri terus berputar dalam bentuk yang bisa ia kontrol.

Rumah, warung, atau aset lain yang dihasilkan dari remitan menunjukkan adanya dimensi simbolik dalam moral ekonomi migran. Di satu sisi, benda-benda ini adalah bentuk “kekayaan yang bermakna”—bukan hanya aset material, tetapi juga manifestasi dari perjuangan, kemandirian, dan kehormatan. Di sisi lain, mereka juga menjadi alat ukur sosial yang membedakan siapa yang dianggap berhasil dan siapa yang tidak. Dalam masyarakat seperti Lohbener, rumah hasil kerja migrasi sering menjadi pusat perhatian dan pembicaraan, sekaligus sumber legitimasi sosial bagi keluarga perempuan migran.

Saya juga melakukan wawancara dengan salah satu warga Desa Lohbener bernama Mas Cahyo, seorang laki-laki berusia 32 tahun. Sebagai penduduk asli Lohbener, Mas Cahyo sudah sangat akrab dengan fenomena migrasi tenaga kerja, baik keberangkatan maupun kepulangan para pekerja migran. Ia menyaksikan langsung bagaimana mobilitas tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa, hingga migrasi dan “pulang kampung” bukan lagi peristiwa luar biasa, melainkan ritme keseharian yang membentuk cara pandang warga terhadap kerja, keluarga, dan keberhasilan.

Kala itu di siang hari tanggal 11 Juni 2025, saya melakukan wawancara di kediaman Mas Cahyo di Desa Lohbener. Suasana rumah Mas Cahyo kala itu lumayan sepi, hanya ada anaknya yang bernama Fatih yang baru pulang dari taman kanak-kanak (TK). Sementara istri Mas Cahyo sedang bekerja. Saya bertanya kepada Mas Cahyo perihal pandangannya sebagai tetangga yang menyaksikan proses migrasi.

> Saya : “Kan mas cahyo melihat fenomena kayak Bu Linda, atau Bu Neni yang pernah menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Tanggapannya gimana?
>
> Mas Cahyo : “Yang pertama mah bagus, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, yang ke satu. Yang kedua dari hasil-hasilnya bisa beli rumah gitu, rumah sendiri, bisa beli motor, cash. Intinya buat mensejahterakan kehidupan mereka sendiri dulu sih.”

> Saya : “Oke. Terus kesan pertama Mas Cahyo waktu denger orang Desa Lohbener yang berangkat jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) itu gimana?”
>
> Mas Cahyo : “Kesan nya ya, bagus. Karena kan dari warga Desa Lohbener sini ada yang berangkat kesana, ke luar negeri, kerja disana. Bisa cari uang sendiri, ya intinya buat kehidupan yang lebih baik. Kalo disana kan lumayan pendapatannya daripada disini.”

Pandangan Mas Cahyo memberikan gambaran yang jernih tentang bagaimana masyarakat Lohbener memaknai fenomena migrasi perempuan sebagai sesuatu yang wajar, bahkan ideal, dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Ia tidak menyoroti migrasi sebagai bentuk keterpaksaan atau pengorbanan, melainkan sebagai strategi rasional sekaligus moral untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ketika ia menyebut bahwa hasil kerja migran bisa digunakan untuk membeli rumah atau motor “secara cash”, hal itu mencerminkan cara pandang masyarakat desa terhadap keberhasilan ekonomi—bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi dari seberapa tampak hasil kerja keras itu di ruang sosial.

Dalam konteks ini, rumah dan motor tidak sekadar benda konsumtif, tetapi simbol status dan bukti keberhasilan yang bisa “dilihat” oleh lingkungan sekitar. Ucapan Mas Cahyo “intinya buat mensejahterakan kehidupan mereka sendiri dulu” juga menunjukkan bahwa masyarakat desa memahami migrasi sebagai tindakan yang memiliki nilai moral ganda: di satu sisi, ia adalah usaha untuk memperbaiki ekonomi; di sisi lain, ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri. Dengan kata lain, bekerja di luar negeri dianggap sebagai keputusan yang sah secara moral, bahkan terpuji, karena berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

Cara pandang seperti ini memperlihatkan bahwa migrasi bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan juga budaya. Ia menjadi bagian dari “normalitas sosial” di Lohbener, sesuatu yang terus direproduksi dari generasi ke generasi. Pernyataan Mas Cahyo bahwa “kalau di sana lumayan pendapatannya daripada di sini” mengandung kritik yang halus terhadap kondisi ekonomi lokal: bahwa desa belum mampu menyediakan peluang kerja yang cukup untuk menjamin kehidupan yang layak. Oleh karena itu, menjadi TKW bukan lagi pilihan alternatif, melainkan satu-satunya jalan yang realistis untuk mencapai kehidupan yang “lebih baik”. Dalam imajinasi sosial warga seperti Mas Cahyo, migrasi

adalah bentuk perjuangan yang sah, bahkan membanggakan—karena dari sanalah keluarga bisa keluar dari kemiskinan dan memperoleh pengakuan sosial.

Namun di balik apresiasi itu, tersimpan juga norma sosial yang kuat: perempuan yang berhasil di luar negeri diharapkan untuk "memamerkan hasilnya" dalam bentuk rumah, warung, atau aset lain di kampung halaman. Ekspektasi ini menciptakan semacam tekanan moral yang halus bagi para purna TKW, di mana keberhasilan ekonomi mereka tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan hidup, tetapi dari sejauh mana mereka mampu menghadirkan simbol-simbol keberhasilan yang diakui masyarakat. Dengan demikian, ucapan Mas Cahyo tidak hanya merefleksikan kebanggaan terhadap para perempuan pekerja migran, tetapi juga menunjukkan struktur sosial yang terus menuntut bentuk-bentuk keberhasilan yang terlihat dan dapat dirayakan bersama.

Melalui pandangan Mas Cahyo, kita bisa memahami bahwa masyarakat Lohbener menempatkan remitan bukan semata sebagai uang hasil kerja, melainkan sebagai representasi moral dari perjuangan dan kehormatan keluarga. Remitan yang diwujudkan dalam rumah, motor, atau warung menjadi penanda bahwa seseorang telah "berhasil" menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga, dan dengan demikian memperoleh pengakuan sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat pedesaan, ekonomi dan moralitas tidak pernah berdiri terpisah—keduanya saling terjalin dalam logika sosial yang menempatkan kerja migrasi sebagai jalan menuju kemuliaan sosial dan spiritual.

Pandangan masyarakat tentang keberhasilan dan citra sosial pekerja migran tidak selalu sejalan dengan pengalaman para purna TKW sendiri. Di satu sisi, masyarakat menganggap keberangkatan ke luar negeri sebagai jalan menuju kesejahteraan dan kebanggaan keluarga. Namun di sisi lain, status sebagai "mantan TKW" kerap memunculkan stereotip yang ambigu—antara hormat dan merendahkan, antara kagum dan curiga. Stigma ini sering kali muncul dari cara pandang masyarakat yang melihat kerja migrasi perempuan bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma domestik dan gender tradisional.

Hal inilah yang tampak dalam pengalaman Bu Linda, salah satu purna pekerja migran asal Desa Lohbener. Sebagai perempuan yang menjalani hidup tanpa suami

setelah kembali dari luar negeri, Bu Linda menghadapi pandangan sosial yang berlapis: di satu sisi dihormati karena berhasil membangun kehidupan yang stabil untuk anaknya, namun di sisi lain sering dipandang sebelah mata hanya karena statusnya sebagai "mantan TKW." Wawancara dengannya membuka ruang refleksi lebih dalam tentang bagaimana perempuan migran menegosiasikan posisi sosial mereka di tengah masyarakat yang masih sarat dengan nilai-nilai patriarkal. Saya juga sempat menanyakan hal serupa pada Bu Linda, dan beliau menjelaskan :

> Saya : "Pernah gak ibu dapat omongan dari tetangga yang negatif?"
>
> Bu Linda : "Selama ini tidak ada sih, adanya yang positif, karena mungkin saya tidak ada suami ya, jadi jarang digosipin cari suami lagi diluar, tapi kalau saya kan tidak nikah lagi, jadi orangnya mikir, wah ini kerja memang demi anak."
>
> Saya : "Menurut ibu ada peningkatan strata sosial karena menjadi pekerja migran?"
>
> Bu Linda : "Sering dipandang rendah, karena cuma dipandang TKW. Tapi kalau kita justru bangga, kalau yang berhasil mereka bisa punya rumah, kuliahin adek, ada yang naik haji, banyak yang seperti itu. Cuma kalau status sosial banyak ngeremih dan ngerendahin, ada yang bilang babu. Tapi kalau kita tidak, justru bangga. Terus sekarang kalau di kampung-kampung, kalau ada rumah bagus, kebanyakan orang mikir, pasti ini TKW, karena kebanyakan para TKW yang berhasil, pulang-pulang pasti langsung bikin rumah bagus, contohnya Mba Opi tadi. besar-besar, dan tingkat."

Pernyataan Bu Linda membuka lapisan lain dari pengalaman sosial para purna pekerja migran: bahwa di balik keberhasilan ekonomi dan simbol prestise yang melekat pada rumah-rumah besar hasil remitan, tersimpan beban sosial yang tidak kalah berat — yakni stigma dan pandangan miring masyarakat terhadap identitas "mantan TKW." Dalam ucapannya, Bu Linda secara halus menggambarkan ambivalensi sosial yang ia hadapi: ia jarang mendapat cibiran karena memilih tidak menikah lagi, tetapi menyadari bahwa banyak perempuan lain di posisinya sering menjadi bahan gosip atau dipandang rendah hanya karena pernah bekerja di luar negeri. Di sini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat desa masih menilai perempuan berdasarkan posisi domestiknya — sebagai istri, ibu, atau janda — bukan dari kerja keras atau kontribusi ekonomi yang mereka berikan.

Sikap Bu Linda yang mengatakan “wah ini kerja memang demi anak” menunjukkan strategi simbolik untuk menegosiasikan citra moralnya di hadapan masyarakat. Dengan menekankan bahwa keputusannya bekerja semata-mata demi anak, ia menegaskan bahwa migrasi bukanlah bentuk pembangkangan terhadap norma perempuan, tetapi perpanjangan dari peran keibuan yang sah secara sosial. Ini penting — karena dalam konteks budaya Jawa pesisir seperti di Lohbener, moralitas perempuan sangat erat dikaitkan dengan pengorbanan untuk keluarga. Maka, ketika Bu Linda menolak menikah lagi, ia sekaligus melindungi reputasinya: ia ingin dikenal sebagai perempuan yang bekerja keras, bukan perempuan yang “melenceng” dari nilai-nilai rumah tangga.

Meski demikian, Bu Linda tetap menyadari bahwa label sosial “TKW” memiliki dua sisi. Ia mengatakan, “sering dipandang rendah, karena cuma dipandang TKW,” tetapi di saat yang sama ia juga menyatakan kebanggaan karena banyak pekerja migran yang berhasil membangun rumah, menyekolahkan adik, bahkan naik haji. Kontradiksi ini menggambarkan realitas sosial yang rumit: di satu sisi, masyarakat menghormati hasilnya, tapi di sisi lain masih merendahkan profesinya. Istilah “babu” yang muncul dalam narasinya adalah bentuk nyata dari diskriminasi simbolik — di mana pekerjaan domestik di luar negeri dianggap rendah karena terkait dengan kerja perawatan (care work), meskipun hasilnya jelas membawa perubahan besar bagi keluarga dan desa.

Bu Linda sendiri mencoba membalik stigma itu menjadi sumber kebanggaan. Ketika ia menyebut bahwa “kalau di kampung ada rumah bagus, pasti dibilang itu TKW,” ia tidak sedang sekadar menggambarkan fenomena, melainkan menyatakan klaim sosial: bahwa justru para perempuan migranlah yang menjadi penggerak perubahan paling nyata di desa. Mereka adalah orang-orang yang membuat wajah Lohbener berubah — dari deretan rumah papan menjadi deretan rumah tembok bertingkat. Dalam pernyataan itu, tersirat kesadaran kelas yang kuat; semacam rasa bangga kolektif dari kalangan perempuan pekerja migran yang berhasil mengukir jejak mereka di lanskap sosial dan fisik desa.

Ucapan Bu Linda menunjukkan bagaimana perempuan migran menegosiasikan status sosialnya melalui dua jalur sekaligus moralitas dan materialitas. Moralitas dijaga lewat narasi “kerja demi anak” dan penolakan terhadap gosip; sementara materialitas

dimanifestasikan lewat rumah, harta, dan kemampuan ekonomi yang meningkat. Dua jalur ini berjalan beriringan untuk membangun kembali kehormatan yang sering kali direnggut oleh stigma sosial. Dengan kata lain, Bu Linda dan perempuan-perempuan seperti dirinya tengah melakukan perlawanan halus terhadap sistem patriarki yang merendahkan mereka, bukan dengan konfrontasi langsung, melainkan lewat kerja keras, kemandirian, dan pembuktian nyata di hadapan masyarakat.

Apa yang dikatakan Bu Linda memperlihatkan bahwa menjadi purna pekerja migran bukan hanya soal pulang membawa uang, tapi juga soal pulang membawa makna baru tentang kehormatan. Mereka menulis ulang posisi perempuan dalam masyarakat desa bukan lagi sekadar yang "ditinggalkan" atau "bergantung," tetapi yang mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi melalui tangan mereka sendiri.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa moralitas remitan tidak berhenti pada tahap pengiriman uang, tetapi terus berlanjut pada bagaimana uang itu diwujudkan dan dikelola setelah kepulangan. Pembangunan rumah atau warung menjadi bentuk "ritual sosial" yang menandai keberhasilan dan pengorbanan, serta meneguhkan posisi perempuan migran sebagai aktor ekonomi yang sah di mata komunitasnya. Dengan kata lain, uang bermoral itu akhirnya memperoleh bentuk fisiknya—ia bertransformasi menjadi dinding, lantai, atau warung yang tidak hanya menopang kehidupan ekonomi, tetapi juga menegakkan martabat dan makna keberhasilan di mata masyarakat.

Namun di balik itu, pembangunan rumah dan investasi aset juga menyimpan dimensi sosial yang lebih dalam. Ia bukan sekadar hasil kerja keras individual, melainkan representasi dari perjuangan kolektif dan nilai moral yang diwariskan antargenerasi. Rumah yang berdiri kokoh bukan hanya "milik" perempuan migran yang membangunnya, tetapi juga menjadi kebanggaan keluarga, bahkan simbol kehormatan desa. Dalam konteks ini, hasil remitan berfungsi ganda: sebagai bukti nyata keberhasilan ekonomi dan sebagai bentuk legitimasi sosial bahwa perjuangan di luar negeri memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penghasilan.

Fenomena tersebut juga memperlihatkan bagaimana perempuan migran menulis ulang makna tentang keberhasilan dan kemandirian. Di masyarakat yang masih memegang kuat nilai patriarki, keberhasilan perempuan sering kali diukur dari

pernikahan dan peran domestik. Namun bagi para purna pekerja migran seperti Bu Uus, Bu Diah, dan Bu Linda, keberhasilan kini diukur dari kemampuan mereka membangun kehidupan yang stabil tanpa harus bergantung pada laki-laki. Rumah yang mereka bangun menjadi ruang baru bagi identitas perempuan migran sebagai tempat di mana kerja keras, pengorbanan, dan cinta mereka terhadap keluarga menemukan bentuk paling konkrit.

Dengan demikian, di tangan para perempuan migran, remitan tidak hanya menjadi sarana untuk bertahan hidup, tetapi juga alat untuk menegosiasikan kembali posisi dan martabat mereka di ruang sosial. Mereka mengubah uang menjadi simbol kekuatan dan legitimasi moral, menjadikan rumah dan aset sebagai wujud nyata dari perjuangan dan otonomi. Dalam setiap bata, dinding, dan lantai yang mereka bangun, tersimpan narasi panjang tentang kerja, cinta, dan kehormatan yang tak bisa dinilai hanya dengan angka. Uang bertindak sebagai entitas moral yang hidup dalam jaringan sosial. Ia mengatur relasi antara purna pekerja migran dengan suami, anak, maupun keluarga besar; memengaruhi posisi tawar perempuan dalam rumah tangga; serta membentuk persepsi masyarakat tentang "keberhasilan" atau "kegagalan" seseorang. Dengan kata lain, uang menjadi bahasa moral yang dipakai untuk memahami dan menilai kehidupan purna pekerja migran di Desa Lohbener.

4.1.2 Transformasi Remitan: Dari Nilai Ekonomi ke Nilai Moral

Transformasi makna remitan menjadi penting untuk dipahami karena pengalaman purna pekerja migran tidak hanya menunjukkan bagaimana uang dihasilkan, tetapi juga bagaimana uang itu berubah fungsinya seiring perubahan situasi hidup dan relasi sosial mereka. Dalam beberapa kasus, remitan tidak berada pada posisi makna yang tetap; ia bergerak mengikuti dinamika kehidupan para perempuan yang mengelolanya. Pada titik inilah perubahan dari nilai ekonomi menuju nilai moral dapat diamati secara paling jelas melalui pengalaman tertentu dari informan. Salah satu kasus yang memperlihatkan perubahan tersebut secara utuh dan berlapis adalah kisah Bu Laeliyah.

Perubahan makna remitan dari nilai ekonomi ke nilai moral terlihat paling kuat dalam kisah Bu Laeliyah. Pada masa awal migrasinya, uang hadir sebagai sumber kehidupan yang sangat fungsional: ia bekerja karena kondisi ekonomi yang hancur setelah perceraian dan kebutuhan mendesak untuk membiayai terapi anaknya yang

berkebutuhan khusus. Pada fase ini, remitan beroperasi sebagai nilai ekonomi murni sebagai alat untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Namun, seiring waktu, remitan yang ia hasilkan mulai menempati posisi yang berbeda. Ketika ia berhasil membangun rumah permanen, mengambil alih kendali finansial yang sebelumnya dipegang suami, dan mendapatkan ruang untuk mengatur uang sesuai kebutuhannya sendiri, remitan tersebut berubah menjadi representasi martabat, agensi, dan keberhasilan moral. Transformasi ini menunjukkan bagaimana uang dapat "dilekati" nilai moral ketika ia diasosiasikan dengan pengorbanan, kemampuan mengambil keputusan, dan bukti kemandirian sebagaimana digambarkan dalam konsep moralisasi uang oleh Ariel Wilkis.

Kisah Bu Laeliyah menjadi penting secara teoretis karena ia memperlihatkan pergeseran yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga simbolik. Ketika remitan mulai menghasilkan status baru, misalnya rumah yang dianggap sebagai bukti keberhasilan atau kemampuan finansial yang membuatnya dihormati oleh keluarga, uang tersebut menjadi instrumen produksi moral capital. Dalam kerangka Wilkis, perubahan ini menandai pergerakan uang dari sekadar alat pemenuhan kebutuhan menuju alat legitimasi moral yang menentukan bagaimana seseorang dinilai dalam komunitasnya. Tidak semua informan menunjukkan pola ini; beberapa hanya menggambarkan remitan sebagai alat ekonomi stabil atau simbol pengorbanan semata. Sementara itu, Bu Laeliyah menggambarkan keseluruhan spektrum, dari kebutuhan dasar hingga pembentukan identitas moral. Karena itu, ia menjadi contoh paling representatif untuk menunjukkan transformasi remitan dari nilai ekonomi ke nilai moral dalam konteks purna pekerja migran.

Transformasi ini menjadi signifikan karena ia tidak hanya menggambarkan perubahan fungsi uang, tetapi juga perubahan struktur relasi sosial yang menyelubungi hidup Bu Laeliyah. Pada titik awal, ketika uang sekadar menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membayar biaya terapi anak, remitan bekerja dalam logika ekonomi yang cenderung stabil: semakin besar kebutuhan, semakin besar pula intensitas kerja dan jumlah uang yang harus dikirim. Namun setelah kebutuhan dasar terpenuhi, makna uang mulai bergeser memasuki ranah moral. Uang yang sebelumnya bersifat fungsional berubah menjadi indikator kemampuan seorang perempuan untuk melampaui kondisi

kerentanan sosial menegaskan bahwa ia bukan lagi subjek yang bergantung pada suami atau keluarga besar, melainkan individu dengan kapasitas untuk membiayai hidupnya sendiri.

Perubahan makna ini selaras dengan gagasan Wilkis mengenai moralisasi uang, yaitu ketika uang mulai berfungsi sebagai medium pembentukan identitas dan legitimasi moral. Pada tahap ini, remitan bukan hanya berbicara tentang apa yang dibeli, tetapi tentang *siapa seseorang* di dalam komunitasnya. Dalam kasus Bu Laeliyah, rumah permanen yang ia bangun tidak sekadar dipandang sebagai aset material, tetapi sebagai pencapaian moral: wujud keberhasilan menghadapi perceraian, ketidakstabilan ekonomi, dan beban pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Rumah tersebut menjadi "monumen sosial" yang mematerialkan perjuangan dan ketekunan, sehingga masyarakat menilai dirinya melalui apa yang remitan itu hasilkan secara simbolik.

Transformasi ini juga berdampak pada cara Bu Laeliyah diposisikan dalam struktur gender desa. Sebelum migrasi, ia berada dalam posisi subordinat: mengandalkan suami, tidak memiliki kontrol finansial, dan rentan secara ekonomi. Namun setelah kepulangannya, remitan membuatnya dapat mengklaim ruang kuasa baru—ia memutuskan alokasi uang, menentukan prioritas pengeluaran, hingga mengatur strategi ekonomi rumah tangga. Perubahan dari ketergantungan menjadi otonomi ini memperlihatkan bahwa remitan memiliki potensi disruptif terhadap struktur gender, sekaligus memungkinkan munculnya negosiasi ulang mengenai peran perempuan dalam keluarga.

Pergeseran makna uang ini tidak terjadi pada semua informan, dan karena itu kasus Bu Laeliyah menjadi penting bagi analisis. Informan seperti Bu Linda atau Mbak Sri menunjukkan makna uang yang relatif lebih stabil, uang sebagai pengorbanan atau alat bertahan hidup tanpa perubahan signifikan dalam struktur relasi atau identitas diri setelah kepulangan. Pada Bu Laeliyah, remitan menjalani proses bertahap: dari perangkat survival, instrumen kasih sayang, alat pembentukan martabat, hingga menjadi moral capital yang memengaruhi posisi sosialnya. Kompleksitas inilah yang menjadikan kasusnya sebagai "model ideal" bagi pembacaan transformasi nilai uang, paling sejalan dengan kerangka teoretis moralitas uang menurut Wilkis.

Dengan demikian, melalui pengalaman Bu Laeliyah dapat terlihat bahwa remitan tidak sekadar berpindah dari satu tangan ke tangan lain sebagai nilai ekonomi, tetapi juga mengalami proses pemaknaan ulang yang berlapis. Uang yang awalnya bekerja untuk menstabilkan kondisi materi membiayai terapi anak, memenuhi kebutuhan dasar, hingga membangun kembali kehidupan setelah perceraian, bertransformasi menjadi medium yang mereproduksi nilai-nilai moral tentang tanggung jawab, keberhasilan, dan kemandirian. Proses ini tidak hanya menegaskan bagaimana remitan beroperasi sebagai perangkat materi, tetapi juga sebagai simbol yang mengorganisasi cara seseorang dinilai dan diakui dalam komunitasnya. Kasus Bu Laeliyah menunjukkan bahwa moralitas uang bukanlah konsep abstrak, melainkan praktik yang tampak dalam perubahan relasi, posisi gender, dan identitas sosial yang ia alami. Transformasi makna inilah yang kemudian membuka ruang bagi analisis selanjutnya mengenai bagaimana remitan dikategorikan, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam kerangka moralitas yang lebih luas.

4.2 *Moral Capital* dalam Konstruksi Sosial Purna PMI

Moral capital muncul ketika remitan tidak lagi dipahami semata sebagai pendapatan, melainkan sebagai sumber legitimasi sosial yang menandai karakter, tanggung jawab, dan prestasi moral seseorang. Dalam konteks purna pekerja migran, moral capital terbentuk ketika hasil kerja di luar negeri diwujudkan menjadi bentuk-bentuk yang dapat "dibaca" oleh komunitas sebagai tanda keberhasilan. Melalui perspektif Wilkis, moral capital tidak hanya terkait apa yang dibeli dengan uang tersebut, tetapi bagaimana masyarakat menilai proses, pengorbanan, dan tujuan di balik penggunaan uang itu.

Kisah para purna migran menunjukkan bahwa moral capital sering kali diwujudkan dalam bentuk material yang menjadi bukti konkret perjuangan selama bekerja di luar negeri. Rumah permanen, perabot baru, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan anak menjadi penanda kesungguhan, ketahanan, dan komitmen moral yang mereka bangun. Dalam beberapa kasus, moral capital ini beroperasi sebagai mekanisme pembentuk citra—bahwa mereka adalah individu yang "berhasil," bertanggung jawab, dan layak dihormati. Remitan, pada titik ini, berubah menjadi alat yang memproduksi status moral dan memengaruhi posisi seseorang dalam struktur sosial komunitas.

Moral capital juga dapat menggeser dinamika kuasa dalam keluarga. Ketika penghasilan dari migrasi memberi perempuan ruang untuk menentukan arah penggunaan uang, posisi mereka sebagai pengambil keputusan menjadi semakin kuat. Otonomi finansial yang lahir dari remitan tidak hanya mencerminkan kemampuan ekonomi, tetapi juga diinterpretasikan sebagai bukti kedewasaan, keseriusan, dan keberanian menghadapi risiko migrasi. Pada situasi-situasi ini, moral capital menjadi modal simbolik yang memengaruhi bagaimana anggota keluarga lain memperlakukan mereka setelah kepulangan.

Namun, moral capital tidak hanya bekerja sebagai sumber penghargaan, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi sosial yang dapat menciptakan tekanan moral bagi purna pekerja migran. Dalam komunitas di mana migrasi telah menjadi rujukan keberhasilan ekonomi, hasil pemanfaatan remitan menjadi tolok ukur yang terus-menerus diawasi oleh lingkungan sosial. Purna migran yang tidak mampu menunjukkan materialisasi remitan seperti tidak memiliki rumah permanen, tidak membawa perubahan signifikan pada ekonomi keluarga, atau tidak dapat mempertahankan stabilitas finansial setelah pulang seringkali menghadapi penilaian moral yang negatif. Penilaian tersebut muncul dalam bentuk komentar halus, perbandingan dengan sesama purna migran, atau pandangan bahwa mereka "tidak pandai mengelola uang." Pada titik ini, moral capital justru menjadi arena di mana perempuan harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang mereka hasilkan selama bekerja di luar negeri. Moralitas uang, dalam konteks ini, bukan hanya soal bagaimana mereka mengelola remitan, tetapi juga bagaimana mereka menghadapi ekspektasi publik yang melekat pada status sebagai mantan pekerja migran.

Pandangan Mas Cahyo sebagai tetangga juga memperjelas bagaimana moral capital dibentuk dan dikonfirmasi melalui mata sosial masyarakat. Dalam wawancaranya, Mas Cahyo menggarisbawahi bahwa keberhasilan seorang purna migran paling mudah "dibaca" dari kemampuan mereka membeli rumah, motor, atau barang-barang yang tampak secara fisik suatu penanda yang menurutnya langsung menunjukkan seberapa besar jerih payah yang telah dikeluarkan selama bekerja di luar negeri. Ucapannya bahwa pekerja migran "yang susah sendiri, yang cari uang sendiri" menggambarkan penghargaan moral yang dilekatkan pada kerja keras, sekaligus legitimasi bahwa hasil dari migrasi memang pantas dipertontonkan dan dinikmati. Dengan demikian, penilaian

seperti yang diberikan Mas Cahyo tidak hanya merefleksikan pandangan pribadi, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang menegaskan bahwa moral capital membutuhkan materialitas untuk dapat diakui: rumah permanen, kendaraan, atau barang emas bukan hanya aset, tetapi bukti moral yang harus "ditunjukkan" agar seseorang diakui sebagai berhasil.

Ucapan Mas Cahyo bahwa pekerja migran adalah orang yang "susah sendiri, yang cari uang sendiri" tidak hanya menunjukkan empatinya terhadap beratnya kerja migrasi, tetapi juga menyingkap logika moral yang dilekatkan masyarakat pada uang migran. Dengan menekankan bahwa mereka bekerja "sendiri," Mas Cahyo sedang memvalidasi nilai moral dari jerih payah tersebut, bahwa uang yang dihasilkan melalui penderitaan dan pengorbanan memiliki bobot moral yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, pernyataannya bahwa hasil kerja itu "pantas dinikmati" berfungsi untuk melegitimasi praktik mematerialkan remitan dalam bentuk rumah, motor, atau barang-barang lain yang tampak. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan migrasi harus diwujudkan secara visual agar bisa diakui oleh komunitas. Standar inilah yang secara halus menciptakan moral capital: penghargaan moral yang diberikan kepada purna migran karena keberhasilan mereka dapat dilihat secara konkret. Dengan demikian, pandangan Mas Cahyo bukan hanya apresiasi, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial yang membentuk patokan keberhasilan dan mengawasi bagaimana remitan seharusnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Mas Cahyo pula terlihat bahwa moral capital bekerja melalui logika keterlihatan. Keberhasilan tidak diukur dari tabungan, beban mental, atau pengorbanan emosional, tetapi dari apa yang hadir secara kasat mata di ruang sosial desa. Ketika Mas Cahyo menyebut bahwa kesuksesan PMI "secara fisik mah dari itu doang," ia sedang mengartikulasikan standar moral publik yang memengaruhi cara purna migran mengelola remitan mereka. Standar itu kemudian menjadi tekanan sosial yang halus—di mana remitan tidak cukup hanya dikirim atau digunakan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk yang dapat dibaca dan diapresiasi oleh komunitas. Dengan demikian, moral capital tidak hanya lahir dari tindakan para perempuan migran, tetapi juga dari cara masyarakat seperti Mas Cahyo memproduksi, meneguhkan, atau bahkan membatasi definisi keberhasilan mereka.

Melalui rangkaian pengalaman para purna migran dan cara masyarakat menafsirkan hasil kerja mereka, terlihat bahwa moral capital tidak hanya lahir dari apa yang dilakukan para pekerja migran di luar negeri, tetapi juga dari bagaimana komunitas membingkai, menilai, dan mengakui penggunaan remitan tersebut. Materialisasi remitan menjadi rumah, perabot baru, atau kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga bukan sekadar pencapaian ekonomi, tetapi bukti moral yang terus-menerus dipantau oleh lingkungan sosial. Ucapan dan penilaian dari figur-figur seperti Mas Cahyo menunjukkan bahwa moral capital bekerja melalui mekanisme keterlihatan, di mana status moral seseorang ditentukan oleh sejauh mana hasil migrasi dapat dibaca secara publik. Dalam konteks ini, moralitas uang menjadi proses yang berlangsung timbal balik: purna migran memaknai uang sebagai jerih payah, cinta, dan pengorbanan, sementara masyarakat menempatkan nilai moral tersebut dalam kerangka evaluasi sosial yang menghasilkan penghargaan maupun tekanan. Dengan demikian, moral capital menjadi simpul yang mempertemukan pengalaman personal migrasi dengan penilaian sosial komunitas, sekaligus menegaskan bahwa remitan memiliki fungsi moral yang lebih luas dibanding sekadar menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

4.2.1 *Safeguarded Money* Pada Tubuh Remitan : Remitan Sebagai Sarana Investasi

Dalam kerangka teori *The Moral Power of Money* yang dikemukakan oleh Ariel Wilkis, uang dipahami sebagai entitas yang memiliki muatan moral dan merepresentasikan posisi sosial individu melalui cara uang tersebut diperoleh, dikelola, dan digunakan. Wilkis membagi uang ke dalam beberapa kategori—seperti *earned money, lent money*, *donated money*, *political money*, *sacrificed money*, dan *safeguarded money*—yang masing-masing mencerminkan relasi moral dan kekuasaan tertentu. Namun demikian, tidak seluruh kategori uang tersebut muncul secara seimbang dalam setiap konteks sosial. Pemilihan kategori tertentu dalam penelitian ini didasarkan pada dominasi praktik dan makna uang yang muncul dalam pengalaman hidup purna pekerja migran perempuan di Desa Lohbener.

Dalam konteks purna pekerja migran, remitan pada awalnya dapat dipahami sebagai *earned money*, yaitu uang yang diperoleh melalui kerja dan pengorbanan tenaga di luar negeri. Akan tetapi, setelah fase migrasi berakhir dan informan kembali ke daerah asal, makna *earned money* tersebut mengalami pergeseran. Uang tidak lagi dimaknai terutama sebagai hasil kerja aktif, melainkan sebagai hasil dari pengorbanan masa lalu yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dengan mudah. Situasi ini terutama dialami oleh purna pekerja migran yang telah memasuki usia nonproduktif atau tidak lagi memenuhi syarat untuk kembali bekerja ke luar negeri. Dalam kondisi demikian, kategori *earned money* menjadi kurang relevan untuk menjelaskan praktik pengelolaan remitan pasca kepulangan, karena fokus utama informan tidak lagi pada proses memperoleh uang, melainkan pada bagaimana uang yang tersisa dimaknai dan digunakan untuk menopang kehidupan.

Selain itu, kategori lain seperti *lent money* dan *donated money* juga tidak menempati posisi sentral dalam praktik ekonomi informan. Berdasarkan temuan lapangan, relasi keuangan purna pekerja migran dengan keluarga maupun lingkungan sosial jarang dimaknai sebagai hubungan pinjam-meminjam formal atau donasi sukarela dalam pengertian moral yang terpisah dari kewajiban keluarga. Sebaliknya, alokasi uang remitan hampir selalu dilekatkan pada tanggung jawab moral sebagai ibu, istri, atau anak, sehingga batas antara memberi, berkorban, dan memenuhi kewajiban menjadi kabur. Dengan demikian, penggunaan kategori *lent money* atau *donated money* tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas makna moral yang melekat pada remitan dalam konteks ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti dua kategori uang dalam teori Wilkis, yaitu *safeguarded money* dan *sacrificed money*. Kedua kategori ini dianggap paling relevan untuk menjelaskan bagaimana purna pekerja migran memaknai dan mengelola remitan setelah kepulangan. *Safeguarded money* merepresentasikan upaya informan untuk melindungi uang dari risiko habis, baik melalui konversi ke dalam bentuk aset permanen seperti rumah dan tanah maupun melalui tabungan yang disimpan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Sementara itu, *sacrificed money* menggambarkan uang yang secara sadar "dikorbankan" demi kepentingan keluarga, terutama untuk pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan

keberlangsungan hidup anggota keluarga lain, meskipun hal tersebut sering kali mengorbankan kepentingan pribadi informan sendiri.

Dengan memfokuskan analisis pada *safeguarded money* dan *sacrificed money*, penelitian ini berangkat dari temuan lapangan yang menunjukkan bahwa pemaknaan remitan oleh purna pekerja migran tidak berhenti pada fungsinya sebagai sumber pendapatan, melainkan terartikulasikan melalui praktik menjaga dan mengalokasikan uang dalam konteks relasi keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari informan, uang remitan kerap diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya bebas digunakan, melainkan dilekati pertimbangan moral terkait tanggung jawab terhadap anak, pasangan, dan keluarga luas. Praktik ini tampak, misalnya, dalam keputusan untuk mengubah uang menjadi aset permanen atau dalam kesediaan menghabiskan tabungan demi kebutuhan anggota keluarga lain.

Dalam konteks tersebut, *safeguarded money* dan *sacrificed money* tidak dipahami sebagai kategori normatif, melainkan sebagai cara informan mengklasifikasikan dan memberi batas pada penggunaan uang remitan dalam kehidupan pasca migrasi. Pengelompokan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan remitan berlangsung dalam kerangka moral tertentu, di mana keputusan ekonomi selalu berkaitan dengan relasi sosial, posisi gender, dan pengalaman migrasi sebelumnya. Dengan demikian, transformasi remitan dari nilai ekonomi menuju nilai moral tidak muncul sebagai proses yang abstrak, tetapi terwujud melalui praktik konkret pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari purna pekerja migran di Desa Lohbener.

Kepulangan para purna migran tidak hanya meninggalkan jejak pada pengalaman sosial dan relasi keluarga, tetapi juga pada cara mereka memaknai uang yang pernah dikirimkan selama bekerja di luar negeri. Remitan yang sebelumnya bersirkulasi sebagai penghasilan rutin—untuk kebutuhan harian, biaya sekolah, atau konsumsi keluarga—bertransformasi setelah kepulangan menjadi sesuatu yang lebih stabil dan berjangka panjang. Bagi para purna migran, uang tidak lagi dipahami semata sebagai alat tukar, melainkan sebagai sumber keamanan yang harus dijaga, disimpan, dan dipertahankan dalam bentuk aset yang memiliki nilai keberlanjutan. Pada titik ini, remitan memperoleh fungsi baru: ia tidak lagi bergerak cepat dalam arus pengeluaran, tetapi "dipendam" dan dimaterialkan dalam bentuk bangunan, tabungan, atau kepemilikan barang bernilai

sebagai cara melindungi masa depan keluarga dari ketidakpastian ekonomi pasca migrasi. Transformasi inilah yang kemudian membuka ruang untuk memahami remitan tidak hanya sebagai praktik ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan moral yang sarat makna sosial.

4.2.1 Dari Remitan ke Aset Permanen : Implementasi Safeguarded Money

Pada pengalaman para purna migran, remitan tidak selalu dipahami sebagai uang yang bersifat sementara atau sekadar alat pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pada titik tertentu, remitan mengalami proses pemaknaan ulang: dari uang yang bergerak cepat dalam sirkulasi ekonomi keluarga menjadi uang yang dijaga, disimpan, dan diwujudkan dalam bentuk aset yang lebih stabil. Praktik ini mencerminkan cara para mantan pekerja migran melindungi hasil kerja mereka dari risiko ekonomi pasca-kepulangan, sekaligus memastikan bahwa jerih payah selama bertahun-tahun di luar negeri meninggalkan jejak yang bersifat permanen. Transformasi remitan menjadi aset material juga menghadirkan dimensi moral, karena hasil migrasi dipertanggungjawabkan melalui sesuatu yang "terlihat," bertahan lama, dan dapat dinikmati keluarga.

4.2.1.1 Praktik *Safeguarded Money* Oleh Bu Linda

Bentuk pemaknaan tersebut terlihat jelas dalam kisah Bu Linda. Alih-alih menggunakan remitannya untuk konsumsi sesaat atau kepentingan pribadi, ia memilih mengarahkan sebagian besar uang yang dikirimkan selama bekerja di luar negeri untuk membangun dan memperbaiki rumah di desa. Keputusan ini bukan hanya dipahami sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai cara "mengamankan" hasil kerja migrasi agar tidak hilang begitu saja setelah ia pulang. Rumah yang berdiri dari remitan menjadi wujud konkret dari kerja keras, pengorbanan fisik, dan ketekunan selama hidup sebagai pekerja migran—sekaligus penanda moral bahwa uang yang ia peroleh telah dipergunakan secara bertanggung jawab bagi keberlangsungan keluarga.

Dalam wawancara, Bu Linda menjelaskan bahwa perbedaan paling terasa antara penggunaan uang saat bekerja di luar negeri dan setelah pulang ke kampung halaman terletak pada orientasi pengeluaran. Ketika masih bekerja di luar negeri, sebagian besar uang ia gunakan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari,

sementara sisanya kadang dialokasikan untuk membeli barang-barang kecil seperti jajanan atau perhiasan emas. Namun, setelah kembali ke rumah, pengeluaran remitan sepenuhnya difokuskan pada kebutuhan keluarga—mulai dari listrik, air, beras, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Di tengah pengeluaran rutin tersebut, ia tetap menyisihkan sebagian uang sebagai bentuk simpanan yang dianggap penting untuk masa depan. "Ada alhamdulillah, kebeli BTN, di dekat Polsek Sindang," ujar Bu Linda, merujuk pada hasil tabungan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kepemilikan rumah BTN. Tabungan yang berubah menjadi aset permanen tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan finansialnya selama bekerja sebagai migran, tetapi juga memperlihatkan bagaimana remitan diperlakukan sebagai uang yang harus dijaga dan diamankan — dikonversi menjadi sesuatu yang bertahan lebih lama dibandingkan konsumsi sehari-hari.

Selain membeli rumah BTN dari hasil tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja di luar negeri, Bu Linda juga menceritakan bahwa proses mengamankan uang tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. Ia menabung sedikit demi sedikit, mengikuti ritme gaji dan kiriman remitan yang ia sisihkan dari kebutuhan harian. Keputusan untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan perumahan lahir dari rasa cemas terhadap masa depan setelah ia tidak lagi bekerja sebagai migran. Dengan memiliki rumah sendiri, ia merasa tidak perlu lagi memikirkan biaya sewa atau risiko kehilangan tempat tinggal. Rumah BTN itu kemudian menjadi penanda paling nyata dari hasil migrasinya — sesuatu yang dapat ia lihat, sentuh, dan banggakan sebagai buah dari kerja keras bertahun-tahun.

Bu Linda juga menuturkan bahwa rumah tersebut bukan hanya dimaknai sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai bentuk jaminan bagi anak-anaknya. Ia ingin memastikan bahwa, sekalipun dirinya tidak lagi bekerja dan penghasilan tidak stabil, keluarganya tetap memiliki aset yang aman. Rumah itu menjadi ruang perlindungan yang memberi rasa tenang, terutama karena ia membangunnya dari uang yang dikumpulkan melalui kerja keras dan pengorbanan fisik di luar negeri. Dalam ceritanya, tampak bahwa keputusan untuk membeli rumah bukanlah

keputusan spontan, melainkan hasil pertimbangan panjang tentang bagaimana remitan sebaiknya "diamankan" agar tidak habis begitu saja dalam kebutuhan konsumsi jangka pendek.

4.2.1.2 Praktik *Safeguarded Money* Bu Uus

Dalam percakapannya, Bu Uus menjelaskan bahwa rumah yang ia tempati saat ini dibangun dari hasil kerjanya selama menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Ketika saya memastikan hal tersebut, ia menjawab singkat namun tegas, "Iya betul. Ini dibangun pakai uang saya hasil kerja di Arab." Bagi Bu Uus, rumah tersebut bukan hanya bangunan biasa, melainkan jejak langsung dari kerja fisik yang ia lakukan bertahun-tahun di luar negeri. Setiap bagian rumah — dari tembok hingga atap — menjadi penanda bahwa uang yang ia kumpulkan tidak habis begitu saja, tetapi dikonversi ke sesuatu yang permanen dan bertahan lama.

Dalam ceritanya, Bu Uus juga menyebut bahwa membangun rumah telah menjadi semacam pola umum di kalangan pekerja migran perempuan di lingkungannya. Ketika saya bertanya apakah benar purna migran "pasti" membangun rumah setelah pulang, ia menjawab, "Iya bangun rumah, cuman kalo kata orang tua kalo buat usaha pasti habis, tapi kalo buat bangun rumah mah malah bagus." Ucapan itu menunjukkan cara pandangnya terhadap uang remitan: usaha dianggap penuh risiko karena uang bisa cepat habis, sementara rumah dipahami sebagai bentuk pengamanan yang lebih pasti dan stabil. Rumah, bagi Bu Uus, adalah cara menjaga remitan agar tidak hilang dalam arus pengeluaran atau kegagalan usaha.

Pilihan Bu Uus untuk memusatkan hasil remitannya pada pembangunan rumah juga mencerminkan keinginannya untuk menciptakan rasa aman bagi dirinya dan keluarganya setelah kepulangan. Dengan memiliki rumah sendiri, ia tidak perlu lagi khawatir tentang tempat tinggal atau kemungkinan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa. Rumah tersebut menjadi simbol keberhasilan kerja migrasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas uang yang ia kirimkan sepanjang masa kontraknya di luar negeri — sesuatu yang terlihat, permanen, dan dapat diwariskan.

4.2.1.3 Praktik *Safeguarded Money* Bu Betty

Dalam wawancara, Bu Betty menceritakan bahwa setelah kepulangannya dari luar negeri, ia sebenarnya masih memiliki keinginan untuk kembali bekerja. Namun, rencana tersebut berubah ketika ia menikah, dan bersama suaminya mulai membangun usaha empang. “Pengennya mah kerja lagi, tapi saya keburu nikah. Dinikahin sama suami saya terus ngebangun usaha empang. Ya alhamdulillah banyak untungnya,” ujarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fase pasca migrasi bagi Bu Betty tidak sepenuhnya berhenti pada posisi sebagai mantan pekerja migran, tetapi berlanjut ke proses penataan ulang kehidupan ekonomi melalui usaha keluarga.

Usaha empang yang dijalankan bersama suaminya menjadi bentuk keberlanjutan dari hasil kerja migrasi, sekaligus strategi untuk mempertahankan kestabilan ekonomi setelah ia tidak lagi bekerja di luar negeri. Alih-alih kembali bergantung pada pekerjaan formal atau migrasi ulang, Bu Betty memilih menggunakan peluang sosial yang terbuka melalui pernikahan dan jaringan keluarga untuk menciptakan sumber penghasilan baru. Di sini, kehidupan pasca kepulangan tampak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pribadi, tetapi juga oleh perubahan status sosial — dari perempuan migran yang bekerja sendiri menjadi istri sekaligus mitra ekonomi dalam rumah tangga.

Dari pengalaman Bu Linda, Bu Uus, dan Bu Betty terlihat bahwa remitan tidak hanya diperlakukan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana melindungi masa depan setelah mereka kembali ke desa. Baik pada Bu Linda maupun Bu Uus, *safeguarded money* dimaterialkan secara jelas dalam bentuk rumah dan aset permanen. Remitan dikunci dalam bangunan fisik—rumah BTN pada kasus Bu Linda, dan rumah hasil pembangunan bertahap pada kasus Bu Uus. Keputusan tersebut lahir dari kecemasan terhadap ketidakpastian pendapatan setelah tidak lagi bekerja sebagai migran. Dengan menjadikan remitan sebagai aset yang menetap, mereka memastikan bahwa jerih payah selama bertahun-tahun di luar negeri tidak kembali “hilang” dalam arus konsumsi. Rumah, pada titik ini, berfungsi ganda: sebagai jaminan ekonomi sekaligus penanda moral bahwa hasil migrasi telah dipergunakan secara bertanggung jawab.

Berbeda dengan dua kasus tersebut, pengalaman Bu Betty menunjukkan bentuk *safeguarded money* yang bergerak ke arah investasi sosial ekonomi melalui usaha keluarga. Alih-alih memusatkan remitan pada materialisasi aset fisik, stabilitas ekonomi pasca kepulangan ia bangun melalui usaha empang bersama suaminya. Meskipun tidak sepenuhnya berasal dari remitan, keberlanjutan ekonomi ini berdiri di atas posisi sosial yang ia peroleh setelah migrasi: pernikahan, jaringan keluarga, dan redistribusi tanggung jawab ekonomi. Di sini, *safeguarded money* tidak hanya diwujudkan dalam bentuk barang atau rumah, tetapi dalam pembentukan sumber penghidupan baru yang memungkinkan keluarga tetap bertahan tanpa harus kembali bermigrasi. Artinya, keamanan masa depan tidak selalu dipatrikan pada tembok rumah, tetapi juga pada relasi, usaha, dan stabilitas pendapatan.

Jika dibandingkan, ketiganya memperlihatkan variasi strategi perlindungan remitan :

Informan	Strategi Perlindungan Remitan
Bu Linda	Tabungan yang diproyeksikan untuk membangun rumah BTN.
Bu Uus	Tabungan yang diproyeksikan untuk membangun rumah.
Bu Betty	Mengumpulkan uang remitan sebagai modal usaha empang dengan suami.

Namun, di balik perbedaan bentuknya, terdapat benang merah yang sama: remitan selalu diarahkan ke sesuatu yang “aman”, bertahan lama, dan bernilai moral. Uang tidak dianggap selesai ketika habis dibelanjakan, melainkan harus *mengendap* dalam bentuk yang dapat dibuktikan—baik melalui rumah, aset, maupun usaha. Dengan cara itu, mereka meneguhkan diri sebagai perempuan yang tidak hanya mampu bekerja di luar negeri, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja tersebut di hadapan keluarga dan komunitas.

4.3 Remitan sebagai *Sacrificed Money*

Pada sebagian purna migran, remitan tidak hanya hadir sebagai aliran uang yang menopang kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai bentuk pengorbanan yang melekat pada tubuh, emosi, dan relasi mereka. Uang yang dikirimkan selama bekerja di luar negeri lahir dari proses kerja yang penuh ketegangan: jam kerja yang panjang, jarak yang memisahkan mereka dari anak dan orang tua, serta rasa rindu yang tidak pernah benar-benar usai. Karena itu, remitan tidak dipahami semata sebagai upah, melainkan sebagai hasil dari pengorbanan—waktu yang hilang, kesempatan merawat anak yang tertunda, dan beban kerja domestik yang harus ditanggung sendirian di negara orang. Dalam kerangka ini, remitan memasuki wilayah *sacrificed money*: uang yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan kewajiban moral, terutama sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu, anak, atau anggota keluarga yang dipercaya menopang kehidupan rumah tangga.

Sebagai *sacrificed money*, remitan jarang dinikmati oleh pengirimnya untuk kepentingan pribadi. Uang tersebut hampir selalu diarahkan pada keperluan orang lain: biaya makan, pendidikan anak, pengobatan keluarga, pembayaran utang, hingga kebutuhan sehari-hari yang menjamin keberlangsungan hidup rumah tangga di desa. Pemaknaan seperti ini membuat remitan bergerak dalam logika moral, bukan semata logika ekonomi—di mana "membagi" dan "mengorbankan" diri justru dipandang sebagai tindakan yang benar dan layak secara sosial. Pada titik ini, tubuh pekerja migran, terutama perempuan, menjadi medium yang menanggung dua beban sekaligus: bekerja untuk menghasilkan uang, dan memastikan bahwa uang tersebut tidak kembali pada dirinya, melainkan berubah menjadi bentuk pengorbanan bagi orang-orang yang ia cintai.

Diksi "dikorbankan" yang dimaksud adalah ketika uang remitan ditabung dan ditujukan untuk keperluan orang lain di dalam keluarga, sementara kebutuhan pribadi pengirim justru dikesampingkan. Remitan tidak diperlakukan sebagai ruang bagi pekerja migran untuk menikmati hasil kerjanya seperti membeli keperluan diri, rekreasi, atau peningkatan kualitas hidup personal, diarahkan hampir sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan anak, kesehatan anggota keluarga, biaya pendidikan, atau keberlangsungan rumah tangga di desa. Dalam situasi ini, pengorbanan muncul bukan hanya pada level finansial, tetapi juga pada level emosional: para purna migran menerima bahwa hasil

kerja mereka tidak kembali kepada diri sendiri, melainkan "mengalir keluar" sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dipenuhi. Karena itu, *sacrificed money* tidak sekadar merujuk pada hilangnya kesempatan konsumsi pribadi, tetapi pada pilihan sadar untuk menempatkan kesejahteraan keluarga di atas kebutuhan diri, sekalipun hal tersebut lahir dari proses kerja yang berat dan penuh risiko.

Dalam praktiknya, bentuk pengorbanan ini tidak hanya tampak pada alokasi remitan yang sepenuhnya diarahkan untuk keluarga, tetapi juga pada keputusan para purna migran untuk menahan keinginan, membatasi konsumsi diri, dan hidup dalam kesederhanaan meskipun secara finansial mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menikmati sebagian hasil kerjanya. Banyak dari mereka yang memilih untuk tidak membeli barang-barang pribadi, pakaian baru, atau kebutuhan rekreatif, karena merasa bahwa setiap rupiah yang disimpan akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk anak, orang tua, atau keberlangsungan rumah tangga. Pada titik ini, remitan menjadi ruang di mana nilai-nilai seperti ketulusan, tanggung jawab, dan pengabdian diwujudkan secara konkret. Maka, *sacrificed money* bukan hanya kategori ekonomi, melainkan ekspresi moral yang menegaskan identitas mereka sebagai sosok yang rela berkorban demi kesejahteraan orang lain, bahkan setelah kepulangan dari migrasi.

4.3.1 Pengelolaan Sacrificed Money Oleh Bu Laeliyah

Dalam ceritanya, Bu Laeliyah menjelaskan bahwa sebagian besar remitan yang ia kirim selama bekerja di luar negeri tidak pernah ia gunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan diprioritaskan untuk kebutuhan anaknya yang menyandang *cerebral palsy*. Ia menuturkan bahwa karena kedua orang tuanya sudah tiada dan ia tidak lagi memiliki pasangan, uang yang ia kirimkan hanya difokuskan pada biaya pemeliharaan dan perawatan anak. Di Taiwan, majikan bahkan membantu membukakan rekening bank khusus untuknya, sehingga sebagian pendapatannya dapat langsung disisihkan sebagai tabungan, sementara pengiriman uang dilakukan sesuai kebutuhan anak. Anak Bu Laeliyah tinggal di sebuah yayasan yang menyediakan layanan terapi, dokter, dan perawatan intensif, sehingga setiap bulan ia harus mengirimkan dana sebesar dua hingga tiga juta rupiah untuk biaya perawatan tersebut. Uang itu, kata Bu Laeliyah, tidak pernah

bersisa untuk dirinya; seluruhnya diarahkan demi memastikan bahwa anaknya tetap mendapatkan perawatan yang layak.

Dalam penuturannya, Bu Laeliyah menjelaskan bahwa sejak awal bekerja di luar negeri, ia sudah memosisikan remitan bukan sebagai uang yang dapat ia gunakan untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai sumber biaya yang sepenuhnya ditujukan untuk keberlangsungan hidup anaknya. Kondisi keluarganya membuat orientasi keuangan tersebut semakin tegas. Ia tidak lagi memiliki orang tua yang harus ia kirimi uang, dan setelah bercerai, ia juga tidak memiliki pasangan yang menjadi tanggungan bersama. Dengan demikian, hampir seluruh alokasi remitan dipusatkan pada kebutuhan anak—bukan dalam bentuk konsumsi sehari-hari, melainkan biaya perawatan jangka panjang di yayasan tempat anaknya tinggal. Posisi ini membuat remitan berfungsi secara tunggal: uang yang dihasilkan dari tubuh dan kerja Bu Laeliyah di luar negeri bergerak keluar dari dirinya, lalu menetap pada kebutuhan anak sebagai satu-satunya prioritas finansial.

Keputusan Bu Laeliyah untuk mengutamakan anaknya tampak jelas dari cara ia mengatur aliran uang setiap bulan. Di Taiwan, majikan membukakan rekening bank khusus atas namanya, yang pada akhirnya mempermudah proses pemisahan antara uang untuk kebutuhan pribadi dan uang yang harus disisihkan untuk anak. Namun, dalam praktiknya, porsi terbesar dari pendapatan tetap diarahkan ke pengiriman remitan. Ia mengirim uang "seperlunya untuk anak," sementara bagian yang tersisa hanya sedikit dan sebagian besar kembali disimpan sebagai tabungan darurat, bukan untuk dipakai memenuhi keinginan pribadi. Pengiriman dana sebesar dua hingga tiga juta rupiah setiap bulan digunakan untuk membayar biaya layanan yayasan yang menyediakan terapi, dokter, dan perawatan intensif. Biaya tersebut bukan sekadar biaya operasional, tetapi menjadi jaminan agar anaknya tetap berada dalam lingkungan yang aman dan terawat ketika ia bekerja jauh dari rumah.

Pada titik ini terlihat bahwa pengorbanan tidak hanya hadir pada kerja fisik di luar negeri, tetapi juga pada cara Bu Laeliyah mengatur prioritas hidupnya. Ia menahan konsumsi diri, membatasi belanja, dan memilih hidup sederhana meskipun secara ekonomi ia memiliki ruang untuk menikmati sebagian hasil

kerjanya. Setiap rupiah yang dikirimkan untuk anaknya mengandung penundaan atas hak tubuhnya sendiri untuk beristirahat, merawat diri, atau merasakan kenyamanan. Remitan tidak pernah kembali kepada dirinya sebagai sumber kesejahteraan personal, melainkan terus bergerak menjauh sebagai bentuk tanggung jawab moral yang ia yakini harus dipenuhi. Dengan demikian, *sacrificed money* dalam pengalaman Bu Laeliyah tampak sebagai praktik yang konsisten: uang dihasilkan oleh tubuhnya, tetapi manfaatnya tidak pernah melekat pada dirinya sendiri, uang itu sepenuhnya dikorbankan demi keberlangsungan hidup anak.

Remitan yang dikirimkan Bu Laeliyah dengan demikian tidak pernah kembali kepada tubuhnya sendiri sebagai ruang pemulihan ataupun konsumsi pribadi. Uang tersebut "dikorbankan" sepenuhnya untuk kebutuhan anak, sementara ia menjalani hidup di luar negeri dengan menahan keinginan dan membatasi pengeluaran diri. Pilihan ini bukan lahir dari paksaan semata, tetapi dari keyakinan moral bahwa tanggung jawab seorang ibu harus diwujudkan melalui alokasi remitan bagi kesejahteraan anak, sekalipun hal itu berarti menunda hak atas dirinya sendiri. Dalam pengalaman Bu Laeliyah, *sacrificed money* menjelma menjadi bentuk kasih sayang yang keras kepala — pengorbanan yang terus berlangsung bahkan setelah ia tidak lagi hadir secara fisik di sisi anaknya.

4.3.1.2 Pengelolaan Sacrificed Money Oleh Bu Neni dan Bu Diah

Bu Neni dan Bu Diah merupakan kakak adik, keduanya berangkat menjadi pekerja migran di Arab Saudi dengan tujuan yang sama; yaitu membantu perekonomian keluarga. Keputusan mereka untuk bermigrasi tidak lahir dari dorongan pribadi semata, melainkan dari beban tanggung jawab yang melekat dalam relasi keluarga. Kondisi kehidupan pernikahan Bu Neni pada saat itu tidak stabil secara ekonomi, sehingga ia merasa harus ikut menopang kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu orang tua di kampung. Sementara itu, Bu Diah berangkat dengan motivasi serupa — bekerja di luar negeri dipandang sebagai cara paling cepat untuk memperoleh penghasilan tetap dan memastikan bahwa keluarga mereka tidak jatuh semakin jauh ke dalam kesulitan finansial. Posisi

sebagai anak sekaligus tulang punggung keluarga membuat keduanya memaknai migrasi bukan sebagai perjalanan individu, melainkan sebagai bentuk kontribusi moral kepada keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.

Selama bekerja di luar negeri, pola alokasi remitan Bu Neni dan Bu Diah menunjukkan bagaimana uang yang mereka hasilkan tidak pernah kembali pada diri mereka sendiri. Hampir seluruh kiriman uang dikirim secara rutin ke rumah untuk memenuhi kebutuhan makan, biaya sekolah adik-adik, pembayaran utang keluarga, hingga biaya kesehatan orang tua. Bu Neni, yang pada saat itu menghadapi tekanan ekonomi dalam rumah tangganya, justru semakin memperbesar porsi remitan yang dikirim ke kampung — meskipun hal itu berarti ia harus mengurangi pengeluaran pribadi dan hidup dalam kesederhanaan di negara tempatnya bekerja. Hal serupa juga dialami Bu Diah; sebagian besar remitannya tidak pernah sempat disimpan untuk dirinya, karena setiap kiriman uang selalu sudah "mempunyai tujuan" bahkan sebelum gajinya diterima. Dalam praktik ini, remitan bergerak keluar sebagai kewajiban sosial, bukan sebagai ruang bagi dirinya untuk menikmati hasil kerja.

Pengalaman keduanya juga memperlihatkan bahwa pengorbanan tidak hanya terjadi pada level finansial, tetapi juga pada dimensi emosional dan relasional. Dengan menyerahkan hampir seluruh remitan untuk keluarga, Bu Neni dan Bu Diah harus menerima kenyataan bahwa hasil kerja keras mereka tidak memberi perubahan berarti bagi kehidupan pribadi mereka sendiri. Mereka jarang membeli sesuatu untuk diri mereka, tidak menyiapkan tabungan khusus bagi masa depan pribadi, dan menunda keinginan-keinginan kecil yang sebenarnya dapat mereka capai dengan penghasilan yang dimiliki. Bahkan ketika kondisi tubuh mulai kelelahan akibat kerja jangka panjang, remitan tetap diprioritaskan untuk kebutuhan keluarga di kampung. Dalam situasi tersebut, kerja mereka di luar negeri hadir sebagai proses pengorbanan yang berlapis: fisik mereka bekerja di tanah orang, sementara uang yang dihasilkan terus mengalir pulang untuk menopang kehidupan orang-orang yang mereka cintai.

Pengorbanan finansial Bu Neni tampak melalui relasi kuasa dalam pengelolaan uang, di mana seluruh gaji dikirim ke ayahnya dan dikelola terpusat,

termasuk untuk kebutuhan keluarga besar seperti renovasi rumah dan biaya pendidikan adik. Meskipun ia bekerja keras di luar negeri, sebagian uang "hilang" karena dimakan kebutuhan banyak orang, sementara rencana ekonomi personal seperti usaha warung tidak sepenuhnya kembali menjadi modal produktif. Di sini, sacrificed money muncul sebagai praktik redistribusi berbasis moral keluarga: uang migran bergerak keluar dari tubuh pekerja perempuan menuju jejaring kekerabatan, menunjukkan bahwa nilai pengorbanan bukan hanya pada meninggalkan rumah, melainkan pada kesediaan melepas kontrol atas hasil kerja demi menjaga harmoni keluarga.

Pada Bu Diah, konsep sacrificed money mengambil bentuk yang berbeda: uang hasil migrasi tidak diarahkan pada akumulasi aset pribadi, melainkan didedikasikan hampir sepenuhnya untuk orang tua—terutama untuk melunasi hutang dan memastikan mereka dapat hidup layak di masa tua. Ia menyerahkan pendapatan kepada orang tua tanpa berani meminta kembali, sehingga kerja migran menjadi instrumen filial duty yang dipenuhi melalui pengorbanan ekonomi jangka panjang. Bahkan ketika kembali ke Indonesia dan mulai membangun usaha kecil, modal yang dipakai berasal dari tabungan bertahun-tahun yang tersisa setelah prioritas untuk keluarga dipenuhi terlebih dahulu. Pola ini menunjukkan bahwa bagi Bu Diah, migrasi bukan proyek mobilitas individual, melainkan proyek penyelamatan ekonomi keluarga yang berlandaskan etika bakti anak terhadap orang tua.

4.4 Safeguarded Money dan Sacrificied Money Menurut Teori Moralitas Uang Ariel Wilkis

4.5 Kesimpulan

Pemaknaan uang sebagai entitas moral dapat terlihat jelas dalam pengalaman Bu Linda. Selama bekerja di tiga negara—Arab Saudi, Taiwan, dan Hongkong—remitan yang ia hasilkan bukan hanya dipahami sebagai hasil kerja ekonomi, tetapi sebagai konsekuensi moral dari posisi dirinya sebagai orang tua tunggal. Setelah suaminya meninggal, ia mengambil keputusan untuk merantau "demi mencukupi kebutuhan anak, seperti susu," sementara anaknya dititipkan pada neneknya selama ia pergi bekerja. Di

sini, remitan sejak awal telah dibebani fungsi moral: uang tersebut dianggap sebagai medium untuk memenuhi kewajiban keibuan yang tidak dapat ia lakukan secara fisik karena jarak.

Situasi ini menunjukkan bagaimana uang membawa *moral power*, sebagaimana dijelaskan Wilkis, karena uang tersebut mengandung nilai yang merujuk pada kasih sayang, tanggung jawab, dan pengorbanan. Selama bertahun-tahun bekerja, Bu Linda mengirimkan uang secara rutin setiap bulan untuk memastikan anaknya memiliki kebutuhan yang cukup. Tindakan ini memperlihatkan bahwa remitan tidak hanya diperlakukan sebagai komoditas, tetapi sebagai alat untuk menjaga hubungan emosional dan sebagai simbol dedikasi kepada keluarga. Keterikatan moral ini menciptakan batas perilaku tertentu: uang tidak boleh dipakai secara sembarangan dan penggunaannya harus mencerminkan prioritas keluarga, bukan kepentingan pribadi.

Dalam praktik yang dilakukan Bu Linda, remitan tidak sekadar berfungsi sebagai aliran uang yang bersifat transaksional, melainkan sebagai perangkat moral yang merekatkan kembali hubungan-hubungan yang terputus akibat migrasi. Ketika ia mengirimkan uang setiap bulan, tindakan itu bukan hanya pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mekanisme untuk mempertahankan kehadirannya sebagai ibu dari kejauhan. Remitan bekerja sebagai "proxy kehadiran"—sebuah bentuk kehadiran simbolik yang menggantikan kedekatan fisik yang hilang. Dengan demikian, remitan memikul beban ganda: menjaga keberlangsungan hidup anak secara material sekaligus memelihara kontinuitas ikatan emosional antara ibu dan anak yang terpisah oleh ruang.

Keterikatan moral ini tidak hanya menghasilkan praktik pengiriman uang, tetapi juga mengatur cara Bu Linda memperlakukan uang tersebut selama ia bekerja. Ia menempatkan dirinya dalam posisi konsumsi yang sangat minim, membatasi pembelian kebutuhan pribadi, dan mengarahkan sebagian besar pendapatannya pada pemenuhan kebutuhan anak. Pola ini menunjukkan bahwa uang bekerja sebagai "prinsip pengarah moral" yang membatasi tindakan-tindakannya: apa yang boleh dibeli, apa yang harus ditunda, dan apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen moralnya sebagai ibu. Dalam kerangka Wilkis, ini menunjukkan bagaimana uang dapat mengkoordinasikan tindakan seseorang melalui nilai-nilai moral yang diproduksi dalam relasi keluarga.

Yang lebih penting, praktik ini menghasilkan moral regimes of expectation atau rezim moral tempat seorang perempuan seperti Bu Linda dinilai, diawasi, dan dikonfirmasi identitasnya melalui remitan. Remitan menjadi semacam bukti performatif: bukti bahwa ia tetap memenuhi peran keibuan, meskipun secara fisik absen. Dengan demikian, uang menjadi medium untuk mempertahankan integritas moral dirinya di mata anak, keluarga besar, dan masyarakat. Di titik ini, remitan bukan hanya alat pemenuhan kebutuhan, tetapi juga "retorika moral": sebuah bahasa sosial yang mengkomunikasikan kasih sayang, pengorbanan, dan tanggung jawab.

Kisah Bu Linda juga memperlihatkan bagaimana uang menjadi penanda martabat. Ia menyebut bahwa menggunakan "uang sendiri" hasil jerih payah adalah bentuk kepuasan tersendiri dan membangun rasa bangga karena ia mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya tanpa bergantung pada orang lain. Pembelian rumah BTN, yang ia sebut sebagai pencapaian terbesar, bukan semata keberhasilan ekonomi, tetapi legitimasi moral yang menunjukkan bahwa pengorbanan selama bekerja telah membuahkan hasil yang layak. Dengan demikian, uang yang ia hasilkan bertransformasi menjadi *modal moral*: dasar bagi keluarga maupun masyarakat untuk menilai dirinya sebagai perempuan yang kuat, pekerja keras, dan bertanggung jawab.

Melalui kisah ini, terlihat bahwa uang tidak dapat dilepaskan dari makna-makna moral yang dibangun melalui pengalaman bekerja dan merawat keluarga dari jarak jauh. Remitan menjadi alat untuk menegosiasikan identitas, menjaga martabat, dan menunjukkan komitmen moral yang melekat pada peran perempuan sebagai ibu dan kepala keluarga. Dengan kata lain, uang bagi Bu Linda bukan sekadar objek ekonomi, tetapi medium moral yang menyimpan dan menegaskan nilai dirinya sebagai purna pekerja migran.